

MAJALAH



PARLEMENTARIA

EDISI 130 TH. XLV, 2015

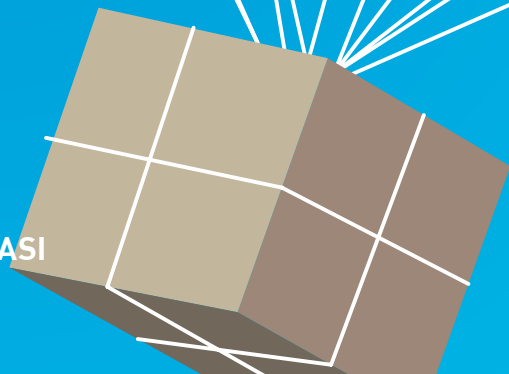


PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

MENYOAL PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

TAK CUKUP DIKEBIRI,
PENJAHAT SEKS HARUS
DIHUKUM MATI

DPR PIMPIN ORGANISASI
PARLEMEN GLOBAL
ANTIKORUPSI



PENGAWAS UMUM:

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/

KETUA PENGARAH:

Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH:

Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA:

Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI:

Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI:

Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan),

Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR:

M. Ibnuur Khalid, Iwan Armanias, Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI:

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI:

Nita Juwita, S.Sos, Supriyanto, Agung Sulistiono, SH,

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO:

Eka Hindra

FOTOGRAFER:

Rizka Arindyia, Naefuroji, M. Andri Nurdriansyah

Yaserto Denus Saptoadji, Andi Muhamad Ilham, Jaka Nugraha

SEKRETARIAT REDAKSI:

I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI:

Abdul Kodir, SH, Bagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI,

Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI,

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350

Fax. (021) 5715536,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com;

www.dpr.go.id/berita

 @dpr_ri

PENGANTAR REDAKSI

Secara umum DPR mengapresiasi dikeluarkannya kebijakan ekonomi oleh Pemerintah sebagai respon terhadap kelesuan ekonomi global. Hingga awal Nopember 2015, pemerintah telah mengeluarkan enam paket kebijakan, dan kemungkinan masih akan disusul oleh kebijakan selanjutnya.

Paket I dan II lebih difokuskan kepada upaya deregulasi dan debirokratisasi untuk meningkatkan iklim investasi. Paket kebijakan III penurunan harga BBM, gas untuk industry dan tarif listrik, paket IV fokus pada persoalan upah buruh, KUR hingga lembaga pembiayaan ekspor. Sedangkan paket V menitik beratkan pada keringanan pajak dalam revaluasi asset perusahaan BUMN atau swasta dan penghapusan pajak ganda untuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate.

Adapun paket kebijakan VI fokus pada pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengelolaan air, dan mengenai impor bahan baku obat serta makanan. Ini dilakukan menyusul adanya putusan MK bahwa air menjadi hal serius yang ingin diatur pemerintah untuk masyarakat banyak.

Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan berharap

Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang langsung dirasakan oleh pasar dan masyarakat sehingga daya beli meningkat. Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto, perlunya kebijakan ekonomi untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga kurang *cespleng* (manjur) untuk meningkatkan daya beli mereka. Paket kebijakan yang telah dikeluarkan cenderung untuk kelas menengah ke atas.

Selain rubrik rutin yang selalu hadir yaitu pengawasan, legislasi dan anggaran, Parlementaria edisi 130 ini juga menghadirkan hasil liputan Sidang GOPAC di Yogyakarta. Dalam sidang yang berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2015 di Yogyakarta Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah dipilih sebagai President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).

Usai acara tersebut Fadli Zon kemudian menyerahkan hasil Sidang GOPAC tersebut ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Langkah ini sekaligus menepis suara miring kepada Dewan yang dinilai akan memperlemah KPK. Kehadirannya di KPK, tegas dia, buat meneguhkan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. (MP)

Kini Majalah Dan Buletin Parlementaria Hadir Lebih Dekat Dengan Anda

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI
Loby Gedung Setjen DPR RI
Ruang Loby Ketua
Ruang Loby Wakil Ketua
Ruang Yankes

Terminal 1 dan 2
Bandara Soekarno Hatta

Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.



DAFTAR ISI

PROLOG

Paket Diracik Efek Dinanti 6

LAPORAN UTAMA

Belum Sepenuhnya Atasi Permasalahan Ekonomi 10

SUMBANG SARAN

Paket Kebijakan Ekonomi Kabinet Kerja dalam Perspektif Publik 26

PENGAWASAN

Bela Negara, Payung Hukumnya Mana? 28

ANGGARAN

Pinjaman Proyek Untuk Pembangunan Infrastruktur, Antara Solusi Dan Potensi Masalah 34

LEGISLASI

RUU Paten : Lindungi Hak Karya Intelektual 38

FOTO BERITA

40

KIAT SEHAT

Hidup Sehat Bebas Stroke 44

PROFIL

Sarifuddin Sudding
Perjuangan Hidup Pemuda Negeri Angin Mamiri 46

KUNJUNGAN KERJA

50

SOROTAN

Tak Cukup Dikebiri,
Penjahat Seks Harus Dihukum Mati 60

LIPUTAN KHUSUS

DPR Pimpin Organisasi Parlemen Global Antikorupsi 62

DPR Dorong Eropa Lebih Manusiawi Terhadap Pengungsi 66

SELEBRITIS

Rio Dewanto: Harus Tahu Politik 68

PERNIK

Semangat Parlemen Modern Warnai Pelatihan Parlemen Remaja 2015 70

Di Lombok Anak Diajari Tenun Sejak Usia Balita 72

PARLEMEN DUNIA

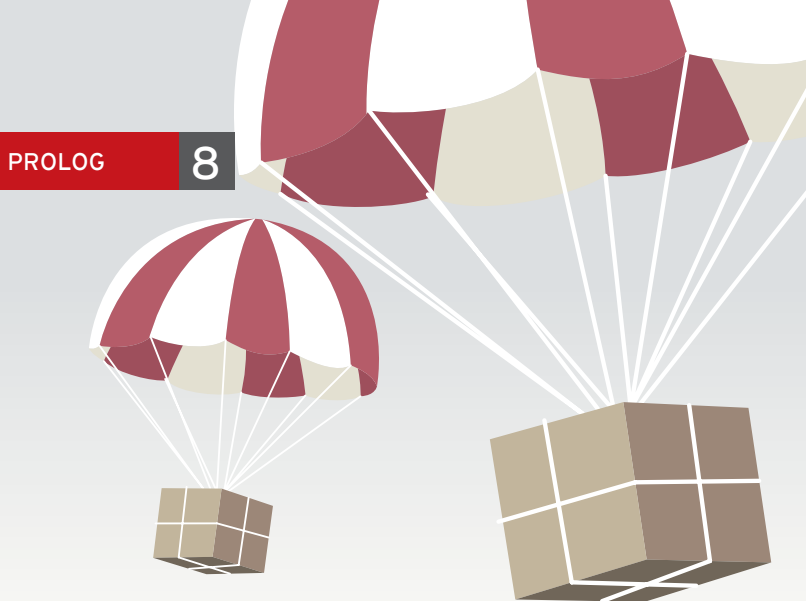
Kebijakan Parlemen Meksiko Mengantisipasi Perubahan Iklim: Proses Legislasi LGCC 74

POJOK PARLE

Satu Ilmu Lain Jimat 78

PROLOG

8



PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

Para ekonom, pengusaha, buruh, dan tak ketinggalan para anggota DPR menyimak serius setiap kali Presiden menyampaikan paket kebijakan ekonominya. Pro kontra selalu muncul. Ada yang menyambut antusias, ada pula yang mencibirnya. Yang paling realistis adalah menunggu seberapa manis racikan paket kebijakan itu kelak.

LAPORAN UTAMA

10



BELUM SEPENUHNYA ATASI PERMASALAHAN EKONOMI

Pemerintah sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I sampai Jilid V dalam kurun waktu September hingga Oktober 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi Tanah Air, di tengah kondisi ekonomi dunia yang kurang bersahabat.

PENGAWASAN

28

BELA NEGARA, PAYUNG HUKUMNYA MANA?



PERMAINAN BANTUAN UNTUK DAERAH PELOSOK

Dalam rangka penuntasan masalah bantuan kemiskinan di daerah pelosok yang rentan dipermainkan oleh oknum (mafia orang miskin), maka kami mengungkapkan fakta sebagai berikut:

- Mahalnya harga beras raskin, di Desa Simangambat seharga Rp60.000,-/15 kg padahal hanya berjarak + 4km dari kantor kecamatan (gudang raskin). Jika ada warga yang komplain, kepala desa marah dan mempersilahkan warga untuk mengadu.
- Pemotongan uang bantuan raskin (PSKS) sebesar Rp50.000,-/keluarga (di wilayah lain besarnya variatif)
- Banyak warga yang namanya terdaftar tapi tidak dapat bantuan modal, ternyata kartunya tidak diberikan dan dananya dicairkan oleh oknum kepala desa untuk keperluan pribadi.

Bahwa kecurangan yang terjadi dalam pendistribusian bantuan kemiskinan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait di Kab. Padang Lawas, namun tidak ada langkah konkritnya sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu

kami berharap DPR RI mengambil langkah hukum yang dapat memberi efek jera kepada para oknum mafia kemiskinan tersebut dan meminimalisir dengan cara-cara antara lain:

- Membuat daftar nama dan jenis bantuan secara *online*
- Mengurangi peran kepala desa
- Membentuk tim pengawas yang tegas dan independen
- Memperketat cara pencairan bantuan
- Menyusun sanksi yang tegas terhadap para mafia
- Mengubah sistim atau regulasi bantuan, dst.

Bahwa kondisi ekonomi yang miskin antara desa relatif sama, maka jika dana yang telah ditetapkan pemerintah masih kurang dibanding dengan jumlah keluarga miskin yang akan diberi bantuan, sebaiknya diberi kuota persentasi dari jumlah penduduk (non perusahaan) desa tersebut guna menghindari kecemburuan sosial warga antar desa dan ada aturan yang jelas dalam menangani kasus apabila ada keluarga yang pantas dibantu namun tidak terdaftar. Terkait dana desa yang akan dicairkan kami juga mengusulkan dibuat kontak pengaduan masyarakat.

Amirullah Hasibuan
Padang Lawas Utara, Sumatera Utara

ASPIRASI UNTUK INDONESIA DI SEGALA ASPEK

Disampaikan harapan agar DPR menghentikan polemik tentang Polisi Khusus di DPR RI, karena akan mempermalukan citra DPR RI.

Disarankan agar Indonesia dipersenjatai dengan alat yang terbaik di Asia serta penghentian pengiriman pembantu rumah tangga ke luar negeri.

H.Daryanto
Jakarta Barat

AJAKAN KERJASAMA BANTU SELAMATKAN BANGSA INDONESIA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Ketua DPR RI, saya Bambang Prakoso, BSM, pelatih utama Mind Power Alfateta Indonesia dan Anggota ATMindo (Aliansi Trainer dan Motivator Indonesia) yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, sebagai berikut:

Memohon dukungan atas gagasan dalam upaya mewujudkan Indonesian Dream (Cerdas, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak).

Bahwa untuk mengubah mentalitas bangsa, diperlukan *change mindset* berbasis *mind power*. *Mindset* adalah pendidikan tentang cara berpikir dengan memahami *neuro science*. Kita tidak dapat mengubah *mindset* masyarakat dan pejabat negara tanpa dibekali pendidikan *mindset* untuk dapat mengubah mentalitas yang ada, karena *mindset* berbeda dengan moral, akhlak, dan budi pekerti.

Diharapkan DPR RI dapat memberi kesempatan untuk mempresentasikan gagasan tersebut.

Bambang Prakoso
Bekasi, Jawa Barat

DISKRIMINATIF PENAMBANG PASIR

Saya atas nama H. Amran yang merupakan penambang pasir di Kp. Selera, Desa Tanjung Uban Utara, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan yang telah melakukan perjanjian kerjasama jual beli pasir dengan CV. Adamas Mulia berdasarkan Surat Perjanjian No. 01/KSJB/CV.AM-ZKR/XI/2014.

Namun Sdr. HA ditangkap dan ditahan oleh Polres Bintan pada tgl 8 Janu-

ari 2015 atas dugaan melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat, seperti yang telah ditetapkan kepada pasal 158 jo pasal 67 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa pada saat penangkapan Sdr. HA tersebut, banyak penambang pasir lainnya yang masih beroperasi di wilayah tersebut, namun Sdr. HA mempertanyakan alasan mengapa hanya dirinya saja yang ditangkap dan ditahan, pada-

hal ybs melakukan penambangan tersebut telah sesuai prosedur dan telah memiliki surat perjanjian kerjasama dengan CV. Adamas, selaku perusahaan penadah pasir.

Kami mohon bantuan Komisi III DPR RI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga pengadu mendapat keadilan dan kepastian hukum.

Demikian untuk menjadi periksa dan terimakasih.

H. Mursodo
Bintan, Kepulauan Riau



REVISI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Kami menyampaikan masukan kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal permohonan revisi terhadap UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, karena UU tentang Desa telah berlaku tidak adil terhadap pemerintah desa, antara lain :

- Pada bulan Ramadhan seluruh PNS menerima THR tetapi Pemerintah Desa hanya menerima RIKSUS dari Inspektorat Kabupaten Katingan
- Alokasi dana Desa Tahun 2014 sebesar Rp. 56.100.000,- telah digunakan untuk membiayai kegiatan reses Anggota DPRD Kab. Katingan, namun pada kenyataannya Pabrik Rotan di Desa Tumbang Hiran yang mengalami kerugian Rp. 500.000.000,- tidak mendapat perhatian dari DPRD Kab. Katingan.

Atas adanya ketidakadilan tersebut, maka pengadu memohon agar UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat direvisi,



FOTO: <http://lndustri.bisnis.com>

dalam rangka perbaikan dalam penerapannya.

Pengadu memohon agar Komisi III DPR RI dapat memperhatikan dan mempertimbangkan usulan tersebut sebagai masukan dalam mengambil kebijakan terkait UU tersebut.

Permasalahan terkait dengan persoalan pemerintahan desa yang menjadi bidang tugas Komisi II DPR RI, kiranya dapat diteruskan pula kepada Komisi II DPR untuk ditindaklanjuti.

*Muhamad Paulinus Jahono
Katingan, Kalteng*

PEMALSUAN DOKUMEN JUAL BELI KAPAL ASING AMBASADOR VII

Kami melaporkannya tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut kepada Polair Baharkam Polri pada tanggal 2 Mei 2013 No. LP/76/VI/2013 dan hingga kini penanganan atas kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, pihak Polair Baharkam Polri telah mengadakan gelar perkara dengan pihak-pihak terkait tanpa memberitahukan kami selaku pelapor perkara tersebut, dengan hasil keputusan melepaskan barang bukti (Kapal "Ambasador VII") berdasarkan surat rujukan ke Mabes Polri No. B/1461-b/IX/213/Ditpropam, tgl 24 September 2013.

Kemudian kami menanyakan perihal surat rujukan dari Mabes Polri tersebut

kepada Penyidik Mabes Polri, namun penyidik menyatakan tidak ada surat rujukan apapun dari Baharkam kepada Mabes Polri.

Berdasarkan surat rujukan tersebut, kemudian barang bukti dimusnahkan. Atas peristiwa pemusnahan barang bukti tersebut pengadu kembali melaporkan kepada Penyidik Polair Baharkam Polri dan menyatakan bahwa "apabila di kemudian hari ada tuntutan tentang kegiatan pemusnahan barang bukti, maka akan ada yang bertanggungjawab".

Selanjutnya kami kembali melaporkan perkara tersebut kepada Divisi Provinsi dan Pengamanan Polri (Propam) atas dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh Kombes Pol. Drs. Zainal Paliwang dalam menangani perkara dugaan pemalsuan dokumen jual beli kapal berbendera asing.

Atas laporan tersebut, pihak Propam menanggapi laporan tersebut melalui surat No. B/1515/VIII/2014/Ditpropam,

tanggal 23 Juli 2014 yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran kode etik karena belum ada kepastian mengenai siapa yang mempunyai kewenangan menangani perkara tersebut. Pihak Propam menyarankan agar pengadu membuat permohonan gelar perkara di Birowassidik Bareskrim Polri.

Selanjutnya pihak kami didampingi Pengacara, Sdr. Hendra Muchlis, SH mengajukan surat No. 085/OPS/HHP/VIII/14, tgl 13 Agustus 2014 mengenai permohonan gelar perkara, namun hingga saat ini permohonan tersebut belum mendapat tanggapan dari Birowassidik Bareskrim Polri.

Kami memohon bantuan Komisi III DPR terkait penyelesaian masalah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Ambri Simabur
Tanjung Butung, Kepulauan Riau*

PAKET DIRACIK EFEK DINANTI

Pemerintah sudah meracik berbagai paket kebijakan ekonomi dengan cita rasa khas Nawacita.



PRESIDEN Joko Widodo sudah merilisnya ke publik, tinggal kini menanti seperti apa efek dari paket kebijakan ekonomi itu.

Para ekonom, pengusaha, buruh, dan tak ketinggalan para anggota DPR menyimak serius setiap kali Presiden menyampaikan paket kebijakan ekonominya. Pro kontra selalu muncul. Ada yang menyambut antusias, ada pula yang mencibirnya. Yang paling realistis adalah menunggu seberapa manis racikan paket kebijakan itu kelak. Butuh waktu tiga sampai enam bulan untuk

membuktikan bahwa racikan paket kebijakan ini ampuh dan jitu.

Paket kebijakan ekonomi jilid I menitikberatkan pada peningkatan daya saing industri, percepatan proyek-proyek strategis, dan mendorong investasi di sektor properti. Stabilisasi fiskal dan moneter sudah dilakukan termasuk pengendalian inflasi. Harapannya mesin pertumbuhan ekonomi bergerak cepat dan harmonis. Paket kebijakan jilid II memfokuskan pada layanan kemudahan investasi dengan deregulasi dan debirokratisasi.

Paket kebijakan jilid III menasar pada penurunan harga BBM dan perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR) untuk menumbuhkan wirausahawan baru. Sementara paket kebijakan jilid IV menaikkan upah buruh setahun sekali secara terukur. Masih ada lagi paket jilid V yang memberi insentif keringanan pajak. Menguatnya Rupiah pada medio Oktober lalu sempat menjadi perbincangan, apakah itu efek dari kebijakan atau *by design*.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin menyambut baik pa-



ILUSTRASI: JONK

ket kebijakan pemerintah itu. Paket tentang KUR dan UMKM, misalnya, telah menunjukkan keberpihakan pemerintah pada usaha rakyat. Hanya saja Dodi mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sinkron dengan politik anggaran. Terbukti, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dipotong. Padahal, kementerian itu menjadi ujung tombak untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan.

“Hasil dari Banggar kemarin ada sekitar Rp 48 miliar yang masih ditunda. Padahal itu untuk membina koperasi dan UMKM. Saya kira harus dilakukan simultan. Paket deregulasi ekonomi ini menysasar masyarakat pengguna langsung,” ungkap Dodi kepada Parlemenaria di ruang kerjanya akhir Oktober lalu.

Politisi Partai Golkar ini juga menilai, paket deregulasi di bidang investasi sangat bagus. Perlu koordinasi yang harmonis antara pusat dan daerah untuk menyukseskan paket kebijakan tersebut. Koordinasi antar-kementerian juga mendesak dilakukan yang selama ini dirasa masih kurang. Bila paket ini dibarengi dengan koordinasi yang baik, niscaya kemudahan berinvestasi di In-

PAKET DEREGULASI DI BIDANG INVESTASI SANGAT BAGUS. PERLU KOORDINASI YANG HARMONIS ANTARA PUSAT DAN DAERAH UNTUK MENYUKSESKAN PAKET KEBIJAKAN TERSEBUT. KOORDINASI ANTAR- KEMENTERIAN JUGA MENDESAK DILAKUKAN YANG SELAMA INI DIRASA MASIH KURANG.

onesia bisa terwujud seperti tertuang dalam paket kebijakan jilid II.

Nurdin Tampubolon Anggota Komisi XI DPR melihat, paket kebijakan ini harus didukung oleh perencanaan dan sumber daya manusia yang memadai pula. Tanpa itu, kebijakan menjadi sia-sia dan tumpang tindih. Politikus Partai Hanura itu berharap, paket kebijakan bisa mendorong daya saing industri nasional yang kini dirasa masih lemah.

“Jika kita sudah mendorong daya saing industri nasional, itu menjadikan pertumbuhan industri semakin meningkat. Artinya, pendapatan dari industri itu bisa mencapai standar yang sesuai dengan negara industri atau minimal

negara berkembang menjadi industri. Jadi, pendapatan negara industri bisa sampai 70 sampai 80 persen produk domestik bruto,” jelas Nurdin.

Amir Uskara Anggota Komisi XI lainnya juga ikut mengomentari paket kebijakan yang sudah dirilis ini. Menurut Anggota F-PPP itu, paket ini merupakan jawaban pemerintah atas sebagian keinginan para investor yang akan masuk ke Indonesia. Ia mengingatkan, paket kebijakan ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Pasalnya, kebijakan ini masih bersifat sentralistik. Sementara di daerah, birokrasi dan regulasinya belum ikut menyesuaikan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan merespon positif paket kebijakan ini. Dengan paket ini, pemerintah sebetulnya ingin mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa. “Walaupun begitu kami memandang paket kebijakan ini belum sepenuhnya mengatasi permasalahan yang ada,” komentarnya kepada Parlemenaria.

Penilaian berbeda disampaikan Wakil Ketua DPR lainnya, Agus Hermanto. Ditegaskannya, “Paket kebijakan ini tidak bisa me-*recovery* ekonomi kita. Kalau bisa kita sampaikan bahwa paket kebijakan ekonomi ini kurang *cespleng*, karena paket ini lebih banyak mendominasi untuk strata ekonomi menengah ke atas.”

Beragam pandangan silih berganti mewarnai paket kebijakan ini. “Mazhab” politik tak dipungkiri ikut menciptakan warna warni pandangan di gedung parlemen. Kritik keras, dukungan penuh, dan penilaian moderat atas paket kebijakan ini menjadi keniscayaan di negara demokrasi. Kita tunggu saja efeknya beberapa bulan ke depan. [PARLE]

KEBIJAKAN DIBUAT, EKONOMI (DIHARAPKAN) MENGUAT

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-VI sudah dirancang dan diluncurkan selama kurun waktu bulan September hingga November 2015. Ditengah kondisi ekonomi dunia yang kurang bersahabat, yang turut berimbas pada internal Indonesia, publik berharap paket kebijakan ini menjadi “penyelamat” ekonomi Tanah Air.



PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID I, DILUNCURKAN 9 SEPTEMBER 2015

1. Meningkatkan daya saing industri
2. Mempercepat proyek-proyek strategis nasional
3. Mendorong investasi di sektor properti.



PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID II, DILUNCURKAN 29 SEPTEMBER 2015

1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam
2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat
3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi
4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat
5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito
6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan.



PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID III, DILUNCURKAN 7 OKTOBER 2015

1. Penurunan harga BBM, listrik dan gas
2. Perluasan penerima KUR
3. Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.



**PAKET KEBIJAKAN
EKONOMI JILID IV,
DILUNCURKAN
15 OKTOBER 2015**

1. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
2. Kebijakan KUR yang Lebih Murah dan Meluas
3. Mendorong Ekspor Untuk Mencegah PHK.

**PAKET KEBIJAKAN
EKONOMI JILID V,
DILUNCURKAN
22 OKTOBER 2015**

1. Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi dari 10 persen menjadi 3 persen bila diajukan revaluasinya hingga 31 Desember 2015.
2. Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi menjadi 4 persen bila diajukan revaluasinya pada periode 1 Januari 2016-30 Juni 2016.
3. Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi menjadi 6 persen bila pengajuan revaluasinya 1 Juli 2016-31 Desember 2016.

**PAKET KEBIJAKAN
EKONOMI JILID VI,
DILUNCURKAN
5 NOVEMBER 2015**

1. Pemerintah menerapkan fasilitas insentif pajak di KEK, seperti tax holiday
2. Kepastian kepada investor swasta yang sudah mengantongi izin pengelolaan sumber daya air tetap berlaku izinnya.
3. Pemangkasan izin impor obat dan bahan bakunya menjadi kurang dari 1 jam.



BELUM SEPENUHNYA ATASI PERMASALAHAN EKONOMI

Pemerintah sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I sampai Jilid VI dalam kurun waktu September hingga November 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi Tanah Air, di tengah kondisi ekonomi dunia yang kurang bersahabat.

DPR, sebagai mitra kerja dari Pemerintah pun berkepentingan menyoroti kebijakan Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla itu. Untuk membahas hal ini, **Tim Parlementaria** berkesempatan mewawancarai Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan (F-PAN), di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancara **Tim Parlementaria** dengan politikus asal dapil Jawa Tengah itu.

Pemerintah sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, mulai dari Jilid I hingga Jilid VI. Bagaimana DPR melihat efektifitas kebijakan ini?

Respon Pemerintah terhadap kelesuan ekonomi dengan menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga V patut dihargai. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Walaupun begitu kami memandang paket kebijakan ini belum sepenuhnya mengatasi permasalahan yang ada.

Untuk Paket Jilid I dan II yang lebih difokuskan pada upaya deregulasi dan debirokratisasi untuk peningkatan iklim investasi dan dunia usaha sudah cukup baik, namun dampaknya belum dapat dirasakan dalam jangka pendek ini. Kebijakan ini harus diiringi dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal percepatan investasi, terutama kemudahan proses perizinan bagi pengusaha. Kerjasama antar lembaga dan kementerian terkait dan komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan ini harus ditingkatkan.

Sementara, terkait Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III, yaitu penurunan harga BBM, gas untuk industri, serta tarif dasar listrik sudah cukup baik, dimana dapat meringankan beban masyarakat menengah kebawah dan meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri. Ditambah lagi dengan adanya perluasan KUR dengan kemudahan akses usaha UMKM dan sektor produktif kepada pembiayaan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat baik untuk memperkokoh perekonomian nasional.

Paket kebijakan ini cukup berpengaruh pada dunia usaha karena dengan penurunan tersebut maka biaya operasional juga turun, pelaku dunia usaha tetap bisa menjalankan usahanya dan meminimalisir PHK karyawan sehingga bisa memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak yang positif pada penguatan rupiah terhadap dolar Amerika.

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV, pemerintah fokus pada persoalan persoalan upah bu-

ruh, kredit usaha rakyat (KUR) hingga lembaga pembiayaan ekspor. Sementara penguatan sektor informal belum disentuh. Padahal, ada sekitar 67 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal.

Selanjutnya, untuk Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V, menitikberatkan pada keringanan pajak dalam revaluasi aset perusahaan BUMN ataupun swasta dan penghapusan pajak ganda untuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate.

Paket ini diharapkan, selain meningkatkan investasi dan membuat kapasitas dan performa finansial perusahaan meningkat, juga utamanya difokuskan untuk peningkatan lapangan pekerjaan. Sehingga, kami memandang, paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya efektif karena belum menjawab permasalahan perekonomian yang ada saat ini.

Paket Kebijakan Ekonomi IV, terdapat poin pengupahan buruh. Dikabarkan, formula pengupahan ini memberi kepastian terhadap pengusaha, namun malah mendapat protes dari buruh. Apakah kebijakan ini tidak memuaskan buruh?

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV terkait upah buruh, menyatakan upah minimum tahun 2016, di provinsi, sama dengan upah minimum tahun yang berjalan ditambah dengan hasil perkalian dari upah minimum tahun berjalan dikali penjumlahan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Misalnya upah minimum DKI Jakarta sekarang Rp 2,7 juta. Kalau inflasinya 5 persen dan pertumbuhan ekonominya 5 persen, dijumlah dapat 10 persen, sehingga Rp 2,7 juta x 10 persen, maka hasilnya Rp 270 ribu. Jadi upah minimum 2016 adalah Rp 2,7 juta ditambah Rp 270 ribu. Namun, penghitungan ini dicekualikan untuk 8 provinsi yang besaran upah minimumnya masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Protes dari buruh karena kebijakan kenaikan upah hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau menggunakan formula di atas, *base line*

upah kita ini jauh tertinggal dari negara sekitar ASEAN seperti Thailand, Filipina maupun China yang *baseline* jauh lebih tinggi. Buruh yang miskin akan semakin miskin karena kenaikan upah secara riil tidak berdampak. Selain itu, buruh juga meminta komponen KHL perlu direvisi.

Secara umum, apakah seluruh paket kebijakan ekonomi ini sudah menyentuh sektor riil dan menggairahkan dunia usaha? Apa hasil signifikannya?

Paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan sudah memberikan dampak yang positif terhadap sektor riil dan memberikan semangat pada pelaku usaha yang cukup signifikan, sektor pariwisata berupa pembebasan visa bagi sejumlah negara memberikan hasil yang menggembirakan yaitu meningkatnya kedatangan turis ke Indonesia pada Agustus menjadi 850.542 dari bulan sebelumnya 814.233.

Penyederhanaan perizinan investasi juga memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan oleh BAPPENAS, yaitu diperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal III bisa mendekati 5 persen. Di sektor pelaku dunia usaha juga cukup signifikan karena biaya operasional turun sehingga usaha bisa berjalan dan meminimalisir PHK.

Bagaimana Anda melihat respon pasar terhadap paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan Pemerintah ini?

Respon pasar terhadap paket kebijakan ekonomi cukup positif. Walaupun yang terlihat saat ini yaitu terjadi tren penguatan rupiah, namun hal itu lebih banyak disebabkan faktor lain seperti penundaan The FED menaikkan suku bunga dibandingkan akibat dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.

Dari sekian paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, ada beberapa program yang langsung dapat memperbaiki kondisi pasar keuangan yaitu khususnya terkait penurunan harga energi seperti solar, listrik dan gas. Hal tersebut memberikan manfaat langsung perekonomian nasional yang membuat pasar merespon positif karena ada op-

timisme perbaikan ekonomi.

Selain itu adanya Paket Kebijakan Jilid I sampai V yang dikeluarkan Pemerintah, lebih mempengaruhi pada ekspektasi pasar. Pelaku pasar kemungkinan akan merespon dengan melakukan analisa ekonomi, dimana pasar menghitung kemungkinan kinerja industri dalam bentuk keuangan di masa mendatang dengan mengacu kepada kebijakan masa kini. Sehingga disini, komitmen dan kredibilitas Pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini menjadi poin utama dalam meningkatkan kepercayaan pasar.

Kebijakan yg dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan yang berefek cepat terhadap kondisi ekonomi dan pasar. Apakah Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-V sudah menjawab?

Dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-V untuk saat ini sepertinya belum sepenuhnya langsung menjawab secara cepat terhadap kondisi ekonomi dan pasar. Dari Paket Kebijakan Jilid I-V, hanya Paket III dan IV khusus pada poin penurunan bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen yang nampaknya akan terasa dalam jangka pendek, karena bisa langsung dirasakan dunia usaha sebagai penggerak perekonomian. Selebihnya baru akan terasa dalam jangka menengah.

Tepat waktukah Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ini? Dan Apakah Pemerintah perlu mengeluarkan paket kebijakan berikutnya?

Di tengah kelesuan ekonomi global agar ekonomi domestik tetap bergairah memang sudah seharusnya Paket Kebijakan ini dikeluarkan. Pemerintah perlu segera mengeluarkan paket kebijakan yang bisa langsung dirasakan oleh pasar dan masyarakat sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat. Namun paket kebijakan tersebut harus benar-benar dilaksanakan dan diawasi, karena selama ini birokrasi di Indonesia terkenal cenderung memperlambat implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. (SF)

FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI KURANG CESPLENG

Pasar berharap besar kepada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga Jilid VI yang sudah dikeluarkan Pemerintah dalam kurun waktu September hingga November lalu. Paket kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia, di tengah kondisi ekonomi dunia yang kurang bersahabat.



Namun hal berbeda disampaikan Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Agus Hermanto, saat ditemui Tim Parlemenaria di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, beberapa waktu lalu. Agus menilai, paket kebijakan ini belum dapat memulihkan perekonomian Indonesia.

“Paket kebijakan ekonomi ini, rasanya tidak bisa me-*recovery* ekonomi kita. Kalau bisa kita katakan bahwa paket kebijakan ekonomi ini kurang *cespleng* (manjur, RED). Karena paket ini lebih banyak mendominasi untuk strata ekonomi menengah ke atas,” kata Agus, membuka sesi wawancara.

Namun, di satu sisi, Agus mengapresiasi Pemerintah yang sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Ia melihat, salah satu hasil dari paket ini, kini nilai tukar rupiah sudah sedikit membaik. Namun yang perlu diperhatikan, ingat Agus, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan untuk ekonomi menengah ke bawah.

“Sekarang ini, ekonomi kurang bersahabat dan mengalami penurunan. Perlu kebijakan untuk ekonomi menengah ke bawah. Sehingga Pemerintah harus mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang *cespleng* (manjur, RED), dikhususkan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” saran Agus.

Intinya, tambah politikus F-PD itu, paket kebijakan ekonomi itu harus menstimulus dan memperkuat daya beli masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ini tentunya akan menjadi determinan yang kuat. Karena, imbuh Agus, dengan adanya kemampuan daya beli masyarakat, maka konsumsi produk dan jasa dalam negeri akan meningkat juga.

“Produk dan jasa dalam negeri akan bisa tersalurkan dan terdistribusi, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri akan tetap mem-

pertahankan usahanya. Selain itu, misalnya diberikan kebijakan tentang *tax holiday*, yang memberikan keringanan kepada perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan ini tetap dapat memproduksi, sehingga ini akan dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah,” papar Agus.

Imbasnya, jika konsumsi produksi dalam negeri tetap ada, maka roda perusahaan akan tetap berjalan, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) lagi. Sebagaimana diketahui, kurang bersahabatnya ekonomi ini turut berimbas pada jumlah PHK.

“Ekonomi secara keseluruhan, tidak *growth up*, justru malah menurun. Sehingga PHK meningkat tajam. Jadi sekali lagi, paket kebijakan ekonomi ini bagus, namun tidak menjadi obat yang mujarab untuk perekonomian kita yang sedang mengalami penurunan,” imbuh Agus.

TINGKATKAN PERHATIAN EKONOMI MENENGAH KE BAWAH

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III diarahkan pada penurunan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen. Dalam paket ini, pemerintah juga memperluas penerima KUR. Agus menilai hal ini cukup memberi dampak pada ekonomi, namun masih sebatas ekonomi menengah ke atas.

“Masalah bunga KUR diturunkan ini cukup bagus, tapi itu masih fokus pada ekonomi menengah ke atas. Padahal, sebagian besar masyarakat kita berada di ekonomi menengah ke bawah. Dan sektor ini pula yang cukup menentukan kondisi ekonomi tanah air,” ujar Agus.

Ketika ditanya terkait kemudahan layanan investasi 3 jam dalam Paket Kebijakan Ekonomi II, Agus menilai ini kebijakan yang bagus. Melalui paket ini, kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. Hal ini bertujuan untuk menarik penanaman modal.

Dikabarkan, dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi.

Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan.

“Itu kebijakan yang bagus. Cuma saya tegaskan, bagus itu kan belum tentu *recovery* ekonomi kita. Sehingga dengan kemudahan investasi, investor bisa masuk, dan memproduksi produk dan jasa. Tapi bagaimana kalau tidak ada yang mengonsumsi, karena tidak ada daya beli di masyarakat,” kata Agus seolah bertanya.



“EKONOMI SECARA KESELURUHAN, TIDAK *GROWTH UP*, JUSTRU MALAH MENURUN. SEHINGGA PHK MENINGKAT TAJAM. JADI SEKALI LAGI, PAKET KEBIJAKAN EKONOMI INI BAGUS, NAMUN TIDAK MENJADI OBAT YANG MUJARAB UNTUK PEREKONOMIAN KITA YANG SEDANG MENGALAMI PENURUNAN,”

Untuk itu, saran politikus asal dapil Jawa Tengah itu, daya beli masyarakat perlu tetap ditingkatkan. Ia menyarankan, Pemerintah perlu memberikan bantuan sosial. Bahkan jika dibutuhkan, skema bantuan seperti pemerintahan sebelumnya. Yakni melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha

Rakyat (KUR), pembangunan infrastruktur pedesaan, atau insentif ke masyarakat bawah secara langsung.

“Karena masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tidak mempunyai kemampuan secara langsung, sehingga perlu diperkuat. Hal-hal yang terbaik adalah memperkuat daya beli masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah belum kearah sana. Pemerintah memperkuat UKM, mempermudah kredit UMKM, termasuk menurunkan bunga KUR, ini bagus. Tapi tidak cukup ini saja,” analisa Agus.

Menyinggung formulasi pengupahan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV, Agus memberi catatan. Formulasi pengupahan ini memang memudahkan, karena dapat ditetapkan. Namun yang paling penting, yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah adalah perlu dibuat formulasi agar upah meningkat.

“Tapi ini dilema juga. Karena nanti pengusaha keberatan. Makanya perusahaan diberi insentif, sehingga upah buruh dapat dinaikkan. Namun di satu sisi, sektor ekonomi menengah ke bawah perlu diperhatikan,” imbuhnya.

PERLU KEBIJAKAN BERIKUTNYA

Ketika ditanya apakah *launching* kebijakan ini terlambat atau tidak, Agus mengakui memang ada keterlambatan. Namun yang harus menjadi perhatian adalah ketepatan. Menurutnya, belum ada kebijakan yang menyentuh masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Tapi, tetap kita dukung berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah, apalagi untuk memperkuat masyarakat,” imbuh Agus.

Ia juga memberi catatan, agar kebijakan yang dikeluarkan, adalah kebijakan yang mudah diaplikasikan. Sehingga langsung berdampak pada pasar.

“Menurut saya, Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan berikutnya. Karena justru Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan yang mengenai sasarannya. Pemerintah harus menguatkan daya beli, ini yang belum tersentuh,” tutup Agus. (SF) FOTO: DENUS,

ANDRI/PARLE/IW

BERHARAP TEROBOSAN BARU

Harapan besar ditujukan kepada Pemerintah yang telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga Jilid VI. Publik berharap, paket kebijakan yang diluncurkan dalam kurun waktu September hingga Oktober itu memberi harapan segar di tengah kondisi melemahnya perekonomian dunia.

Harapan yang sama pun disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu. Gus Irawan berharap, paket kebijakan ini merupakan sesuatu yang baru, dan terobosan yang berbeda dibanding kebijakan-kebijakan sebelumnya. Namun, ekspektasi itu sedikit berlebihan jika dilihat dari realita.

“Saya berharap, tadinya isi paket kebijakan ekonomi itu berisi terobosan baru, bukan sesuatu kebijakan yang sudah terjadwal. Saya kira kita masih butuh waktu untuk menguji, apakah respon pasar menjadi positif. Namun kita berharap respon pasar positif,” kata Gus Irawan, saat

Wakil Ketua Komisi XI DPR
Gus Irawan Pasaribu



ditemui Tim Parlementaria, di Komisi XI DPR, baru-baru ini.

Ia mengakui, hingga kini ia belum merasakan dampak signifikan dari peluncuran paket kebijakan ini. Jikapun ada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, itu lebih diakibatkan kepada adanya penguatan global.

“Perlu diuji, apakah respon pasar menjadi positif akibat paket kebijakan ini. Nilai tukar rupiah sempat menguat, namun itu karena penguatan global.

Kami sempat pertanyakan kepada Bank Indonesia, hal ini selain karena ada intervensi ada BI, namun juga karena ada penguatan global,” analisa Gus Irawan.

Menyoroti salah satu Paket Kebijakan Ekonomi, yakni Jilid III yang diarahkan pada penurunan harga BBM, tarif dasar listrik, dan gas, Gus Irawan menilai memang hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Pasalnya, penyesuaian harga BBM memang dikarenakan harga minyak dunia sedang turun.

“Dulu, ketika awal

pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, terlalu terburu-buru menaikkan harga BBM, sehingga di satu sisi itu memicu inflasi yang luar biasa. Dan di sisi lain, ini menekan daya beli masyarakat. Sialnya, penurunan harga BBM itu tidak bisa menurunkan harga-harga di pasar. Bahkan juga tidak meningkatkan daya beli masyarakat,” analisa Gus Irawan.

Politikus F-Gerindra itu menilai, ketika harga BBM naik, maka harga-harga komoditas akan naik. Namun, pada saat harga BBM turun, belum tentu harga komoditas atau kebutuhan pokok ikut turun, karena masih berkaitan dengan biaya produksi, distribusi, dan lain sebagainya.

MASIH BUTUH WAKTU

Terkait penyederhanaan izin perantaraan untuk kegiatan penanaman modal, Gus Irawan menilai, memudahkan perizinan investasi ini hanya untuk jangka panjang. Walaupun ini dirasa penting, namun kebijakan yang diambil Pemerintah ini belum dapat menjawab persoalan pokok bangsa ini.

“Sementara yang mendesak, jumlah masyarakat miskin kita semakin banyak. Itu masalah utamanya, dan dampak dari kebijakan Pemerintah yang berpotensi melanggar Undang-undang, bahkan Undang-undang Dasar. Misalnya, harga BBM itu kita lepas ke pasar, itu kan melanggar UUD,” analisa Gus Irawan.

Politikus asal dapil Sumatera Utara ini memastikan, seluruh paket kebijakan ini rasanya belum menjawab persoalan pokok bangsa. Apalagi, setiap kebijakan datang silih berganti, padahal satu kebijakan yang sudah diluncurkan belum terlihat hasilnya. Bahkan, kebijakan ini diluncurkan dalam waktu yang dikatakan sangat terlambat.

“Kita masih butuh waktu untuk membuktikan hasil dari implementasi paket kebijakan ini. Apalagi, satu paket kebijakan belum jalan, kemudian sudah ada paket kebijakan berikutnya,” kata Gus Irawan menutup sesi wawancara, seraya mengerutkan dahinya, heran. (SF) FOTO:

JAKA/PARLE/IW

JANGAN TAMBAH PAKET KEBIJAKAN EKONOMI LAGI

Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah diluncurkan Pemerintah, tanpa didukung perencanaan maupun pemahaman yang benar, dan didukung sumber daya manusia yang baik, maka akan sia-sia. Sehingga, paket kebijakan dirasa tak perlu ditambah lagi, karena dikhawatirkan malah kebijakan menjadi tumpang tindih.

“Paket kebijakan itu sudah cukup. Kalau terlalu banyak juga, nantinya itu-itu saja kebijakannya. Perencanaan dan *mindset* yang benar, perbaikan dari sumber daya dan tata kelola. Merubah dari mentalitas dan *mindset* itu yang paling dibutuhkan, dan fokus pada pelaksanaannya,” kata Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon, ketika ditemui Parlemtaria, baru-baru ini.

Nurdin menilai, paket kebijakan ini sudah cukup berdampak, namun masih sedikit. Misalnya di nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun yang lebih penting, Nurdin mengingatkan agar kebijakan ini dapat mendorong daya saing industri nasional.

“Jika kita sudah mendorong daya saing nasional, itu menjadikan pertumbuhan industri semakin meningkat. Artinya, pendapatan dari industri itu bisa mencapai standar yang sesuai dengan negara industri atau minimal negara berkembang menjadi industri. Jadi, pendapatan negara industri bisa sampai 70 sampai 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB),” analisa Nurdin.

Berikutnya, imbuh Nurdin, kebijakan juga diharapkan dapat mempercepat daripada pelaksanaan industri strategis, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, infrastruktur, dan lain-lain. Sehingga, dapat mengurangi impor terhadap pangan, energi, dan infrastruktur. Termasuk meningkatkan investasi di bidang properti, dan dapat membangun sentra ekonomi baru.

“Kalau para menteri bisa menerjemahkan dan mengimplementasikan

Paket Kebijakan Ekonomi itu, saya sangat yakin, perekonomian kita berjalan dengan baik. Namun juga perlu diimbangi dengan penegakan hukum, terhadap pelaksana-pelaksana *project*. Perlu dipikirkan juga strategi untuk melaksanakan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, agar tidak terjadi korupsi,” papar Nurdin.

Politikus F-Hanura itu juga mengkritisi suku bunga perbankan Indonesia yang berada di angka 12-15 persen. Sementara di negara tetangga, misalnya Malaysia, hanya 3-4 persen. Hal ini menyulitkan industri Indonesia berdaya saing dengan industri negara tetangga. Sehingga, *mindset* perlu diubah oleh Pemerintah sendiri. Dan *stakeholder* juga perlu menyesuaikan dengan kebijakan itu, dengan menyiapkan sumber daya.

“Selama itu dikombinasikan, dan diramu menjadi satu untuk mendukung paket kebijakan, akan pengaruh daripada perbaikan ekonomi, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat meningkat, termasuk juga pajak untuk membiayai APBN kita. Pendapatan negara juga semakin besar,” yakin Nurdin.

Nurdin menambahkan, akibat dari tingginya suku bunga perbankan itu, menyebabkan produksi dalam negeri akan kalah murah dibanding dari negara lain. Akhirnya Indonesia kebanjiran barang impor, karena mahalnya produk lokal.

HARUS DIHITUNG PROPORSIONAL

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III, diarahkan pada penurunan harga Bahan



Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon

Bakar Minyak, gas, dan tarif dasar listrik. Nurdin mengingatkan, jangan sampai menurunkan harga BBM terlalu jauh, karena akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan negara.

“Sehingga kalau pendapatan negara turun, darimana kita akan mendapatkan APBN kita. Ini juga harus dihitung. Jadi proporsional antara penurunan harga BBM, dengan kumulatif dari pendapatan negara perlu dijaga. Supaya pendapatan negara tidak menurun, yang dikhawatirkan tidak bisa membiayai APBN kita,” ingat Nurdin.

Politikus asal dapil Sumatera Utara ini juga menyoroti mengenai formulasi pengupahan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV, yang digadang-gadang untuk peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia mengakui, formulasi ini memberikan kepastian kepada pengusaha terhadap besaran pengeluaran perusahaan, terkait gaji pekerjanya.

“Masalah pengupahan itu ada benarnya. Tapi pengupahan yang profesional adalah yang seimbang dengan produktifitas pekerja profesional itu. Jangan sampai gajinya profesional, tapi hasilnya amatiran. Selama Pemerintah hanya menaikkan gaji, tanpa memperbaiki permasalahan hulu yang mengakibatkan ini tidak bagus profesional dan daya saingnya, maka dunia usaha juga akan kolaps,” pesan Nurdin sambil tetap mengingatkan untuk meningkatkan daya saing industri. (SF) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW



Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara

Rumitnya regulasi maupun birokrasi menjadi faktor investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Persoalan waktu dan biaya terkait perizinan investasi perlu menjadi perhatian Pemerintah, sehingga pengusaha segera mendapat kepastian. Jika hal ini terus berkelanjutan, hal ini pula yang menghambat investasi di Tanah Air.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara, ketika diwawancarai oleh reporter Sofyan dan juru foto Andri dari Parlementaria, di ruang kerjanya, baru-baru ini. Ia menilai, Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah harus dapat memangkas permasalahan perizinan investasi.

“Memang dibutuhkan kepastian soal regulasi untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Investor atau pengusaha kita, selama ini keluhannya terkait dengan kepastian waktu dan biaya yang tidak pernah ada angka pasti. Para investor membutuh-

KEBIJAKAN HARUS IMPLEMENTATIF

kan kepastian,” tegas Amir.

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga Jilid VI, Pemerintah berusaha melakukan deregulasi dan debirokratisasi, agar investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Di paket Jilid II, Pemerintah menjanjikan kemudahan layanan investasi tiga jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi.

Kebijakan itu pun dilanjutkan dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III yang salah satunya berisi poin penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Dalam paket ini, pemohon dapat mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan, yang dari semula tujuh hari menjadi tiga jam.

“Saya melihat, apa yang dilakukan pemerintah dengan paket jilid II dan III sudah menjawab sebagian keinginan para investor yang akan masuk ke Indonesia,” apresiasi Amir.

Namun, Amir tetap mengingatkan. Paket kebijakan ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Pasalnya, kebijakan ini masih bersifat sentral, atau sebatas hanya di tataran pusat saja. Sementara untuk di daerah, birokrasi maupun regulasi masih seperti yang dulu-dulu.

“Prinsipnya, jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Karena mereka (daerah, RED) mau ambil untung di depan. Orang-orang birokrat biasanya seperti itu. Petugas-petugas itu arahnya bisa mendapatkan pendapatan dari perizinan dari yang mereka berikan,” analisa politikus F-PPP itu.

KUR JANGAN DIPERSULIT

Menyikapi perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penurunan bunga KUR di Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III, Amir menilai memang saat ini masih ada pembatasan pemberian KUR pada jenis

usaha. Sehingga, menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan dana segar untuk permodalan.

“Masyarakat kita yang modalnya Rp 25 juta ke bawah, seharusnya tidak perlu dibatasi apa jenis usahanya. Itu mematikan kreatifitas masyarakat dalam dunia usaha. Akan menjadi bagus jika Pemerintah membuka ruang untuk jenis usaha yang bisa dibiayai KUR. Dengan semakin dibuka lebar jenis usahanya, saya kira itu semakin memacu pertumbuhan ekonomi di daerah,” harap Amir.

Jika KUR sudah dikururkan, diharapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, akan menggeliat. Sehingga pelaku UKMK akan terpacu membuat kreasi usaha baru yang dapat dibantu oleh Pemerintah. Kemudian, UMKM juga didorong untuk melakukan ekspor, dengan dibantu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Terkait dengan ekspor, kita dorong melalui LPEI. Bahkan tahun ini, LPEI juga kita berikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Pikiran kita, LPEI bantu ekspor, bukan cuma eksportir besar, tapi juga pemula, supaya dapat menggenjot ekspor. Sehingga, ekspor kita kembali menggeliat,” imbuh Amir.

Politikus asal dapil Sulawesi Selatan itu menilai, paket ini sudah cukup berpengaruh terhadap kondisi pasar, misalnya dilihat dari aspek pergerakan nilai kurs dan indeks saham. Walaupun ada pengaruh faktor global, namun tak dipungkiri itu ada pengaruh internal dari paket kebijakan itu.

“Saya kira, sekarang tinggal *break-down* dari masing-masing kebijakan ini. Kebijakan lain yang masih menjadi keluhan investor juga perlu kita perhatikan. Termasuk koordinasi antara pusat dengan daerah,” kata Amir, seraya mengingatkan untuk selalu membuat kebijakan yang mempermudah investasi. (SF)

FOTO: ANDRI/PARLE/IW

PEMERINTAH PERLU KELUARKAN KEBIJAKAN YANG KONSTRUKTIF

Tidak semua Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga Jilid VI mendapat respon positif dari pasar. Bahkan, akibat dari peluncuran paket yang bertubi-tubi dari Pemerintah, pasar menjadi kurang tertarik. Sehingga, Pemerintah perlu mengeluarkan paket kebijakan yang konstruktif.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar, ketika diwawancarai reporter Sofyan dan juru foto Andri, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, baru-baru ini.

“Publik sudah tidak terlalu *interest* terhadap paket yang dikeluarkan Pemerintah. Pemerintah perlu mengeluarkan *grand design* yang konstruktif, sehingga problem ekonomi kita secara khusus, dalam jangka pendek hingga menengah, bisa teratasi,” nilai Willgo.

Politikus F-Gerindra itu menganalisa, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I dan II yang sudah dikeluarkan Pemerintah, direspon kurang baik oleh pasar. Kemudian paket Jilid III, direspon cukup baik karena cukup menyentuh sektor riil. Sementara paket Jilid IV, tentang pengupahan, mendapat respon kurang positif.

Ia menilai, jika kebijakan dikeluarkan dalam bentuk paket, dan sampai berkali-kali, sehingga terkesan parsial, tidak terintegrasi, dan tidak konstruktif. Sehingga, solusi dari permasalahan ekonomi bangsa ini belum terjawab. Bahkan, menyentuh permasalahan pun tidak.

“Ke depan, sebaiknya paket-paket ini tidak turun dalam bentuk paket. Pasar sudah tidak terlalu *interest*. Sehingga, perlu kebijakan yang lebih komprehensif, karena belum menjawab permasalahan. Juga perlu keterpaduan di Pemerintah, Kementerian dan Lembaga, sehingga perlu kebijakan yang komprehensif,” saran Willgo.

Bahkan, Willgo menilai, kebijakan ini hanya sebatas di tataran tingkat pusat, namun belum mampu diimplementasikan di tingkat daerah. Bahkan, di Kementerian dan Lembaga pun belum tentu bisa menerjemahkan paket-paket itu.

“Kendalanya, paketnya bagus, tapi ti-

dak implementatif. Sehingga tidak bisa diaplikasikan. Apa gunanya kalau seperti itu,” heran Willgo.

JANGAN HANYA RESPON

Politikus asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu menilai, peluncuran kebijakan ini sebagai bentuk dari reaksi dari kondisi perekonomian saat ini. Namun ia mengingatkan, Pemerintah sebaiknya bukan hanya sekedar merespon, tapi kebijakan juga harus berdampak signifikan, konstruktif dan komprehensif.

“Karena diantara K/L malah tarik menarik, sehingga di lapangan yang akan mengeksekusi kebijakan jadi kebingungan. Yang niatnya menyederhanakan, malah timbul hal yang pada posisi itu banyak pihak tidak berani mengambil keputusan lebih jauh, karena khawatir berdampak kesalahan,” analisa Willgo.

Ketika ditanya apakah paket kebijakan ini sudah terlihat hasilnya, Willgo menilai masih belum menunjukkan sesuatu yang signifikan, walaupun tak dipungkiri, ada progress baik juga. Namun hal ini bukan semata efek adanya paket kebijakan, namun juga karena adanya faktor global.

“Tidak semata karena adanya paket. Tapi kita apresiasi paket itu ada, untuk mempermudah investasi asing. Investor melihat Indonesia lebih menarik, The Fed menunda kenaikan suku bunga, maka uang kembali masuk ke Indonesia dan dolar AS menjadi

banyak. Sehingga kurs rupiah terhadap dolar AS juga turun,” analisa Willgo.

Ia juga merasa aneh, jika Pemerintah tetap memaksakan mengeluarkan paket kebijakan terus menerus sampai banyak. Lebih baik, Pemerintah mengeluarkan *grand design*, sehingga paket paket itu sendiri tahapannya menjadi komprehensif, dan tidak parsial.

“Saya tidak melihat adanya urgensi untuk mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang banyak. Cenderung nanti malah kebingungan. Baru muncul paket 1, belum terlaksana, namun sudah muncul lagi paket 2, kemudian paket 3, sehingga tumpang tindih. Ujung-ujungnya, paket tidak bisa dieksekusi, dan tidak memberi manfaat kepada masyarakat,” tutup Willgo. (SF) FOTO: ANDRI/PARLE/IW



Anggota
Komisi XI DPR
Willgo Zainar

PAKET INI BARU BERDAMPAK SETELAH ENAM BULAN

Pemerintah telah memberikan kemudahan akses kredit usaha rakyat (KUR) bagi para pelaku UMKM. Tapi pemerintah tidak mendukungnya melalui politik anggaran. Terbukti anggaran Kemenkop dan UKM relatif kecil dan malah ditunda realisasinya. Padahal, kementerian ini sangat vital perannya sebagai Pembina UMKM di Tanah Air.

Di tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dodi Reza Alex Noerdin mengemukakan pandangan kritisnya dalam wawancara eksklusif di ruang kerjanya. Menurutnya, paket kebijakan ekonomi dari jilid I hingga terakhir, baru terasa dampaknya setelah tiga hingga enam bulan ke depan.

Kepada Parlemen, Anggota F-PG DPR ini mengatakan, bila rupiah sempat menguat itu bukan dampak dari paket kebijakan, tapi intervensi BI dan keadaan ekonomi makro nasional. Berikut wawancara lengkapnya.

Pada paket kebijakan jilid IV, pemerintah berusaha memberi kemudahan akses KUR, bahkan menurunkan bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen. Komentar Anda atas kebijakan ini?

Saya kira bagus. Artinya keberpihakan pemerintah terhadap kelangsungan UMKM bisa terlihat di paket kebijakan IV ini. Paket deregulasi itu, saya kira sudah menyentuh masyarakat dibanding paket jilid I dan II yang masih terlalu makro cakupannya. Tapi kita ingin kebijakan dari pemerintah terhadap Kementerian Koperasi dan UMKM harus lebih ditingkatkan. Fungsi dari kementerian ini sangat banyak, salah satunya pemberdayaan UMKM yang

jumlahnya 60 juta lebih.

Nah, bagaimana kalau kebijakan anggaran kita tidak mendukung ke arah tersebut. Terbukti anggaran Kementerian Koperasi dan UKM relatif kecil. Hasil dari Banggar kemarin ada sekitar Rp 48 miliar yang masih ditunda. Padahal itu untuk membina koperasi dan UMKM. Saya kira harus dilakukan simultan. Paket deregulasi ekonomi ini menyasar masyarakat pengguna langsung.

Contohnya individu bisa mengajukan KUR, seperti para TKI dan karyawan. Tapi dari sisi anggaran harus paralel dengan paket kebijakan ini. Saya melihat paket kebijakan ini harus simultan, tidak boleh ada pertentangan antara paket I, II, III, dan seterusnya. Efeknya jangan sampai negatif.

Pemerintah juga memberi kemudahan modal kerja bagi UKM padat karya dan punya kegiatan ekspor. Sudah tepatkah kebijakan ini?

Yang harus fokus diberikan perhatian adalah relaksasi dari aturan KUR dan penjaminan KUR. Artinya, pihak yang menjamin ada dan kreditnya disalurkan ke pengguna tanpa hambatan. Banyak sekali masukan kepada kami, UMKM-UMKM di daerah merasakan kesulitan mengakses KUR. Target pengguna KUR yang Rp 30 triliun untuk UMKM harus

di-support dengan kemudahan akses termasuk penjaminannya.

Kita tidak ingin kredit ini sudah berjalan lalu terjadi sesuatu, tanpa ada jaminan kredit. Maka Askrindo dan Jamkrindo harus diberdayakan. Jadi, pemerintah harus 'menyerang' dari segala lini, baik kebijakan anggaran, akses KUR, dan penjaminannya. Kalau ini sudah berjalan, UMKM bisa terus tumbuh.

Bunga KUR diturunkan hingga 12 persen. Perluakah menurunkan lagi hingga empat persen?

Saya melihat ini memang akan turun, tapi secara gradual. Saya yakin pemerintah juga mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi makro kita. Apalagi suku bunga BI rate kita tertahan terus, enggak pernah turun. Tentu keberpihakan pada para pelaku UMKM harus lebih ditingkatkan dengan memberi bunga yang lebih rendah lagi. Subsidi bunga itu harus di-exercise dan dieksplor oleh pemerintah.

Goalnya nanti jelas, bunga KUR harus turun sampai tingkat yang dirasakan mampu oleh para penerima KUR, tanpa harus mengorbankan keadaan ekonomi makro kita. Sebentar lagi akan terbit UU Penjaminan. Saya kira itu akan menjadi salah satu faktor yang memperkuat iklim UMKM kita.

Pada paket jilid II, pemerintah mempermudah izin investasi dari yang sebelumnya berhari-hari menjadi tiga jam saja. Realistiskah bisa dilakukan?

Presiden sudah mengumpulkan gubernur, wali kota, dan bupati. Ini kaitannya dengan koordinasi paket kebijakan, bagaimana memangkas birokrasi perizinan. Saya melihat ini bisa terealisasi di pusat. Tapi di daerah banyak peraturan yang bertentangan, karena birokrasinya lebih panjang. Nah, ini harus disinkronkan. Bila pusat sudah memangkas perizinan, tapi daerah tidak melakukan yang sama, itu sama saja kita tidak melakukan upaya yang optimal.

Banyak sekali izin investasi di daerah yang sangat panjang prosesnya. Misalnya izin pembangkit listrik bisa 480 hari. Nah, dipangkas oleh presiden menjadi 250 hari. Itu pun masih dirasa terlalu

lama. Dan satu lagi, banyak peraturan di level kementerian yang juga masih menghambat. Pusat dan daerah harusnya bisa lebih berkoordinasi, sehingga perizinan tidak saling tumpang tindih dan panjang.

Di paket jilid II, izin investasi yang dimudahkan oleh pemerintah adalah investasi di atas Rp 100 miliar dan menyerap 1000 tenaga kerja. Apakah program ini sudah tepat?

Kalau punya program untuk menderegulasi izin investasi dengan target

INTINYA BUKAN SUDAH TERASA ATAU BELUM. KEBIJAKAN INI DIRANCANG UNTUK JANGKA MENENGAH DAN PANJANG. PAKET DEREGULASI INI BILA DILAKUKAN DENGAN BAIK, AKAN MENDAPATKAN HASIL YANG BAIK. SAYA PERCAYA ITU, ASAL IMPLEMENTASINYA DI LAPANGAN BENAR-BENAR DIPERHATIKAN.

yang terukur, saya kira bagus-bagus saja. Pertanyaannya apakah bisa terealisasi, di sinilah butuh kebijakan yang integral dan saling menunjang, baik pusat maupun daerah.

Ini jadi PR dari pemerintah sekarang yang harus meningkatkan koordinasi antarkementerian dan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah. Kalau itu terjadi, maka perizinan jadi lebih sederhana dan paket kebijakan jilid II bisa terwujud.

Sejauh yang Anda pantau, semua paket kebijakan ekonomi ini sudah berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan geliat ekonomi kerakyatan?

Saya belum melihat itu, karena ini baru diluncurkan. Contohnya paket jilid III untuk memangkas bahan bakar dan gas untuk industri, itu baru terasa tiga-enam bulan kemudian. Begitu juga untuk UMKM jilid IV, baru terasa gulirannya apabila pelakunya sudah mendapatkan KUR dan pembinaan. Itu baru bisa dirasakan setelah enam bulan sampai satu tahun.

Intinya bukan sudah

terasa atau belum. Kebijakan ini dirancang untuk jangka menengah dan panjang. Paket deregulasi ini bila dilakukan dengan baik, akan mendapatkan hasil yang baik. Saya percaya itu, asal implementasinya di lapangan benar-benar diperhatikan. Misalnya, deregulasi izin birokrasi harus benar-benar dilakukan, jangan hanya jadi target saja. Begitu juga KUR, bunganya harus diturunkan secara gradual. Kemudian akses bagi UMKM harus diperhatikan. Dan anggaran untuk kementerian harus mendukung sebagai pembina UMKM.

Kalau kurs rupiah sempat menguat dan IHSG sudah *rebound*, itu karena situasi ekonomi makro dan intervensi moneter oleh BI yang memberi dampak. Ini bukan dari efek langsung kebijakan deregulasi. Contoh kebijakan IV soal upah buruh, baru berdampak pada perusahaan tahun depan saat diberlakukan. Jadi nanti tidak ada lagi tarik menarik UMP antara pengusaha, pemerintah, dan buruh. Formula ini sudah baik untuk kepastian berusaha.

Di atas semua itu, iklim usaha kita melalui paket III, IV, dan V saya kira lebih baik sentimennya daripada paket I dan II. Paket I dan II ini berada di tataran normatif. Jadi tidak menyentuh secara konkrit. (MH) FOTO: NAEFUROJI/

PARLE/IW

Wakil Ketua Komisi VI
Dodi Reza Alex Noerdin



TAK SEIRAMA DENGAN POLITIK ANGGARAN

Pemerintah semangat mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, tapi tak mau mendukungnya dengan politik anggaran. Ada ketidakselarasan dari dua kebijakan ini. Ingin mengundang banyak investor asing ke dalam, tapi anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal dipangkas. Ingin menumbuhkan UMKM, tapi anggaran Kemendag dan UKM dipotong.

Membincang paket kebijakan dengan politik anggaran tampak tak selaras. Di satu sisi sangat menggebu mengeluarkan paket kebijakan, tapi di sisi lain tak mau mendukungnya dengan fasilitas anggaran yang cukup. Inilah yang terjadi di balik rentetan paket kebijakan yang dirilis pemerintah. Anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya mengkritik hal ini ketika berbincang secara eksklusif di ruang kerjanya, akhir Oktober lalu.

Pada paket kebijakan jilid II, pemerintah memberi akses kemudahan dengan mempercepat proses izin investasi di Indonesia dari yang sebelumnya sehari-hari, kini diupayakan hanya tiga jam saja. Kebijakan ini memang disambut baik. Namun, Komisi VI DPR justru mempertanyakan

mengapa kebijakan yang baik itu tidak didukung dengan anggaran yang memadai. BKPM sebagai mitra Komisi VI mendapat pemoto-

ngan anggaran hingga setidaknya Rp 120 miliar.

“Saya sempat pertanyakan saat membahas anggaran, kenapa anggaran BKPM justru turun. BKPM ini, kan, ujung tombak untuk menarik investor dari luar ke dalam. Jadi, jangan sampai anggarannya ditahan atau dikurangi. Justru harus ditambah untuk mendorong percepatan dan akselerasi investasi di Indonesia,” papar Wahyu.

Untuk menggaet investor, lanjut Wahyu, BKPM harus dibenahi. Dan salah satu pembenahannya adalah menaikkan anggaran. Menurut Wahyu, upaya pengurusan izin investasi hanya tiga jam itu wajar. Tapi, seberapa banyak kelak investor bisa berdatangan ke Tanah Air, masih menunggu waktu.

Dalam urusan investasi, pemerintah mempermudah investasi yang memiliki nilai di atas Rp 100 miliar dan menyerap 1.000 tenaga kerja. Politisi Partai Demokrat itu berpendapat, untuk investor antarnegara, nilai Rp 100 miliar sangat kecil. Tapi persoalannya, serapan tenaga kerja hingga 1000 orang itu yang jadi masalah. Tidak semua investasi di atas Rp 100 miliar bisa menyerap tenaga kerja sebanyak itu.

Investasi di sektor usaha berteknologi tinggi, mungkin tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja. Ini perlu dipikirkan kembali oleh pemerintah. Tak salah bila pemerintah menginginkan pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dari investasi asing. Wahyu berharap, pemerintah menurunkan sedikit serapan tenaga kerjanya khusus yang memanfaatkan teknologi tinggi dengan tidak kehilangan akses kemudahan dalam mengurus izin investasi.

“Target 1000 tenaga kerja itu terlalu optimistik

menurut saya. Kita boleh berharap ada 1000 tenaga kerja yang terserap. Tapi, kalau bisa syarat serapan tenaga kerjanya dikurangi. Industri berteknologi tinggi tak banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan industri tekstil. Kita lihat saja progresnya dalam tiga bulan ke depan, sejauh mana efektivitasnya,” ujar politisi dari dapil Sumsel II ini.

KUR DAN UKM

Pada paket kebijakan jilid IV, pemerintah berusaha memberi kemudahan akses kredit usaha rakyat (KUR) sekaligus perluasan penerimaannya. KUR diberikan kepada karyawan atau TKI yang berpenghasilan tetap. Bahkan, TKI purna juga diberikan akses KUR. Dalam paket itu, bunga KUR juga diturunkan dari 22 persen menjadi 12 persen. Menurut Wahyu, pengusaha kecil harus diberi pemahaman bagaimana mengurus KUR, karena faktanya tidak mudah.

Sebagai pengusaha yang sering berurusan dengan bank, Wahyu mengaku tak mudah mendapatkan pinjaman. Untuk mengurus KUR tentu butuh dokumen pendukung seperti KTP, KK, rekening koran, *track record*, neraca, hingga membuat proposal. “Ini sering kali tidak dimiliki oleh para pelaku usaha kecil dan mikro. Harus ada desain yang tepat bagaimana mengakomodir para pengusaha kecil agar betul-betul mendapatkan kemudahan KUR,” jelas Wahyu.

Sementara soal bunga KUR yang diturunkan hingga 12 persen per tahun, Wahyu menyatakan, sudah wajar penurunan bunga tersebut. Tinggal menunggu seberapa efektif penurunan bunga KUR bagi pertumbuhan UMKM. Bagi Wahyu, bila namanya sudah KUR, idealnya bisa diberikan kepada siapa saja. Perluasan penerima bisa menjangkau para purnawirawan, bahkan kepada siapa pun yang mau berusaha.

“Kalau namanya kredit usaha rakyat, ya untuk seluruh rakyat Indonesia. tidak peduli jenis kelamin, pekerjaan, dan profesi. Yang berhak mendapatkan KUR adalah yang mau berusaha dan masuk dalam skala ekonomi kecil mikro. Itulah namanya KUR,” kilah Wahyu lebih lanjut.

(MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW



Anggota Komisi VI DPR
Wahyu Sanjaya

BUNGA KUR BISA SEMBILAN PERSEN

Pengusaha kecil menengah berharap bunga kredit usaha rakyat (KUR) bisa diturunkan hingga sembilan persen dari 12 persen yang ditetapkan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. Penurunan bunga KUR bisa menggairahkan para pelaku UKM di daerah.

Sebagai Anggota DPR yang peduli terhadap para pelaku UKM, Melani Leimena Suharli menyambut baik paket kebijakan tersebut. Kepada Parlemen-taria, Melani menuturkan pandangannya menyangkut kebijakan bunga KUR dan pemberdayaan UKM. Tahun depan, katanya, bunga KUR bisa diusahakan turun lagi hingga satu digit ke level 9-6 persen.

“Para pengusaha kecil tentu berharap bisa enam persen. Tapi, kalau sembilan persen sudah bisa direalisasikan tahun depan. Selama ini pelaku UKM masih takut pada bunga bank yang tinggi, sehingga mereka tak mau mengambil fasilitas pinjaman bank. Apalagi dengan situasi ekonomi yang sedang melemah seperti saat ini, pelaku UKM khawatir tidak mampu mengembalikan kredit. Kecuali bunganya rendah, maka itu akan sangat membantu,” papar Melani.

Anggota Komisi VI DPR ini mengimbau agar setiap paket kebijakan yang dikeluarkan segera dievaluasi. Harapannya, dengan evaluasi itu kebijakan pemerintah jadi kian menyentuh masyarakat kecil, sehingga lebih nyaman dalam menjalankan ekonominya. “Silakan pemerintah mengeluarkan banyak paket kebijakan. Sampai nanti dirasa cukup semua kebijakan itu, karena telah menyentuh semua segi kehidupan,” tutur Melani.

Pemerintah sendiri dalam paket kebijakan jilid IV menurunkan bunga KUR dari yang sebelumnya 22 persen menjadi 12 persen. Kebijakan penurunan bunga ini diharapkan terus diturunkan seperti yang diharapkan Melani dalam

sesi wawancara khusus dengan Parlemen-taria akhir Oktober lalu.

KEBIJAKAN INVESTASI

Paket kebijakan pemerintah yang ingin memberi izin kemudahan berinvestasi di Tanah Air, harus memikirkan faktor keamanan, Inilah yang selalu jadi salah satu

pertanyaan para investor asing. Pembenahan sektor keamanan sudah jadi kebutuhan dalam mengembangkan usaha.

“Kalau situasi keamanan tidak memungkinkan, mereka juga takut untuk berinvestasi. Karena itu yang pertama adalah faktor keamanan. Kedua, harus memastikan tidak ada demo buruh yang berlebihan, karena para investor memakai tenaga kerja Indonesia. Bila setiap saat ada demo buruh, itu akan menyulitkan mereka. Bagaimana mau menjalankan usaha kalau setiap saat ada demo buruh,” ungkap mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Melani mengaku menghargai paket kebijakan ini. Sebagai negara tujuan investasi, Indonesia sangat kaya. Banyak potensi investasi yang bisa digali di Tanah Air. Di bidang sumber daya alam, Indonesia seperti tidak ada habisnya. Sumber daya alam bisa menjadi sumber pendapatan. Tinggal pemerintah menata investasinya sambil membenahi keamanan dan upah buruh agar tak selalu bergejolak.

Kebetulan, pemerintah juga sudah menetapkan kebijakan soal kenaikan upah buruh setiap tahun secara terukur. Dengan kondisi yang kondusif, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, iklim investasi juga kian



Anggota Komisi VI DPR Melani Leimena Suharli

membaik. Stabilitas keamanan pasti akan menggairahkan sektor riil.

Soal efektivitas kebijakan ini, memang belum terlihat. Perlu waktu beberapa bulan ke depan untuk melihat efek kebijakan, sambil juga menunggu perbaikan ekonomi global. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, pihaknya setuju dengan Menko Maritim Rizal Ramli agar para investor mengalihkan perhatiannya ke sektor pariwisata. Pariwisata Indonesia, sambung Melani, sangat bagus. Di sektor ini tak ada bahan baku yang dibutuhkan untuk membangun usahanya.

“Saya kira sektor pariwisata harus benar-benar digerakkan, karena tanpa modal untuk membeli bahan baku. Cukup mengundang para wisatawan untuk datang. Untuk itu, pariwisata juga harus mendapat perhatian untuk dibenahi. Infrstruktur menjadi bagian penting dalam membenahi pariwisata.”

Dengan berinvestasi di sektor pariwisata, geliat ekonomi kerakyatan juga akan tumbuh. Produk-produk kerajinan dari UKM setempat akan bergairah. Melani melihat, di mana pun ada pariwisata yang berkembang, di situ UKM pasti ikut bergeliat mengikuti irama daya tarik pariwisata yang ditawarkan.

(MH, SF) FOTO: ANDRI/PARLE/IW



Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz

PERSPEKTIF BURUH HARUS DIKEDEPANKAN

Pada paket kebijakan ekonomi jilid IV, pemerintah dengan antusias ingin menaikkan upah buruh setiap tahun secara terukur. Kenaikan itu diukur dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Perspektif dunia usaha masih jadi sandaran kenaikan upah. Padahal, perspektif buruh lebih penting untuk dijadikan sandaran kebijakan.

Mudah terbaca arah kebijakan ini, yaitu agar buruh tak selalu berdemonstrasi menuntut kenaikan upah setiap tahun. Pemerintah mencoba meredamnya dengan kenaikan upah yang selalu jadi tuntutan itu. Pertanyaannya, bila pertumbuhan ekonomi tak bersahabat dan inflasi terus meningkat, apakah buruh tetap mendapat kenaikan upah seperti yang dijanjikan dalam paket kebijakan tersebut?

Inilah pertanyaan kritis yang dilonarkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz beberapa waktu lalu kepada Parlemen. “Saya kira pemerintah jangan membuat aturan yang tidak memperhatikan perlindungan terhadap buruh. Jangan perspektifnya dunia usaha, tapi perspektifnya buruh bagaimana mensejahterakan mereka.”

Persoalan upah, kata Irgan, belum selesai hingga kini. Yang dikhawatirkan dengan paket kebijakan ini, kerja Dewan Pengupahan jadi terganggu. Karena sudah ada kebijakan ini, Dewan Pengupahan terpaksa harus mengikuti. Tak bisa lagi merumuskan kebijakannya sendiri. Inilah yang dikhawatirkan dari kebijakan yang telah dirumuskan Presiden Joko Widodo. Mungkin Dewan Pengupahan sudah menyusun strategi kebijakannya sendiri sebelum paket tersebut dirilis.

Menurut politisi PPP ini, kebijakan pengupahan harus didasarkan pada ke-

butuhan hidup layak (KHL), bukan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. “Kalau pertumbuhan ekonominya bagus, kenaikannya bagus. Kalau pertumbuhan ekonominya menurun, apakah upah buruh juga turun.”

Bagi buruh, sambung Irgan, upah adalah bagian yang penting. Untuk itu, perlu ada kepastian atas kebijakan pengupahan. Adalah wajar ketika buruh terus menuntut haknya untuk peningkatan kesejahteraan. KHL, tegas Irgan, harus menjadi acuan dalam penetapan upah buruh. Disampaikan politisi dari dapil Banten III ini, ada 82 item KHL yang harus dipenuhi. Namun, hingga kini baru 60 item yang dipenuhi.

Seperti diketahui, KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang buruh lajang agar bisa hidup layak baik fisik maupun non fisik dalam satu bulan. Dan beberapa item KHL yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan minum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan tabungan. Aturan tentang KHL dimuat dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari item KHL itu, besaran upah pun disusun. Buruh Indonesia termasuk yang paling kecil menerima upah. Umumnya buruh Indonesia menerima upah sekitar Rp 1,1 juta–Rp 2,9 juta. Angka ini masih lebih kecil dibanding Filipina, Thailand, dan Cina yang telah mencapai Rp 3,5 juta–Rp 4 juta jika dikonversi ke mata uang Rupiah.

Ditambahkan Irgan, ada kekhawatiran buruh bila perlambatan ekonomi terus terjadi. Buruh tak pernah mendapat insentif. Sebaliknya, ancaman PHK dan dirumahkan banyak terjadi.

Seiring melemahnya perekonomian, banyak perusahaan dan pabrik yang gulung tikar. “Saya kira pemerintah jangan membuat aturan yang tidak memperhatikan perlindungan terhadap buruh.

Itu saya kira poin penting dari kebijakan keempat Jokowi,” tandas Irgan.

Kebutuhan buruh dari tahun ke tahun kian meningkat. Sementara upah minimum regional (UMR) banyak yang belum disesuaikan. Irgan mencontohkan, di DKI Jakarta, UMR-nya masih Rp 2,5 juta. “Padahal, pertumbuhan ekonomi sudah semakin melesat. APBD sudah semakin tinggi. Industri berkembang baik. Uang berputar di Jakarta sekian banyak. Sementara buruh menjadi marginal akibat UMR-nya terkunci di Rp 2,5 juta.”

Ditegaskan kembali oleh Irgan, persoalan buruh jangan sampai menjadi komoditas politik. Mereka hanya diperhatikan ketika musim Pilkada tiba. Saat ini, serapan angkatan kerja masih rendah dibandingkan dengan jumlah pengangguran. Data pengangguran saat ini, ungkap Irgan, sekitar tujuh juta. Sementara serapan angkatan kerja hanya satu juta orang. Jumlah itu belum termasuk buruh yang dirumahkan atau di-PHK.

“Semakin besar orang yang menganggur, semakin berdampak terhadap akses sosial. Orang yang tidak bekerja tentu tidak bisa menghidupi keluarganya. Melihat buruh itu bukan hanya satu orang, tapi harus dilihat sebagai kepala keluarga. Bisa jadi dia punya isteri dan anak. Jadi, ketika ada buruh yang dirumahkan atau di-PHK sekian ribu orang, maka 1000 x 5 sama dengan lima ribu orang terancam kehidupannya. Ini bukan angka main-main,” papar Irgan.

(SC, MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW

KENAIKAN UPAH BURUH SANGAT REALISTIS

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji buruh setiap tahun disambut baik. Kebijakan tersebut bakal terealisasi karena memang sangat realistis. Betapa pun kini sedang ada perlambatan ekonomi dan harga barang kebutuhan pokok sempat melonjak, upah buruh pun mesti dinaikkan secara terukur untuk mendorong daya beli.

Di ruang kerjanya, Parlemen-taria diterima secara khusus oleh Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso untuk membincang paket kebijakan pemerintah yang menyangkut tenaga kerja. Di balik kebijakan pemerintah yang menggairahkan para buruh, ia mengimbau agar buruh tak menuntut kenaikan yang terlalu tinggi, sebab akan membebani perusahaan tempat mereka bekerja. Jangan sampai kenaikan upah itu malah membuat perusahaan berhenti beroperasi.

Beberapa waktu lalu, pemerintah menuangkan isu upah buruh dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV. Bersama kenaikan upah itu, pemerintah juga mengusahakan kemudahan akses kredit usaha rakyat (KUR) untuk para karyawan, TKI, dan TKI purna. Ini untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja sendiri.

“Saya optimis bisa terealisasi karena sesuai amanat UUD 1945, masyarakat harus dilindungi dan negara harus mengusahakan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Jadi, itu adalah tugas negara. Bisa tidak bisa, mau tidak mau, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Imam mengapresiasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV itu. Paket ini tidak saja menaikkan upah buruh setiap tahun secara terukur, bahkan fasilitas kemudahan KUR juga diberikan kepada para pekerja dan korban PHK. Sudah tugas pemerintah mensejahterakan para pekerja atau buruh yang merupakan bagian dari warga bangsa ini. Negara harus hadir dan berperan dalam kesejahteraan rakyat.



Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso

“Negara sebesar ini dengan luas wilayah dan kekayaan yang luar biasa, ditambah program poros maritimnya, pasti bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ditambah Presiden Jokowi selalu menyatakan kerja, kerja, dan kerja,” tuturnya.

Itu artinya, Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden harus mampu memacu rakyatnya untuk bekerja dan pemerintah yang memberi stimulus dengan kemudahan membuka UKM baru bagi para pakerja. Akses modal sudah dimudahkan bagi para pekerja yang ingin menjadi pelaku UKM.

Namun, pengawasan atas kebijakan ini juga harus ditegakkan. Bantuan sosial (bansos) bagi para pekerja ini, tak boleh diselewengkan. Untuk itu, penegak hukum yang mengawasi paket ini mesti diberi penghargaan pula dengan menaikkan gajinya. “Kalau sudah sinergi antara penegakan hukum dan penyediaan bansos, maka pemerintahan kian *clear*. Pada gilirannya lapangan pekerjaan dan pengangguran yang selama ini menjadi persoalan krusial akan teratasi,” papar politisi dari dapil Jateng III itu.

Imam optimis paket jilid IV yang diusul jilid V dan seterusnya bisa mening-

katkan kesejahteraan rakyat. Apalagi, kata Imam, dalam pembahasan APBN 2016 sudah disebutkan oleh Menaker mengenai penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dan bagi para pengusaha, pemerintah mendesak agar tidak mudah mem-PHK karyawannya. “Perusahaan diminta jangan main pecat dan kelihatannya pemerintah sudah melakukan *bargaining*,” imbuh Imam lagi.

Ia menegaskan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu dimaksudkan untuk mewujudkan Nawacita dan bermuara pada kesejahteraan rakyat. “Itu sudah secara gigih dilaksanakan, meski beberapa kendala menghadang. Makanya saya minta semuanya mendukung, jangan sampai teman-teman di DPR maupun LSM malah menggulingkan pemerintahan,” ujarnya mengingatkan.

Pada bagian lain, Imam juga membincang persoalan TKI ilegal. Menurutnya, pengiriman TKI secara ilegal harus segera dihentikan. Itu tidak saja merugikan pribadi TKI, tapi juga negara. Saat ini, sambungnya, masih banyak TKI ilegal yang dikirim ke Arab Saudi dan Malaysia. Sementara pengiriman TKI ke Singapura, Hongkong, dan Taiwan selama ini cukup baik.

“Kalau tidak diputus pengiriman TKI ilegal, nanti negara akan mengalami pemborosan anggaran, karena pasti ada biaya pengembalian TKI ke Indonesia. Banyak kasus hukum bahkan pembunuhan yang menimpa TKI ilegal. Bahkan, banyak TKI yang terancam hukuman pancung. “Harus diupayakan sungguh-sungguh membenahi pengiriman TKI. Yang ilegal harus diganti dengan yang legal.”

Kini, Komisi IX sedang membentuk Panja Perlindungan TKI. Bila sebelumnya menitikberatkan pada penempatan, sekarang lebih mengutamakan perlindungan. Pemerintah, kata Imam, sudah memberikan perlindungan itu. Namun, perlu ada sedikit revisi dari UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Hak-hak TKI dan bantuan hukum menjadi bagian dari isu perlindungan tersebut.

(MH,MP) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW



PEMERINTAH SUDAH MEMBUKA SUMBATAN EKONOMI

Keluhan para pengusaha, pekerja, dan pelaku UKM direspon pemerintah dengan merilis paket kebijakan ekonomi jilid I-V dan kelak mungkin ada paket kebijakan lainnya. Pemerintah telah berupaya membuka jalan kemudahan agar ekonomi nasional menggeliat termasuk UKM. Dampaknya akan dirasakan beberapa bulan kemudian.

Soal investasi, misalnya, pemerintah bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mungkin sudah melakukan simulasi bagaimana mempermudah izin investasi dalam waktu singkat. Pemerintah sudah berupaya dengan baik. Sekarang *spirit* kebijakan pemerintah pusat itu harus ditularkan ke daerah. Inilah sebagian pandangan yang dikemukakan ekonom Ahmad Erani Yustika.

Lewat sambungan telepon, kepada

M. Husen dari Parleментарia, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang ini, berusaha proporsional menilai berbagai paket kebijakan pemerintah tersebut. Kini, ia bekerja sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPD TT). Berikut petikannya.

Pemerintah sudah mengeluarkan 5 paket kebijakan. Dan kelak mungkin

ada paket kebijakan lainnya. Apa yang sudah dirasakan dari ekonomi masyarakat kita?

Kalau mengenai dampak harus diukur dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan kemudahan perizinan, penyederhanaan proses, pengurangan pajak, dan paket kebijakan IV tentang ketenagakerjaan, itu baru bisa diukur beberapa bulan kemudian.

Apa yang disampaikan pemerintah lewat paket-paket itu merupakan kelu-

APA YANG DISAMPAIKAN PEMERINTAH LEWAT PAKET-PAKET ITU MERUPAKAN KELUHAN YANG SELAMA INI DIHADAPI PENGUSAHA, PEKERJA, DAN PARA PEMBAYAR PAJAK. PEMERINTAH SUDAH MEMBUKANYA DAN ITU AKAN TERUS DILAKUKAN LEWAT PAKET-PAKET BERIKUTNYA. HASILNYA SEKALI LAGI GELIAT EKONOMI BISA DICEK DALAM BEBERAPA BULAN LEWAT DATA-DATA EKONOMI.



Ahmad Erani Yustika

han yang selama ini dihadapi pengusaha, pekerja, dan para pembayar pajak. Pemerintah sudah membukanya dan itu akan terus dilakukan lewat paket-paket berikutnya. Hasilnya sekali lagi geliat ekonomi bisa dicek dalam beberapa bulan lewat data-data ekonomi.

Pada paket II, Pemerintah menderegulasi perizinan investasi. Sebelumnya izin investasi bisa beberapa hari, kini dipangkas hanya tiga jam saja. Realistiskah ini?

Pemerintah mencoba untuk melakukan segala daya untuk mengatasi isu yang selama ini mendera pengusaha atau investor. Pada level pemerintah pusat, saya kira BKPM sudah melakukan simulasi sehingga ketemu angka tiga jam tadi.

Seperti yang disampaikan Presiden, percepatan izin investasi itu tidak bergantung pada pemerintah pusat, tapi sebagian ada yang dilakukan oleh Pemda. Presiden menyampaikan, semangat yang sama harus dimiliki oleh Pemda. Kalau itu sudah dilakukan, *spirit* yang dibawa pemerintah bisa ditularkan sampai ke level daerah.

Di paket kebijakan III, ada penurunan harga BBM seperti avtur, pertamax, pertalite, dan solar. Sejauh ini apakah pemerintah sudah merealisasikan janji dari paket ini?

Saya tidak bisa menjawab ini, karena tidak mengikuti. Saat ini saya, kan, berada di Kementerian Desa. Tapi, secara

keseluruhan penurunan harga minyak sebagian sudah dilakukan oleh pemerintah.

Soal upah buruh yang rencananya dinaikkan setahun sekali secara terukur. Anda setuju?

Dari dulu saya memang merekomendasikan itu sebelum saya masuk di pemerintahan, agar cara itulah yang ditempuh. Formulanya seperti apa, itu jadi bahan negosiasi, apakah dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau plus tambahan variabel lainnya. Perlu ada kepastian bagi tenaga kerja dan pengusaha. Jangan sampai kenaikan itu menyulitkan salah satu atau semua pihak. Secara prinsip saya setuju adanya kepastian itu seperti sering saya usulkan sebelum masuk ke pemerintahan.

Di paket kebijakan IV, pemerintah memberikan kemudahan dan perluasan akses mendapatkan KUR bagi para pelaku UKM. Pemerintah ingin menumbuhkan wirausahawan baru. Bahkan bunga KUR-nya diturunkan hingga 12 persen. Apakah bunga KUR ini tidak lebih baik diturunkan lagi hingga empat persen?

Idealnya sebisa mungkin pemerintah bisa menurunkan suku bunga itu. Saya kira itu juga yang diharapkan dari dunia perbankan. Saya berharap nanti ada kajian ulang sampai sejauh mana kemampuan pemerintah menurunkan bunga tadi hingga bisa diakses oleh kelompok menengah ke bawah.

Izin investasi yang coba dimudahkan oleh pemerintah adalah yang memiliki nilai Rp 100 miliar dan menyerap 1000 tenaga kerja. Tepatkah kebijakan ini?

Semangatnya adalah pemerintah ingin mendorong agar partisipasi dan hasrat untuk berinvestasi itu bisa lebih tinggi lagi saat ekonomi sedang mengalami perlambatan seperti sekarang. Instrumennya dari fiskal maupun moneter. Dari sisi fiskal, itu yang bisa dilakukan.

Untuk paket ekonomi itu melengkapi apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Dulu ada upaya untuk mendorong pelaku UKM dengan memberikan KUR. Saya berharap agar investasi domestik untuk ekonomi menengah ke bawah akan lebih eksis lagi dengan memberikan fasilitas dan intesif fiskalnya.

Rupiah yang sempat menguat apakah dampak dari paket kebijakan ekonomi ini?

Saya kira ada penguatan atau tidak terhadap rupiah, pemerintah memang harus mengeluarkan banyak paket kebijakan yang selama ini mengalami penyumbatan. Secara reguler efektivitas dari paket kebijakan ini harus dievaluasi terus menerus setiap waktu. Jadi, pemerintah bukan saja memproduksi paket kebijakan, tetapi memberikan penilaian sampai sejauh mana efektivitasnya nanti. (MH) FOTO: IST./PARLE/IW

Paket Kebijakan Ekonomi Kabinet Kerja dalam Perspektif Publik

Bagi negara-negara penganut sistem ekonomi nonsentralistik seperti Indonesia merupakan sebuah keniscayaan bahwa kita akan mengalami gelombang pasang surut pertumbuhan ekonomi beserta segala indikatornya, seperti kesempatan kerja, investasi, tabungan, tingkat suku bunga, dan besarnya anggaran negara. Selain itu, ada pula konsekuensi-konsekuensi dari perkembangan ekonomi dari masa sebelumnya yang turut juga berkontribusi menentukan posisi ekonomi saat ini. Keadaan inilah yang mula-mula menurut hemat penulis harus dipahami bersama bahwa kondisi ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga bisa didapatkan *standing position* yang objektif dalam melakukan penilaian. Dalam tulisan ini kami akan mencoba untuk menelaah Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-V yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2 bulan (Sep–Okt), dan bagaimana sambutan publik terhadap paket kebijakan ini.

PERSEPSI PUBLIK ATAS PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan Paket pertama yang dikeluarkan awal September, awalnya dianggap mengecewakan publik karena tidak menyentuh persoalan jatuhnya nilai tukar rupiah yang mencapai angka Rp. 14.600/US\$ Dolar dan IHSG yang bertengger di posisi 4.178. Sementara dalam paket kedua, pemerintah dianggap lambat untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja, mengembalikan lagi usaha-usaha yang hampir kolaps. Biaya produksi, termasuk bahan baku impor yang kian mahal karena pelemahan rupiah serta biaya energi lantaran tarif dasar lis-



trik dan elpiji terus naik. Pada fase ini banyak pengusaha yang memang lebih berharap pemerintah fokus pada sisi fiskal dan sisi operasional seperti tarif dasar listrik. Publik seperti terkejut dengan kebijakan paket I-II yang terlalu luas dan banyak, dan khawatir bahwa implementasi dilapangan berubah menjadi tidak efektif.

Belajar dari pengalaman paket sebelumnya, kebijakan ekonomi terlihat menjadi khusus saja seperti yang ada dalam kebijakan III-V. Bagi pemerintah, paket I dan II lebih dipandang untuk menyediakan fasilitas kemudahan berusaha, dan baru akan terasa dampaknya pada jangka menengah dan jangka panjang. Sementara untuk paket ke III-V, pemerin-

tah menjalankan resep kontra siklus, terutama menaikkan kemampuan belanja pekerja dan mereka yang berpenghasilan tetap terutama pada kelompok yang paling terdampak, antara lain menyuntik daya tahan ekonomi bagi perusahaan termasuk UMKM, dan membuka peluang lahirnya wirausahawan baru. Program kartu, dana desa dan dan yang menyentuh langsung masyarakat bawah dimasukkan dalam kategori ini. Dalam 3 paket di bulan Oktober ini, negara nampak berusaha untuk hadir dan memastikan bahwa penduduk miskin tidak kian tersingkir.

Namun yang mungkin perlu dipertanyakan lebih lanjut adalah bagaimana kelompok-kelompok terdampak yang menerima bantuan, mendapatkan pendampingan yang terstruktur dan programatis? Khususnya mengenai pengelolaan pinjaman (semisal KUR) dan pinjaman dari pihak yang lain agar meningkatkan kapasitas usahanya. Bagaimana pula mengelola hubungan-hubungan kerjasama antara misalnya pemilik kor-

porasi pertanian/perkebunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang yang sama. Beberapa pihak menilai paket berjilid ini terlalu mengistimewakan swasta dan menganaktirikan BUMN yang menjadi salah satu penopang kekuatan ekonomi nasional. Jika kemudahan yang diperoleh swasta seperti pembelian minyak mentah yang termaktub dalam kebijakan ekonomi sebelumnya, tidak demikian dengan BUMN yang harus bersiasat dengan UU tentang BUMN, UU tentang Perseroan Terbatas dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sekaligus.

Persoalan berikutnya yang menyita perhatian publik secara luas adalah rumusan formula sistem pengupahan dengan memasukkan variabel persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Intinya adalah upah buruh naik setiap tahun dengan besaran yang terukur. PP Pengupahan mendapat penolakan dari berbagai elemen buruh, salah satu penyebabnya karena dianggap bertentangan dengan Konvensi ILO Nomor 144 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konvensi ini disebutkan bahwa pemerintah harus melibatkan pekerja melalui Forum Tripartit yang terdiri dari pengusaha, pemerintah dan pekerja jika hendak membuat peraturan tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, besarnya inflasi nasional yang digunakan dalam PP tersebut dianggap sepihak karena hanya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).

PAKET KEBIJAKAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN

Bagi sejumlah pengamat, paket kebijakan sebaiknya tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha tapi juga perlu memperkuat daya beli masyarakat. Pertimbangannya adalah tanpa kenaikan konsumsi masyarakat, pelaku usaha produksi tetap akan susah berkembang. Banyaknya kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan bisa dipahami sebagai antisipasi terhadap situasi yang tidak pasti di kala krisis global seperti sekarang. Namun kita juga tidak hendak terjebak pada kebijakan *business as usual* yang tidak melahirkan perubahan

signifikan bagi pembangunan Indonesia. Setiap kalangan pelaku usaha tentunya sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Namun tuntutan implementasi di lapangan yang konsisten dan terukur akan menjadi konsekuensi-konsekuensi lanjutan. Pemerintah pun harus mampu mewaspadai para pemburu rente dalam perumusan payung hukum perundang-undangan atau pada peluncuran skema program-program baru.

Kebijakan yang kita belum tahu akan mencapai di jilid berapa, kiranya diharapkan tidak memperlemah aspek monitoring dan evaluasi dari setiap program yang dikeluarkan. Indonesia kini bersiap-siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan segera diimplementasikan pada 1 Januari 2016. Namun hingga saat ini kita masih sulit bersaing karena kelemahan di berbagai hal seperti SDM yang rendah, kelembagaan yang lemah, kurangnya infrastruktur, biaya logistik tinggi, dan perencanaan yang kurang matang. Pemerintah menurut hemat penulis tidak seharusnya fokus pada aspek pertumbuhan semata, melainkan juga capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat seperti di sektor ekonomi dan sektor sosial seka-

ligus. Kesejahteraan yang kami maksudkan disini tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam *Produk Domestik Regional Bruto*, tetapi juga diteropong via capaian di sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Paket Kebijakan Ekonomi yang telah mencapai jilid kelimanya tentu merupakan rumusan-rumusan terbaik dari berbagai pertimbangan pemerintahan. Hasil yang paling nyata dari paket kebijakan pemerintah dalam dua bulan terakhir ini adalah nilai tukar rupiah yang mulai stabil dan masuknya berbagai investasi ke dalam negeri. Ini tentu yang kita harapkan mampu mendorong angka-angka pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Namun rangkaian kebijakan ini masih akan diuji implementasi lapangannya, apakah ia berada tepat di jalur cita-cita bernegara dan berbangsa kita, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. [PARLE]

BAGI SEJUMLAH PENGAMAT, PAKET KEBIJAKAN SEBAIKNYA TIDAK HANYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI PELAKU USAHA TAPI JUGA PERLU MEMPERKUAT DAYA BELI MASYARAKAT.

BELA NEGARA, PAYUNG HUKUMNYA MANA?

Antusias. Itu respon publik ketika diajak bicara tentang program bela negara yang dicanangkan pemerintah. Respon yang sama juga disampaikan sebagian besar anggota dewan termasuk anggota Komisi I DPR RI Marinus Gea saat bicara dengan *Parle* beberapa waktu lalu di Jakarta. Sebenarnya agenda seperti ini sudah lama dinanti banyak pihak. Dahulu dalam bentuk yang serupa tapi tak sama, pernah terlaksana terutama sebagai syarat kelulusan bagi calon Pegawai Negeri Sipil. Tapi kemudian pelan-pelan meredup, katanya terkendala dana. Ketika Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyuarakannya kembali, keriuhan terjadi.



Anggota Komisi I DPR RI Marinus Gea

“Iya wacana bela negara ini membuat gaduh juga, ada suara pro dan kontra. Bagi DPR masalah ini sebaiknya diatur dalam payung hukum aturan perun-

dang-undangan itu artinya harus dibicarakan dengan wakil rakyat di Senayan. Pemerintah dalam hal ini Menhan belum menyampaikannya kepada Komisi I,” ujar politisi FDIP ini. Baginya persoalan bela negara ini sebenarnya harus menjadi prioritas karena sejak awal konstitusi sudah memberi amanat seperti tertuang dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi; Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pengaturan lebih detail soal ini tentu perlu dipertegas dalam UU. Sejauh ini lanjut dia sudah ada UU no.3/2002 tentang Pertahanan Negara yang merupakan revisi dari UU no.20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara. Namun payung hukum ini belum cukup untuk jadi landasan. Inilah pekerjaan rumah Menteri Pertahanan yang sudah ditunggu DPR.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten ini menggarisbawahi ada yang perlu dipertegas ketika Menteri Pertahanan dalam sejumlah kesempatan mengemukakan keprihatinan pada kondisi anak bangsa saat ini yang mulai melupakan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Ini terlihat pada gejala maraknya tawuran antar kelompok masyarakat di perkampungan, siswa sekolah bahkan tukang ojek pangkalan dengan para sopir Gojek. Sehingga diperlukan penanaman nilai-nilai patriotisme, cinta bangsa untuk memupuk rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Itu menurutnya perlu dilakukan melalui pelatihan tentang hukum, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, serta penanganan bencana.

Ini yang kemudian dikritisi oleh anggota dewan termasuk Marianus Gea. Kalau menyoal nilai-nilai wawasan ke-



Calon PNS mengikuti diklat bela negara

bangsaan menurutnya lebih efektif kalau diperkenalkan sejak dini di bangku sekolah. Baginya tidak mungkin hal ini ditanamkan dalam pelatihan yang berlangsung satu bulan. Menhan menurutnya perlu bicara dengan kementerian terkait seperti Kemendikbud, Kemenag serta Lemhannas untuk merancang kurikulum yang diperlukan. Akan tetapi dalam kesempatan yang berbeda ia juga mendengar penjelasan pemerintah melalui media, program bela negara yang dicanangkan selama satu bulan juga akan memberikan bekal tentang latihan baris berbaris dan pengenalan senjata. “Nah kalau begitu sudah seperti wajib militer. Kalau memang programnya sudah seperti wajib militer kenapa kita ha-



FOTO: www.beritaderah.co.id

rus malu-malu menyampaikan kalau ini wajib militer. Kenapa harus mengatakan ini bukan wajib militer,” tekan dia.

ANGGARAN

Hal lain yang perlu menjadi perhatian, setelah menelaah apakah ini bela negara atau wajib militer adalah tentang anggaran yang diperlukan. Baginya apabila pemerintah menargetkan kader bela negara sebanyak 100 juta orang dalam waktu 10 tahun, itu berarti ada 10 juta orang yang mengikuti pelatihan selama 1 tahun dan sekitar 800 ribu orang setiap bulannya. Jumlah yang sangat besar ditengah kondisi perekonomian yang saat ini sedang kepayahan menapaki jalan terjal apalagi di tengah terpaan badai

ekonomi global. Pertanyaannya kemudian apakah ini sudah menjadi prioritas? Apakah tidak lebih baik anggaran yang ada difokuskan untuk menggenjot sektor ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan?

Anggota Komisi I Tubagus Hasanudin juga memfokuskan perhatian pada permasalahan anggaran ini. Ia menggambarkan tantangan anggaran yang harus disiapkan dengan penggambaran apabila dalam 5 tahun ke depan dilatih sebanyak 50 juta kader dengan biaya Rp10juta/orang maka itu berarti diperlukan anggaran Rp500 triliun. “Uang dari mana? Anggaran TNI untuk pengadaan alutsista saja pemerintah sering mengurangi.

Menurut saya masih perlu didiskusikan ulang, ketika uang negara semakin terbatas kita harus lebih jeli menentukan prioritas. Mana yang paling utama untuk kepentingan bangsa dan negara,” tekan dia.

Ketika muncul wacana menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan BUMN dan swasta, bagi Marinus itu juga sebuah pilihan yang tidak boleh gegabah dalam memutuskannya. Secara pribadi ia mengaku lebih baik dalam kondisi saat ini anggaran bidang pertahanan difokuskan untuk memodernisasi alutsista TNI yang menurutnya secara bertahap sudah dijalankan termasuk dalam APBN 2016. Ia menekankan lebih baik proses pelatihan bela negara ditanamkan secara bertahap sejak jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi dalam kurikulum yang terintegrasi. Pada masa lalu negara memiliki instrumen Penataran P4 yang dilakukan secara berkala. Namun pasca reformasi kebijakan ini seperti terlupakan. DPR tambahnya siap mengkaji kembali hal ini bersama kementerian dan pihak terkait lainnya.

Pada saatnya ketika kondisi keuangan negara sudah menjadi lebih baik, ia menilai program bela negara atau bahkan menyiapkan komponen cadangan dalam pelatihan wajib militer adalah keniscayaan. Sementara menunggu kesiapan anggaran, pemerintah harus berkomitmen untuk menyiapkan tempat pelatihan yang memadai, baik merevitalisasi diklat milik TNI, Kemenhan atau membangun pelatihan khusus untuk program ini. Belajar dari sejumlah negara seperti Korea, Rusia, Iran, Austria bahkan Israel, program bela Negara/wajib militer sudah menjadi kebijakan berkala negara yang didukung anggaran memadai. Di Israel wajib militer sudah menjadi keharusan bagi pria dan wanita sejak usianya menginjak 18 tahun. Program diikuti selama minimal tiga tahun bagi pria dan dua tahun bagi wanita. Regulasi juga tegas mengatur apabila seorang kader gagal mengikuti wajib militer maka ia dapat memilih menjadi sukarelawan kemiliteran. (IKY) FOTO: ANDRI, IST/PARLE/IW

DANA DESA, JANGAN SAMPAI SALAH KELOLA

Ada 74.000 desa di negeri ini. Bayangkan seperti apa pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia, jika semua desa tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Itulah amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau sering disebut UU Desa. UU ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri. Karena memang masyarakat desalah yang lebih tahu apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera.

Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR selanjutnya mengucurkan anggaran yang pada saatnya akan mencapai Rp1,5 miliar untuk setiap desa. Nah, itu kalau dilihat dari kacamata positif. Pesan bijak mengatakan setiap pihak harus siap pada kemungkinan terburuk. Apa jadinya ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan, lalu dana yang dikucurkan di puluhan ribu desa itu jadi bancakan, tikus koruptor baru yang mendadak muncul di desa.

Waduh jangan sampai itu terjadi.

“Kita sebagai wakil rakyat harus menjalankan perannya mengawasi dan melakukan evaluasi, sehingga jangan sampai salah dalam tata kelola keuangan desa itu,” kata anggota Komisi II DPR Sukiman kepada *Parle* dalam kesempatan wawancara di Jakarta beberapa waktu lalu. Itulah sebabnya komisi yang membidangi masalah dalam negeri ini dari awal sudah mewanti-wanti agar dana desa ini betul-betul tepat sasaran, sesuai dengan rencana, program, dan sesuai dengan keinginan masyarakat di mana desa itu berada.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini menegaskan terkait pelaksanaan program dana desa ini, DPR akan melakukan evaluasi melalui fungsi pengawasan terhadap pemerintah. DPR akan melihat data yang diberikan Kementerian Keuangan, Kementerian PDT dan Kementerian Dalam Negeri. Ia juga meminta aparat desa, jangan keluar dari p e d o - m a n -





FOTO: <http://tataruangepertanian.com>

pedoman yang sudah ada, berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, harus transparan dan terbuka. Dalam rangka untuk program yang sifatnya bersentuhan langsung pada kepentingan masyarakat, aparaturnya dapat memanfaatkan dana desa ini untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat desa.

Untuk itu menurutnya semua pro-

gram pembangunan desa harus direncanakan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Program-program ini harus dimusyawarahkan agar sesuai dengan kebutuhan, baik itu meningkatkan kualitas pelayanan dasar, sarana dan prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Semuanya menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk 6 tahun ke depan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan. Jadi setiap tahun harus dilakukan beberapa kali musyawarah desa untuk mempertajam dan menyepakati rencana kerja dan anggaran desa tahunan. Setiap kegiatan tingkat desa harus dapat diren-

canakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh masyarakat desa sendiri. Termasuk juga, setiap ada permasalahan atau kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa harus dimusyawarahkan dulu.

Dengan regulasi ini, desa diberikan kepercayaan penuh, untuk mengelola anggaran desa sendiri. Dananya cukup besar, sesuai luas, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan per desa. Sedikitnya 70 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) harus dimanfaatkan untuk pembangunan. Sedangkan untuk gaji dan operasional perangkat desa tidak boleh lebih dari 30 persen.

Untuk setiap desa harus bisa membuat dan mengelola rencana SPB Desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus menjalankan sistem informasi desa, termasuk laporan keuangan desa yang dapat dilihat dan dipantau oleh siapa saja. Sistem ini juga berguna untuk memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang ditemukan dan perkembangan penyelesaian masalah.

Selain itu, UU Desa juga membuka kesempatan bagi masyarakat desa, untuk mengelola sendiri seluruh aset yang ada di desa. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Melalui BUMDesa, masyarakat desa dapat meningkatkan sendiri kehidupan perekonomian perdesaan dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan bersama. Salah satu semangat utama yang dibawa oleh UU Desa, adalah gotong royong bukan hanya antara masyarakat yang berada di satu desa saja, tapi juga dengan masyarakat yang ada di



FOTO: www.medrawarga.info

desa-desa tetangga.

UU Desa mendorong agar kerja sama antar desa ditingkatkan untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang ada, agar menjadi lebih besar dan kuat. Misalnya pengembangan usaha bersama, kerjasama di pengelolaan lingkungan, dan sumber daya alam, kegiatan pemberdayaan masyarakat, sampai pengembangan kawasan perdesaan yang menggabungkan kemampuan dan aset desa-desa untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Untuk itu, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dapat didirikan atau ditingkatkan peran dan lingkungannya. Disamping itu, UU desa juga menekankan pentingnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, untuk membangkitkan peran partisipasi semua masyarakat desa. Sementara Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menge-

lola semua kegiatan pembangunan, dan pemberdayaan desa, serta penggunaan dana desa secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan pembangunan, setiap desa akan dikawal oleh pendamping desa. Pendamping desa akan membantu memastikan kualitas pembangunan desa sesuai harapan, termasuk kualitas pemberdayaan manusianya. Jadi UU Desa hadir untuk menguatkan identitas dan jati diri desa, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi desa, untuk mengatur dan mengelola pembangunannya sendiri untuk lebih maju dan sejahtera.

Dengan dukungan semua pihak sesuai bidangnya masing-masing tentunya desa mandiri akan segera terwujud. Desa yang menjadi sumber hidup dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, desa yang menjaga martabat dan kearifannya, desa yang menjaga lingkungan budaya dan nilai-nilai tradisionalnya serta desa yang dibangun dan dijaga secara mandiri dan gotong royong bersama oleh seluruh masyarakatnya. Jadi ayo kita bersama-sama dukung UU Desa.

Politisi FPAN ini menambahkan sebagaimana visi misi dan janji saat Presiden Joko Widodo kampanye, sekaligus telah dilantik, bahwa program desa ini menjadi program prioritas Pemerintah dan DPR, sekaligus ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangu-

UNTUK SETIAP DESA HARUS BISA MEMBUAT DAN MENGELOLA RENCANA SPB DESA SECARA TRANSPARAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN. PEMERINTAH DESA HARUS MENJALANKAN SISTEM INFORMASI DESA, TERMASUK LAPORAN KEUANGAN DESA YANG DAPAT DILIHAT DAN DIPANTAU OLEH SIAPA SAJA.

nan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan dalam rangka mewujudkan sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM). “Sekarang ini ada komitmen dalam melaksanakan program dana desa, dengan anggaran rata-rata Rp 1,5 milyar per desa. Ini dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana yang dijanjikan oleh Pemerintah,” ungkap Sukiman.

Dia menjelaskan terkait konteks pembahasan anggaran, telah dilakukan antara DPR RI dan pemerintah dalam anggaran tahun 2015. Arahannya adalah supaya dilakukan program-program peningkatan kapasitas Aparatur Desa. “Hal tersebut, dilakukan pembekalan pelatihan, supaya sumber daya manusia dalam rangka untuk mengelola dana bantuan desa yang cukup besar, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada UU tentang Desa,” paparnya.

nai pembekalan aparaturnya, ternyata masih baru sebagian kecil yang sudah dilaksanakan. Memang dalam konteks pendistribusian dalam rangka transfer dana ke daerah, Sukiman menyampaikan, hampir semua lapor, seperti dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal (PDT) dan Kementerian Dalam Negeri. “Itu (Dana Desa) sudah ada di daerah. Cuma sekarang kalau kita lihat dari UU saja, itu tidak boleh mengendap sampai berbulan-bulan. Faktanya di daerah sudah terjadi, karena sebab Desa/Aparatur Desa takut mengambil karena masih belum lengkap petunjuk pelaksanaannya, waktu itu,” paparnya.

Oleh karena itu, DPR meminta harus dipercepat pelatihan, dan pembekalan kepada Aparatur Desa, sehingga mereka dalam konteks penggunaan dana desa betul-betul sesuai, dengan arah dan

Efeknya yang harus dikejar, tapi kalau ini terlambat, otomatis akan berdampak dengan perputaran dan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa itu. Pembangunan yang diinginkan itu, boleh untuk infrastruktur, air bersih, penerangan, yang sifatnya tidak tercover oleh APBD ataupun APBN. DPR dan pemerintah perlu mendorong pemerintahan di desa lebih membuat peraturan desanya melalui program berdasarkan musyawarah desa, supaya ini betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat. Selama ini, kalau buat program pemerintah daerah takut tidak sesuai dengan masing-masing wilayah. Ini harus disesuaikan dengan yang menjadi keinginan di daerah itu. Jadi program dana desa harus terencana, dan bisa dilaksanakan, serta terevaluasi dengan baik, sehingga sehingga hasilnya betul-betul tercapai dan bisa terukur nantinya. “Mudah-mudahan ini berdampak positif dalam rangka kesejahteraan masyarakat di desa. Itu harapan kita, sehingga mereka (elemen masyarakat) kita minta untuk turut mensukseskan program ini,” katanya.

Ia melanjutkan di Kementerian PDT juga ada program peningkatan pemberdayaan masyarakat, termasuk posyandu, PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama, dilibatkan untuk diberikan pelatihan untuk dalam rangka pengelolaan dana desa yang baik. Jadi jika ini bisa terencana dan terukur program ini, dia berharap akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian, yang menjadi kendala adalah keterlambatan pencairan. Kita (Anggota DPR) minta kepada Pemerintah Daerah juga harus konsen terhadap hal ini, agar juga memberikan pembinaan, sosialisasi, sehingga akan lebih mudah, terprogram, terpola dan terukur hasilnya. “Kalau pembekalan terhadap mereka kurang, maka di masa transisi ini dikhawatirkan, mereka akan berurusan dengan aparat hukum. Oleh karena itu, sejak awal, kami sebagai anggota DPR sudah mengingatkan itu, supaya dana desa ini jangan membuat mala petaka bagi aparat dan aparat desa,” demikian Sukiman. (AS/IKY)

FOTO: RIZKA, IST/PARLE/IW



FOTO: www.cinikes.tolikara.com

Lebih lanjut ia mengutarakan, anggaran yang telah disalurkan untuk program dana desa, sekarang pada tahap III yang mencapai kurang lebih Rp. 20 Triliun. “Diharapkan akan terus meningkat pada tahun 2015-2016, karena hal ini juga diberikan secara bertahap. Dan supaya perangkat desa siap dalam melakukan itu, maka diberikan pelatihan, pembekalan, peningkatan kapasitas itu,” katanya.

PERLU PELATIHAN

Menurutnya, setelah dilakukan pembahasan antara Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri, menge-

program yang diinginkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu masyarakat. Dan penyerapan anggaran inilah yang masih sangat rendah. pendistribusian dari Pemerintah Daerah kepada desa masih terlambat, dan ada yang belum sama sekali. “Saya pikir pemerintah harus mendorong itu, sehingga dana ini harus betul berada di desa dan berada di masyarakat, sehingga bisa menopang dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dengan sendirinya, kalau dana ini bergulir di masyarakat dan desa, otomatis ekonomi di desa dan masyarakatnya bergerak dan meningkat kesejahteraannya,” tegas dia.

PINJAMAN PROYEK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTARA SOLUSI DAN POTENSI MASALAH

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas menjadi salah satu syarat utama untuk mendorong akselerasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sekaligus untuk meningkatkan daya saing nasional. Namun, jika melihat realita kondisi infrastruktur Indonesia hingga saat ini, bisa dikatakan ketersediaan infrastruktur Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.

Dibandingkan dengan negara lain, infrastruktur Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara di kawasan ASEAN. Berdasarkan data The Global Competitiveness Report 2014-2015, indeks atau pilar daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat ke 56. Sementara, Singapura berada di urutan 2, ke 25 adalah Malaysia, dan Thailand bertengger di posisi 48. Sehingga, menjadi wajar, jika daya saing Tanah Air masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

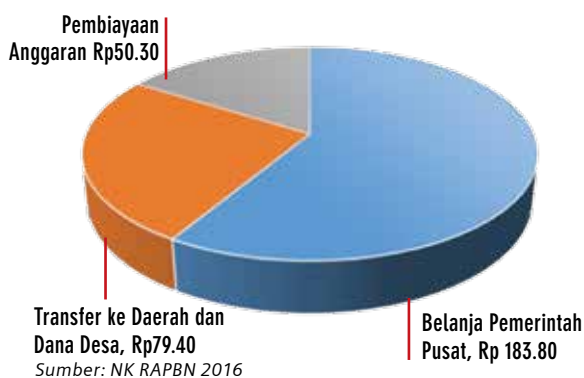
Mengingat begitu pentingnya ketersediaan infrastruktur, maka upaya pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, baik jalan, pelabuhan, transportasi, listrik dan lain sebagainya, harus menjadi prioritas di tahun-tahun yang mendatang. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, upaya pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas sudah mulai terlihat, dalam APBN-P 2015 dan APBN 2016.

Akan tetapi permasalahan serapan yang rendah menjadi penghambat dalam implementasinya. Selain itu, kemampuan anggaran atau kapasitas fiskal yang masih rendah, tidak berbanding lurus dengan kebutuhan pembiayaan

pembangunan infrastruktur, sehingga menjadi persoalan pelik yang harus diselesaikan pemerintah.

Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri bisa jadi salah satu solusi alternatif. Akan tetapi ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan dan diantisipasi oleh pemerintah, agar pinjaman luar negeri memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional.

KOMPOSISI BELANJA INFRASTRUKTUR DALAM RAPBN 2016 (TRILIUN RUPIAH)



PENYERAPAN ANGGARAN MASIH RENDAH

Belanja infrastruktur dalam APBN 2016 dialokasikan sebesar Rp 313,5 triliun, atau meningkat sebanyak 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi belanja infrastruktur yang cukup signifikan



ini sudah dilakukan pemerintah sejak setahun yang lalu. Peningkatan ini sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016, yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.

Sasaran pembangunan infrastruktur dalam APBN tahun 2016 diantaranya diarahkan untuk bidang energi, bidang kedaulatan pangan, dan bidang perumahan, air minum, dan sanitasi. Untuk bidang energi, antara lain diarahkan untuk penyediaan kapasitas pembangkit sebesar 61,5 gigawatt sehingga mampu meningkatkan rasio elektrifikasi.

Untuk bidang kedaulatan pangan, diarahkan untuk pengembangan jaringan irigasi seluas 500.000 ha. Sementara untuk bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, pembangunan infrastruktur yang antara lain diarah-



kan untuk pembangunan rusun dan penyediaan fasilitas rumah lainnya. Sedangkan pembangunan infrastruktur bidang konektivitas ditujukan untuk pembangunan jalan baru, tol, kereta api, bandara, dan lainnya.

Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur yang relatif tajam dalam APBN-P 2015 dan APBN 2016 menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membenahi ketersediaan infrastruktur di Indonesia. Akan tetapi keseriusan tersebut belum begitu terlihat jika kita mengacu pada realisasi belanja modal hingga semester I yang hanya baru dihabiskan Rp 22,8 triliun. Seharusnya pemerintah serius dalam merencanakan, menganggarkan hingga implementasi atau realisasi penyerapan.

Mengingat betapa pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur untuk menggenjot perekonomian dan daya saing nasional, keseriusan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur haruslah linear dengan

kinerja penyerapannya. Linearnya antara penganggaran dan penyerapan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, mengingat kapasitas fiskal Indonesia yang masih rendah dan sebagian pembiayaan anggarannya masih bersumber dari pinjaman, khususnya pinjaman luar negeri.

Berdasarkan paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas beberapa waktu lalu, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan sebesar Rp 5,519.4 triliun yang pendanaannya dapat bersumber dari APBN, APBD, BUMN dan Swasta. Untuk pembiayaan yang bersumber dari APBN ditargetkan sebesar Rp 2,215.6 triliun.

Merujuk kepada kapasitas fiskal dan penerimaan negara yang masih rendah dan boleh dikatakan tidak sebanding dengan kebutuhan Rp 2,215.6 triliun tersebut, sudah pasti salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam konteks merealisasikan pembi-

ayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN adalah melalui pinjaman luar negeri.

Akan tetapi, jika kinerja penyerapannya masih rendah, maka pembiayaan dari pinjaman luar negeri bukanlah solusi terbaik. Penyerapan yang rendah, akan menimbulkan beban bagi keuangan dan perekonomian negara jika pembiayaannya bersumber dari pinjaman luar negeri.

ANGIN SEGAR UNTUK INFRASTRUKTUR

Pinjaman luar negeri merupakan salah satu solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan penerbitan surat utang negara (SUN). Hal ini didasarkan pada argumentasi yang menyatakan bahwa penerbitan SUN yang berlebihan akan banyak menyerap uang dari sektor swasta atau ril, yang dapat menimbulkan perkembangan sektor swasta terhambat dan pada akhirnya dapat memicu inflasi dan perlambatan ekonomi nasional.

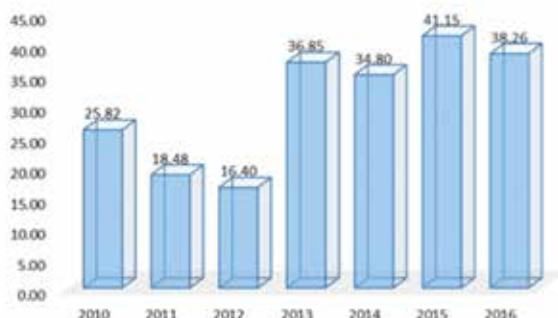
Akan tetapi, pinjaman luar negeri selain memberikan keuntungan bagi pembangunan juga memberikan potensi kerugian bagi negara. Keuntungan pinjaman luar negeri harus dilihat dari syarat dan ketentuan (*term and conditions*) kontrak apakah sesuai untuk peruntukannya yaitu resiko, bunga, dan waktu pengembalian yang lebih panjang.

Sedangkan potensi kerugian pinjaman luar negeri adalah seringkali ada motivasi politik dan ekonomi dibalik pinjaman luar negeri yang diberikan oleh negara peminjam. Hitung-hitungan untung dan rugi ini harus menjadi fokus pemerintah sebelum memutuskan pembiayaan pembangunan infrastruktur bersumber dari pinjaman luar negeri.

Dalam APBN 2016, pinjaman proyek, yang merupakan pembiayaan pembangunan infrastruktur, direncanakan sebesar Rp 38,26 triliun atau turun 7,0 persen dibandingkan APBN-P tahun 2015 sebesar Rp 41,15 triliun. Jika dibandingkan dengan besaran pinjaman proyek di tahun 2014, rencana pinjaman proyek di tahun 2016 meningkat cukup

ANGGARAN

PINJAMAN PROYEK TAHUN 2010 - 2016



Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2016

signifikan yakni sebesar 10 persen. Rencana penarikan pinjaman proyek tersebut direncanakan terutama berasal dari Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, ADB, serta kreditur komersial.

Rencana pinjaman proyek yang relatif besar tersebut terdiri atas pinjaman proyek oleh Pemerintah Pusat dan pinjaman proyek yang di teruspinjatkan atau penerusan pinjaman (*on-lending*). Pinjaman proyek Pemerintah Pusat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga (K/L) dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda melalui mekanisme belanja hibah (*on-granting*).

Pinjaman proyek pada K/L tahun 2016 itu, terutama digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk pengembangan fasilitas pendidikan pada perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan yang terakhir untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat material khusus (almatsus) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dalam rangka pemenuhan kekuatan dasar minimum (*minimum essential forces/MEF*).

Sementara itu, pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah digunakan untuk mendanai proyek *mass rapid transit* (MRT) di

4.471,9 miliar.

Alokasi penerusan pinjaman dalam RAPBN tahun 2016 dilakukan secara selektif berdasarkan tujuan penggunaan yang diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur terutama untuk energi melalui pembangunan/restrukturisasi pembangkit listrik (PLTU,

KETERLAMBATAN PENYERAPAN DANA PADA PROYEK-PROYEK YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI AKAN MENIMBULKAN BEBAN KERUGIAN ATAU BEBAN KEUANGAN YANG DAPAT DIALAMI OLEH INDONESIA.

PLTA, dan PLTG) dan pembangunan geothermal sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan, fasilitas penjaminan proyek infrastruktur dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur, dan pengendalian banjir Jakarta melalui pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk, serta rehabilitasi/penguatan tanggul.

Jika melihat rencana penarikan pinjaman proyek yang cukup besar dan rencana peruntukan yang begitu baik, rencana penarikan ini memberikan “angin segar” bagi perbaikan infrastruktur Indonesia ke depan dan penari-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan *water resources and irrigation sector management project phase II* (WISMP II) di 115 pemerintah kabupaten/kota. Penerusan pinjaman dalam APBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 5.909,7 miliar atau naik 32,1 persen dibandingkan APBN-P tahun 2015 sebesar Rp

kan pinjaman ini merupakan alternatif solusi yang baik bagi pembangunan infrastruktur serta pembangunan ekonomi. Akan tetapi, jika merujuk pada kinerja serapan pinjaman luar negeri untuk proyek infrastruktur hingga medio tahun 2015 yang masih sangat rendah, maka penarikan pinjaman proyek ini akan berpotensi menimbulkan masalah bagi keuangan negara dan perekonomian nasional.

SOLUSI ATAU POTENSI MASALAH

Realisasi serapan pinjaman luar negeri untuk proyek infrastruktur hingga semester pertama tahun 2015 baru sebesar US\$ 746,4 juta, setara 21,9 persen dari total target di tahun 2015 sebesar US\$ 3,4 miliar. Rendahnya dan keterlambatan realisasi pinjaman luar negeri ini bukan tidak menimbulkan kerugian atau dampak bagi Indonesia. Oleh karena itu, rencana pinjaman proyek di tahun 2016 harus benar-benar direncanakan dengan matang sehingga kerugian atau dampak negatif seperti di tahun ini tidak terulang kembali.

Keterlambatan penyerapan dana pada proyek-proyek yang pembiayaannya bersumber dari pinjaman luar negeri akan menimbulkan beban kerugian atau beban keuangan yang dapat dialami oleh Indonesia. Pertama, terkait *commitment fee*, semakin sedikit jumlah dana pinjaman yang terserap berarti semakin lama waktu pelaksanaan proyek dan semakin besar nilai *commitment fee* yang harus ditanggung oleh Pemerintah Indonesia.

Berikutnya, soal selisih kurs. Dengan adanya lonjakan kurs mata uang Indonesia terhadap dollar Amerika Serikat, atau mata uang asing dari negara donor, yang membuat terjadinya perbedaan nilai kurs rupiah terhadap dollar dari saat pinjaman ditandatangani dengan saat pelaksanaan proyek, yang berarti kerugian bagi pemerintah Indonesia.

Jika potensi masalah ini tidak menjadi pertimbangan dalam merencanakan pinjaman proyek untuk membiayai pembangunan infrastruktur, maka pinjaman proyek bisa menjadi potensi masalah besar bagi keuangan dan

perekonomian negara. Dampak membesarnya *commitment fee* dan beban utang akibat selisih kurs akan berdampak kepada kemampuan fiskal untuk membiayai program/kegiatan pelayanan publik terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, listrik, gas, air bersih, pertahanan dan pembangunan atau pengeluaran untuk sektor-sektor strategis akan semakin kecil dan terpaksa dikurangi.

Lindung nilai (*hedging*) yang saat ini telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi kerugian selisih kurs, merupakan salah satu cara untuk mengurangi dampak kerugian di masa yang akan datang. Akan tetapi, perencanaan yang lebih matang dengan memperhatikan secara detail visibilitas proyek-proyek yang akan didanai merupakan cara yang paling ampuh untuk menghindari resiko dampak kerugian dimasa yang akan datang.

HARUS JADI PERTIMBANGAN

Ada berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri yang selama ini masih sering kali terjadi. Permasalahan-permasalahan ini, dikhawatirkan akan berdampak pada keberhasilan atau kelancaran pelaksanaan proyek dan sekaligus juga menentukan tingkat penyerapan dana pinjaman luar negeri.

Pertama, permasalahan pada tahap persiapan pengadaan. Permasalahan yang timbul antara lain disebabkan oleh keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan *Detail Engineering Design* (DED) atau adanya perubahan di dalam desain proyek, *Project Management Unit* (PMU) belum terbentuk, keterlambatan penerbitan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Proyek (DIP), sedangkan pinjaman sudah ditandatangani dan sudah efektif sehingga pelaksanaan pengadaan menjadi tertunda yang akhirnya menyebabkan keterlambatan pelaksanaan konstruksi.

Kedua, pada proses pengadaan barang dan jasa sering terjadi beberapa masalah, diantaranya keterlambatan dalam proses pelaksanaan pengadaan, kesalahan dalam proses pengadaan

(*misprocurement*) dan kecurangan berupa kolusi (*collusive*), penipuan (*fraudulent*), dan korupsi (*corruption*) yang berdampak pada pengadaan yang tidak sesuai dengan standar pengguna jasa.

Ketiga, permasalahan pada tahap pelaksanaan konstruksi. Permasalahan yang sering muncul adalah keterlambatan di dalam pelaksanaan proyek yang disebabkan oleh kurang matangnya perencanaan proyek, keterlambatan dalam pekerjaan fisik, lambatnya proses pembebasan lahan (antara lain karena kurangnya alokasi dana pembebasan tanah), keterlambatan di dalam proses perekrutan tenaga kerja, serta pemahaman yang kurang terhadap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proyek.

Keempat, terkait dengan pihak



pemberi pinjaman luar negeri. Permasalahan yang sering muncul adalah adanya pembatalan beberapa komponen proyek, adanya keputusan penghentian proyek sementara dari pihak pemberi pinjaman, adanya keharusan melibatkan masyarakat (atau orang dalam jumlah tertentu) di dalam pelaksanaan proyek, persyaratan-persyaratan proyek lainnya yang terlalu ketat seperti harus ada dana pendamping, analisis dampak lingkungan, dan harus adanya undang-undang tertentu, pedoman pengadaan yang berbeda dari setiap donor dan lamanya persetujuan yang dikeluarkan oleh kreditor setelah semua persyaratan terpenuhi.

Kelima, terkait dengan badan pelaksana proyek (*Executing Agency*). Permasalahan yang sering muncul adalah pembuatan petunjuk teknis dan

petunjuk pelaksanaan yang kurang jelas, kesalahan dalam menafsirkan dan menerapkan pedoman terhadap pelaksanaan proyek akibat kurang memadainya pemahaman pelaksana proyek mengenai proses dan prosedur pelaksanaan proyek dan keterlambatan sosialisasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan proyek.

Terakhir, adanya konflik sosial di daerah yang menghambat pelaksanaan proyek, hal untuk proyek-proyek pinjaman luar negeri di daerah-daerah tertentu di Indonesia.

Penarikan pinjaman proyek luar negeri bisa saja menjadi solusi yang ampuh mengatasi minimnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, penarikan pinjaman luar negeri juga bisa menjadi potensi masalah yang

menimbulkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara, maka permasalahan ini terlebih dahulu harus diselesaikan pemerintah.

Menyelesaikan daftar permasalahan yang selama ini terjadi, dan perencanaan pinjaman proyek yang lebih matang harus dilakukan pemerintah, agar pinjaman proyek luar negeri dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perbaikan kualitas infrastruktur Indonesia, akselerasi pembangunan ekonomi Indonesia dan lebih lagi memberikan manfaat bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.

DITULIS OLEH: MARTHA CAROLINA DAN ROBBY ALEXANDER SIRAIT (TIM SUB BAGIAN ANALISA BELANJA NEGARA)

DISUNTING OLEH: SF (PARLEMENTARIA) FOTO: DENUS, IST/PARLE/IW

RUU PATEN : LINDUNGI HAK KARYA INTELEKTUAL

DPR telah menetapkan bahwa RUU Paten adalah satu dari 37 RUU Prolegnas yang menjadi prioritas pembahasan di tahun 2015. Saat ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyusun sebuah draft RUU yang akan menjadi subyek pembahasan di DPR.

Ketua Pansus RUU Paten John Kennedy Aziz menilai Undang-Undang Paten yang ada saat ini substansinya tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat baik secara nasional dan internasional. Oleh karena itu, UU Paten No 14 tahun 2001 perlu direvisi agar inventor (seseorang yang melakukan pekerjaan untuk mengkreasikan suatu hal yang baru untuk yang pertama kalinya) dilindungi.



Ketua Pansus RUU Paten John Kennedy Aziz

Ia berharap RUU Paten ini bisa selesai pada April 2016 mendatang. “Revisi UU Paten untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dan bisa memberi kepastian hukum kepada inventor,” ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi di Gedung DPR, Jakarta, awal Oktober lalu.

Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan hak paten menunjukkan kemajuan peradaban suatu negara. Semakin banyak hak paten yang didaftarkan berarti negara itu kaya, karena hak paten itulah yang akan menggerakkan sektor perekonomian masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM).

“Hak paten itu menunjukkan kemajuan peradaban suatu negara. Seperti negara-negara maju yang setiap tahunnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan hak paten atas hasil karya teknologi yang dihasilkan,” tegasnya.

Karena itu dia berharap Indonesia terus mengembangkan hak paten, mengingat sudah menjadi indikator, peringkat kemajuan suatu negara di dunia. Sekaligus untuk melindungi hak karya intelektual masyarakat dan mencegah masyarakat lain untuk mengambil keuntungan secara ilegal.

“Jadi, DPR berkomitmen akan pentingnya hak paten ini untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah sekitar April – Mei 2016 akan disahkan,” ujarnya.

Dia menyadari kalau kecilnya hak paten di Indonesia ini akibat kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat rendah, pemerintah belum memberikan kemudahan untuk memperoleh hak paten, dan prosesnya bisa selama 48 bulan.

“Itulah yang mendorong lemahnya pendaftaran hak paten. Selain itu tidak ada timbal-balik atau *reward* bagi inventor. Sementara pemegang paten sudah dibebani biaya pemeliharaan dan perlindungan,” kata John Ken-

nedy.

Menurut John dengan revisi UU Paten juga bisa memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus paten. Sebab, selama ini pengurusan paten wajib datang ke Jakarta. Itu pun memakan waktu lama hingga 48 bulan baru bisa mendapatkannya. Adanya revisi setidaknya bisa dikurangi. Plus pendaftaran paten dapat dilakukan secara *online*.

Di tempat yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Razilu menegaskan jika RUU Hak Paten ini bukan UU baru, karena sejak masa Belanda sudah ada (1891) di mana Indonesia harus mendaftar ke Belanda kalau mau

memiliki hak paten. Kemudian UU itu mengalami beberapa kali revisi (1989, 1991, dan 1997 dan 2001) sesuai perkembangan masyarakat dan 2015 ini.

“Dalam revisi ini memiliki beberapa kelebihan antara lain berpihak kepada inventor termasuk PNS (pegawai negeri sipil) dan UKM, memberi kemudahan pada masyarakat untuk memohonkan hak paten secara online, mendukung pembagian keuntungan (benefit) yang adil,” kata Razilu.

Selain itu ada penolakan terhadap perpanjangan hak paten meski sudah melewati kontrak misalnya 20 tahun (obat-obatan), dan setelah itu obat itu masih bisa dimanfaatkan, maka tidak boleh lagi diperpanjang. “Kalau dulu bisa diperpanjang 20 tahun lagi, namun dalam revisi sekarang ini tidak bisa lagi. Bahkan pemilik hak paten harus mengelaborasi (meng-close) karyanya itu agar bisa menjadi inspirasi untuk melahirkan karya baru lagi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Karena itu menurut Razilu, bukan hal yang diharamkan untuk mengkopir paste (copast-mengkopir-jiplak-meniru) hak paten selama hak paten itu tidak didaftarkan di Indonesia, karena hukum berlakunya hak paten itu bersifat lokal, teritorial.

“Setiap tahunnya terdapat 2 juta hak paten di dunia yang didaftarkan. Jadi, hanya dalam perlindungan yang tidak boleh ditiru, maka kalau mau mengkopir 1.990.000,- hak paten yang ada di dunia selama tidak didaftarkan di Indonesia, tidak ada pelanggaran hukum,” jelasnya.

Perlu diketahui hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

“Jadi, yang dipatenkan adalah terkait MIPA (matematika dan ilmu pengetahuan alam). Tapi, bukan ilmu sosial politik, ekonomi, agama, budaya,” katanya.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk



Diskusi Forum Legislasi bersama wartawan DPR mengenai RUU Paten di Press Room DPR

DALAM REVISI INI MEMILIKI BEBERAPA KELEBIHAN ANTARA LAIN BERPIHAK KEPADA INVENTOR TERMASUK PNS (PEGAWAI NEGERI SIPIL) DAN UKM, MEMBERI KEMUDAHAN PADA MASYARAKAT UNTUK MEMOHONKAN HAK PATEN SECARA ONLINE, Mendukung Pembagian Keuntungan (Benefit) yang Adil

atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. “Sanksinya, bukan saja sanksi perdata tapi juga pidana. Karena itu tingkatkan peniruan dan hentikan pemalsuan,” pungkasnya.

Sementara itu Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait revisi

undang-undang paten itu sendiri. Sebab, jika salah dalam menentukan kebijakan, hal tersebut justru akan membuka ruang bagi praktik monopoli. “Paten salah satu *source* monopoli,” kata Telisa.

Telisa juga menambahkan pemerintah perlu memberikan perlindungan bagi usaha kecil menengah (UKM) di republik ini. “UKM bidang teknologi misalnya, yang mau mendaftarkan patennya, jangan dikenakan biaya mahal,” tandasnya.

Menurut Telisa, pembelajaran maupun invosi yang terjadi pada sektor tersebut masih menggunakan cara-cara meniru. “Di Indonesia belajar masih melalui *copy paste* mungkin itu yang perlu diberi ruang. Jangan sampai ruang gerak kita benar-bener *limited* sekali,” ujar Telisa

Selain itu, lanjut Telisa, UU Paten ini harus menjadi inovasi dan sederhana. Seperti di China dan Indonesia sama dengan China, penduduknya sama-sama besar, negara kepulauan yang besar, dan kita hanya baru belajar dan masih *copas*.

“Pada prinsipnya jangan korbankan UKM, tidak ada monopoli dan sanksi yang berat, karena sanksi itu menunjukkan kepatuhan terhadap hukum,” pungkasnya. (NT) FOTO: DENUS/PARLE/IW

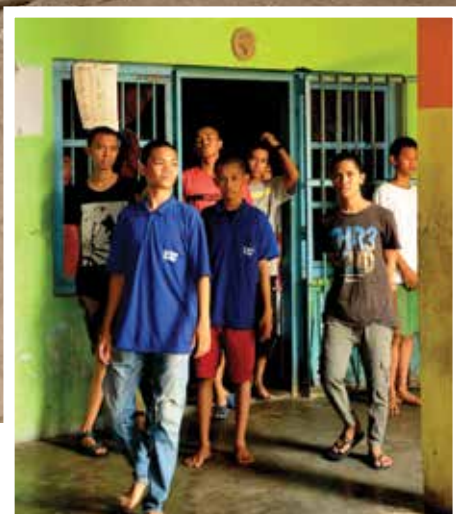


KONFERENSI ADAT

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, saat menghadiri Konferensi Adat Besar di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

FOTO: JAKA NUGRAHA





KUNJUNGI LAPAS

Tim Kunker Komisi III DPR RI melihat langsung penanganan warga binaan di Lapas Klas I Makassar

FOTO: IWAN ARMANIAS



TINJAU TOL

Tim Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia meninjau sejumlah jalan tol di Jakarta guna memantau operasional dan rencana pengembangan jalan tol di sekitar Jabodetabek,

FOTO: RIZKA

Hidup Sehat Bebas Stroke



Oleh: dr. Dito Anurogo

Di USA, satu orang terkena stroke setiap 40 detik, dan satu orang meninggal karena stroke setiap 4 menit. Stroke telah menjadi permasalahan global, sehingga 29 Oktober diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia.

Stroke adalah cedera vaskuler apapun yang menyebabkan berkurangnya aliran darah otak ke daerah otak tertentu, menyebabkan gangguan sistem per sarafan. Secara umum, penyebabnya dibagi menjadi dua, yakni: sumbatan (stroke iskemik) dan perdarahan (stroke hemoragik).

WHO memperkirakan bahwa sekitar 15 juta kasus stroke baru terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia. Di USA, terjadi 795 ribu kasus stroke setiap tahunnya. Prevalensi stroke di USA tahun 2005 mencapai 6,5 juta penduduk. Di Indonesia, prevalensi stroke menurut data Riset Kesehatan Dasar 2013, sebesar 12,1 per 1000 penduduk.

Di antara semua jenis stroke, kejadian stroke iskemik (SI) menempati peringkat tertinggi, mencapai 87%. SI adalah cedera otak akut yang disebabkan oleh berkurang/berhentinya aliran darah di pembuluh darah arteri otak.

Rerata insiden stroke 1,25 kali lebih

besar pada pria dibandingkan dengan wanita, namun perbedaan di antara jenis kelamin menurun seiring bertambahnya usia.

Faktor Risiko

Beragam faktor risiko terjadinya stroke harus kita ketahui dan waspadai. Misalnya: usia di atas 60 tahun, jenis kelamin pria, ras Afrika-Amerika, hipertensi (tekanan darah tinggi), gangguan/penyakit jantung (misalnya: fibrilasi atrium, stenosis mitral, infark miokard), kencing manis, *transient ischemic attack* (mini stroke), dislipidemia (peningkatan kolesterol total dan LDL serta penurunan HDL), kadar kalium serum rendah, merokok, ada riwayat keluarga yang juga menderita stroke, penyalahgunaan obat (kokain, heroin, amfetamin, mariyuana), kontrasepsi oral, migren. Faktor risiko ini beberapa dapat dikendalikan, dan beberapa memang sudah ditakdirkan demikian.

Potret Klinis

Pada SI, tanda-gejala bisa mendadak, tanpa peringatan sebelumnya. Awalmulanya sering tidak diketahui pasti. Boleh jadi dijumpai bicara terganggu. Bila SI disebabkan karena kemacetan aliran darah (oklusi) di arteri serebral anterior, maka berakibat memengaruhi kinerja otak bagian lobus frontal. Akibatnya, muncullah gangguan pemahaman, kesadaran, kapasitas mental, pengambilan keputusan. Lumpuh (paralisis) atau berkurangnya kepekaan kulit (hipestesi) anggota gerak tubuh bagian bawah. Stroke batang otak menyebabkan gang-

guan kesadaran dan muntah.

Keluhan lain, seperti: kelemahan kaki/tangan, kebutaan di separuh lapang pandang penglihatan, gangguan sensoris-motoris, mati rasa, ketidakmampuan mengenali subjek yang sebelumnya familiar (agnosia), gangguan berkomunikasi dari aspek pemahaman atau penggunaan bahasa (afasia) dapat dijumpai pada penderita SI, sesuai bagian otak yang terkena.

Vertigo, pingsan, melihat double (diplopia), gangguan lapang pandang, kelemahan, lumpuh, pelo, sulit menelan, gangguan koordinasi otot (ataksia), pupil bergerak tak terkendali (nistagmus) dapat terkait dengan insufisiensi arteri vertebrobasilar.

Pada stroke intraserebral hemoragik (ICH), ditandai dengan: pusing mendadak, muntah, tekanan darah meningkat, gangguan persarafan yang berlangsung lama. Mirip dengan SI, ICH seringkali dikaitkan dengan defisit sensoris dan motoris kontralateral terhadap lesi otak. Sebesar 40% penderita ICH mengalami perdarahan hebat di otak dalam beberapa jam pertama.

Deteksi Cepat

Menggunakan akronim FAST, dapat dengan mudah mengenali beragam gejala stroke. (F)ace, apakah wajah merot atau mencong ke salah satu sisi? (A)rms, saat satu lengan mampu diangkat, apakah satu lengan terkulai lemas? (S)peech, apakah gaya berbicara mendadak aneh, pelo, atau lidah terasa kelu, dan terjadi berkali-kali? (T)ime, dokter



memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengurangi efek stroke jika gejala terdeteksi dalam tiga jam pertama.

Kuesioner NIHSS (*National Institutes of Health Stroke Scale*) bermanfaat untuk menilai gangguan persarafan pada penderita stroke sekaligus menentukan terapi yang sesuai. CT scan adalah baku emas untuk membedakan stroke iskemik dan hemoragik.

Jika seseorang dicurigai terkena serangan stroke, maka beberapa langkah berikut ini dapat dilakukan: 1. segera membawanya ke UGD terdekat, 2. pastikan bahwa jalan napas, ventilasi, dan sirkulasi organ tubuhnya stabil, 3. monitor dan terus awasi tekanan darahnya, 4. hindari memberinya makan/minum melalui mulut, kecuali keselamatannya dapat dipastikan, 5. persiapkan akses intravena, agar memudahkan dokter memulai infus saline, 6. segera setelah diinfus, maka dokter akan segera merekomendasikan tes *fingerstick* glukosa, panel biokimiawi, uji koagulasi, hitung darah, dan elektrokardiografi (EKG).

Jika tidak ada kontraindikasi, dokter akan memberikan terapi trombolitik intravena dengan *recombinant tissue plasminogen activator* (r-tPA; berupa: *alteplase*) dalam tiga jam pertama saat gejala stroke berlangsung. Alteplase IV juga direkomendasikan pada penderita stroke iskemik akut tertentu, dalam 3-4,5 jam gejala berlangsung. Sedangkan penderita stroke hemoragik harus segera dibawa ke ICU, dan ditangani oleh spesialis.

Strategi "STROKE"

Banyak orang yang menganggap stroke itu sulit dan mahal biaya untuk mencegahnya. Padahal anggapan itu tidak benar. Berikut ini strategi STROKE yang ampuh untuk singkirkan stroke.

S: Seimbangkan pola dan gaya hidup serta asupan gizi

Pola dan gaya hidup seimbang adalah kunci menuju hidup sehat. Seimbang antara bekerja, berkeluarga, berorganisasi, bermasyarakat, beristirahat, berolahraga, berdoa, dan beribadah. Jadi hubungan antara manusia, alam lingkungan, semesta, dan Allah haruslah seimbang. Tentang gizi, asupan gizi seimbang de-

ngan pola 4 sehat 5 sempurna, masih relevan hingga saat ini.

T: Turunkan berat badan, kolesterol, dan tekanan darah

Sebenarnya menurunkan berat badan itu relatif mudah, tanpa obat-obatan. Caranya: dengan melakukan diet sesuai petunjuk dokter dan ahli gizi, menghindari camilan di saat luang seperti menonton TV, arisan keluarga, kumpul bersama sahabat, dsb. Untuk mencegah naiknya kolesterol jahat alias LDL (*Low Density Lipoprotein*), maka sebaiknya banyak mengonsumsi teh, coklat, kacang mete, *almond*, kenari, bayam, bawang putih, apel, alpukat, ikan salmon, kacang-kacangan (termasuk kacang kedelai). Bila masih belum berhasil, segera hubungi dokter. Untuk menghindari tekanan darah tinggi, sebaiknya rajin mengonsumsi pisang dan kentang, serta diet rendah natrium serta mengurangi konsumsi daging hewan, seperti kambing, sapi, ayam.



R: Rajin mengikuti perkembangan terkini tentang stroke

Rajin dan rutinlah mengikuti seminar, simposium, *workshop* terkini tentang stroke. Cara lainnya adalah dengan berselancar melalui internet, namun Anda sebaiknya hanya membaca artikel atau informasi yang ditulis oleh dokter atau pakar kesehatan, mengingat sekarang banyak sekali orang awam yang juga menulis juga tentang stroke. Informasi tentang stroke secara lengkap dapat juga diperoleh di Puskesmas, rumah sakit, stroke centre, dsb.

O: Olahraga teratur diiringi olah batin serta olah jiwa

Berolahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari. Tidak perlu yang berat-berat, jogging, bersepeda, berenang sudah cukup, asalkan dilakukan secara teratur. Hendaknya juga diiringi dengan olah batin dan olah jiwa, seperti relaksasi, yoga, meditasi, mendengarkan musik klasik atau suara alam, rekreasi ke alam bebas, berderma atau bersedekah, mengunjungi orang sakit, bersilaturahmi ke pondok pesantren atau panti asuhan. Semua kegiatan ini dapat memperkaya batin dan jiwa kita sekaligus mengharmoniskan antara cipta, rasa, dan karsa.

K: Kurangi lemak perbanyak konsumsi buah dan sayur

Istilah kerennya adalah *berdiet*. Diet yang dianjurkan adalah diet Mediterania, yang terdiri dari minyak zaitun (*olive oil*), ikan laut, buah, sayur, minum 6 gelas air sehari. Minyak zaitun mengandung vitamin A, B1, B2, C, D, E, K, besi, 85% asam lemak tak jenuh dan 15% asam lemak jenuh. Semua zat yang terkandung di dalam minyak zaitun ini baik untuk mencegah stroke. Diet Mediterania ini sebaiknya dilakukan setiap hari secara rutin dan teratur.

E: Enyahkan alkohol, ambisius, asam urat, rokok.

Hindari semua makanan atau minuman yang mengandung alkohol, meskipun hanya 1%. Ambisi boleh dan baik untuk meraih prestasi dan meningkatkan kinerja, namun terlalu ambisius akan melemahkan jiwa dan kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Hindari juga makanan yang kaya akan asam urat, seperti: *jerohan*, udang, kepiting, *emping*. Yang terakhir namun tak kalah penting, sebisa mungkin menjauhi asap rokok dan semua aktivitas yang berkaitan dengan rokok.

Dengan strategi STROKE, maka tentu serangan stroke dapat dicegah dan dihindari sedini mungkin. Jadi, hidup sehat bebas stroke, kini semakin mudah direalisasikan.

*Dito Anurogo, dokter digital, pemerhati neurosains, penulis 17 buku, sedang studi di S2 IKD Biomedis FK UGM. Email: ditoanurogo@gmail.com.



Sarifuddin Sudding

PERJUANGAN HIDUP PEMUDA NEGERI ANGIN MAMIRI

Taro Ada, Taro Gau menjadi “warisan” mendiang sang ayah yang hingga kini tetap dipegangnya, apa itu? Temukan jawabannya dalam kisah hidup Sarifuddin Sudding berikut ini.

Taro ada Taro Gau merupakan peribahasa Bugis yang berarti satu kata satu perbuatan. Ya, konsistensi antara perbuatan dengan perkataan itu menjadi prinsip hidup yang diajarkan mending sang ayah kepada Sarifuddin dan kesepuluh saudaranya.

Begitupun ketika sang ayah menerapkan sejumlah kebijakan kepada putra-putrinya. Misalnya kewajiban sang anak untuk mengaji, belajar, sekolah, membantu pekerjaan di rumah sampai memberi makan bebek-bebek. Jika salah satu putranya lalai menjalani kewajibannya, sang ayahpun tak segan-segan mencambuknya. Tidak kurang empat kali cambukkan diterima Sarif sepanjang masa kecilnya. Keras memang jika dirasakan ketika itu. Namun perlahan ia mulai mendapati manfaat dari sikap keras sang ayah selama ini. Salah satunya membentuk pribadi yang disiplin, tegas dan berani dalam kebenaran.

“Seingat saya mendapatkan empat kali cambukan dari ayah saya dan hampir pingsan. Salah satunya ketika saya tidak masuk sekolah karena hujan. Biasanya saya sekolah di SDN Salutubu di Sulawesi Selatan dengan bersepeda. Tapi karena hujan saya menunggu kendaraan umum. Namun kendaraan yang saya tunggu tidak juga datang (maklum ketika itu alat transportasi umum masih minim sekali. Karena kondisi sudah terlambat, maka saya memutuskan untuk tidak sekolah hari itu,” kisah Sarif begitu ia bisa disapa.

Tak dinyana, sekembalinya sang ayah dari kantor dan mendapati Sarif di rumah dan tidak ke sekolah, membuat murka ayahnya. Satu per satu cambukan pun langsung “melayang” ke tubuh Sarif. Seketika itu jua, tubuhnya pun memerah, lemah bahkan nyaris pingsan. Jera? Pasti. Namun lebih dari itu, menjadi ‘cambuk’ baginya untuk mengutamakan sekolah dan tidak mudah menyerah. “Itu semua demi keberhasilan kalian di masa depan,” tegas Sarif menirukan ungkapan sang ayah ketika itu.

Sang ayah pun mencoba mengasah jiwa sosial Sarif lewat realita sosial yang terjadi di sekitarnya. Ia kerap diajak sang

ayah melihat penggusuran yang dialami rakyat jelata.

Tak berlebihan jika kemudian peristiwa demi peristiwa itu membentuk sebuah penilaian dan harapan tersendiri bagi Sarifuddin. Nuraninya tergugah untuk ikut membela kaum papa yang kerap termarjinalkan.

AKTIVIS KAMPUS

Lulus dari SMAN 4 Ujung Pandang awalnya ia merasa sangsi bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Pasalnya, sang ayah yang hanya berstatus sebagai pegawai negeri dengan sebelas anaknya tentu sangat sulit untuk mampu membiayai Sarifuddin yang merupakan anak ke enamnya.



Saat rapat Kerja Komisi III dengan Kapalri

“Kalau mengharapkan biaya orangtua, darimana? Kami bukan dari keluarga kaya, hanya pensiunan PNS,” aku putra ke enam pasangan Hj. Alanan dan Alm. Sudding.

Sejak awal masa perkuliahan sudah terlihat jelas kepawaiannya dalam dunia politik dan hukum. Ia pun aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Salah satunya dalam himpunan mahasiswa Islam di Ujung Pandang.

“Ya sejak awal saya memang ingin

masuk jurusan hukum dengan harapan kelak akan menekuni bidang hukum untuk mampu mengambil peran yang lebih besar dalam masyarakat, misalnya lewat pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami penggusuran atau berbagai kasus hukum lainnya,” jelasnya.

Usai menyandang gelar sarjana hukum, sekitar tahun 1989, Sarif pun bergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar sebagai pembela umum. Disana Sarif bersama rekan-rekannya memberikan bantuan-bantuan hukum bagi masyarakat kecil dan lemah yang mengalami ketidakadilan. Disini eksistensi Sarifuddin terlihat sangat menonjol.

Tidak puas hanya menyandang sarjana hukum untuk membela kaum papa, Sarif memutuskan memperdalam ilmu hukumnya di pasca sarjana, Magister Hukum Tata Negara di kampus yang sama. Seiring dengan itu, karirnya pun meningkat, ia lolos menjadi pengacara, sekaligus menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Operasional Yayasan LBH Makassar.

Di tahun 1997 ia didaulat menjadi Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) di Su-

lawesi selatan. Ketika keluar aturan baru, dimana pengacara di LBH boleh “mengambil” atau menangani kasus lain di luar kasus yang masuk di LBH, ia pun langsung diminta untuk menangani berbagai kasus lain. Bahkan karena sebuah kasus yang ditangani jualah, ia hijrah ke Jakarta.

BERBEKAL TIKAR DAN DUA BUAH BANTAL

Love at the first sight (cinta pada pandangan pertama) agaknya juga dialami Sarifuddin. Meski mengaku sudah memiliki kekasih yang tengah mengikuti KKN (Kuliah kerja nyata) di sebuah daerah, namun perasaannya tak dapat berbohong ketika ia melihat seseorang gadis yang tak lain adalah adik kelasnya sendiri. Hatinya pun langsung bergetar. Walau ketika itu tak banyak kata yang terlontar dari bibirnya.

Kondisi berubah ketika untuk kedua kalinya ia bertemu gadis itu di pengadilan negeri di daerah an g i n mamiri

itu. Ketika itu ia tengah menangani sebuah kasus, dan si gadis yang belakangan diketahui bernama Almiah itu telah menjalani sidang tilang. Disanalah awal perkenalan berlangsung. Getaran di hatinya yang sebelumnya muncul pada pertemuan pertama itu berganti keyakinan bahwa gadis pemilik paras cantik yang ada di depannya itulah yang akan menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya kelak.

Gayung bersambut, Almiah pun merasakan hal yang sama. Namun sebagaimana aturan dalam keuangannya, dimana tak ada istilah pacaran. Maka Almiah pun “menantang” Sarif untuk melamarnya. Tak perlu berpikir lama bagi Sarif untuk menjawab tantangan sang gadis.

“Dia kan orang Sulawesi Tengah, ketika itu ya saya terima tantangannya, kalau memang serius katanya silahkan datang melamar. Karena keterbatasan biaya saya datang melamar sendiri ke kedua orangtuanya dan langsung menikahinya. Dia sendiri sampai bingung. Tapi kan saya punya niat baik, dan membuktikan keseriusan,” kisah pria kelahiran Palopo, 6 Agustus 1966 ini.

Tepat 19 Februari 1992 Sarifuddin resmi menikahi Almiah Hamid. Keduanya pun kembali ke Makassar. Disinilah awal hidup baru keduanya berlangsung. Masih diingatnya ketika itu ia bergaji 190 an ribu. Gaji sebesar itu tentu tidak cukup baginya untuk membelikan rumah bagi istrinya. Kebetulan ketika itu rumah salah satu kakaknya di sebuah perumnas belum ditinggali. Dengan berbekal satu tikar, dua bantal dan beberapa peralatan makan sekedarnya, keduanya memasuki rumah itu.

Diam-diam, kedua mertuanya memberikan uang sekitar 200 jutaan sebagai modal keduanya dalam mengarungi hidup baru. Sang istri pun tak kuasa menceritakan hal itu kepada Sarif. Kontan, hal itu ditolaknya. Ia meminta istrinya untuk mengembalikan uang itu kepada kedua orangtuanya.

“Saya minta istri saya kembalikan uang itu, saya tidak mau jadi beban keluarganya. Ini tanggung jawab saya, dan saya katakan ke istri bahwa saya akan berupaya untuk berjuang merubah itu semua,” tegas Sarifuddin.

Allah SWT mendengar doa dan usahanya. Kondisi ekonomi Sarif pun mulai berubah. Saat itu muncul peraturan baru, dimana pengacara di LBH diperbolehkan menangani perkara di luar kasus LBH. Kebebasan menangani perkara umum itu tentu menjadi “berkah” tersendiri bagi para pengacara LBH, termasuk Sarif. Ia pun kemudian dipercaya menangani berbagai kasus umum.

Dari sana ia mendapat honor pengacara,



Cinta pada pandangan pertama

terlebih lagi ketika ia memenangi kasus yang ditanganinya. Tak ayal dari sana pundi-pundi pun terkumpul. Perlahan ia mulai membeli berbagai peralatan rumah tangga layaknya keluarga lainnya. Bahkan untuk mendukung aktivitasnya yang semakin padat, ia pun membeli mobil.

PERJUANGAN DALAM HUKUM DAN POLITIK

Media massa menjadi salah satu bagian yang ikut mendukung bagi peningkatan karirnya. Lewat media massa tersebar informasi keberhasilannya dalam menangani berbagai kasus. Salah satunya keberhasilannya memperjuangkan hak kepemilikan lahan 120 Kepala Keluarga Petani Jeruk di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Namun yang paling berkesan sekaligus “mencekam” baginya adalah ketika ia membela salah seorang petani di Makassar yang mengalami cacat (buta) seumur hidup akibat dianiaya oknum ABRI (TNI-red) ketika itu. Lewat Mahkamah Militer, Sarif menggugat oknum tersebut. Ia pun memenangkan perkara itu.

“Lewat kemenangan itu saya mengajukan tuntutan ke Pangdam VII Wirabuana ketika itu. Beberapa kali saya dipanggil tapi saya tidak datang. Untuk ketiga kalinya saya dijemput. Dan selama satu kali dua puluh empat jam diinterogasi. Saya diminta mencabut tuntutan pembelaan tersebut. Tapi saya tetap bersikeras untuk tidak mencabutnya, karena memang klien saya tidak ingin mencabut tuntutan itu,” jelasnya.

Walaupun pada akhirnya di persidangan, tuntutan tersebut tidak dikabulkan, dan ia kalah. Namun bagi Sarif itu menjadi sebuah pembelajaran bagi penguasa ketika itu untuk tidak sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Langkah itu semakin membuktikan perjuangannya dalam melawan hirarki kekuasaan orde baru.

Di sisi lain itu menimbulkan kepuasan batin tersendiri bagi dirinya, sekaligus menambah kepercayaan publik padanya. Bahkan karena kesertaannya menangani

sebuah perkara jualah yang menuntunnya hijrah ke ibukota.

Doa ibu dan istri menjadi “modal” utama bagi dirinya dalam meniti karir di ibukota. Berkat doa keduanyalah karir Sarif di ibukota semakin berkibar. Ia berhasil mendirikan kantor pengacara sendiri di gedung Manggala Wanabhakti.

Nama Sarifuddin Suding sebagai seorang pengacara pun semakin melambung. Salah seorang rekan Sarif mengajaknya masuk dalam dunia politik dan bergabung dalam sebuah partai politik, HANURA (Hati Nurani Rakyat).

Tak berbeda jauh dengan karirnya di bidang hukum, di politik karir Sarif pun cukup bersinar. Dua kali lolos menjadi calon legislatif (caleg) untuk daerah pemilihan yang notabene merupakan kampung halamannya menjadi salah satu bukti kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.

mengaku tidak ada target jabatan atau posisi khusus

LEMBUT MENDIDIK ANAK

Pengalaman mendapatkan didikan “keras” dari sang ayah memang sangat dirasakan manfaatnya saat ini. Meski demikian, ia tak kuasa untuk menerapkannya kepada keempat buah hatinya, Amaliah Damayanti Sudding, Azizha Multhazam Sudding, Azihul Faqih Sudding, Azhelia Fadhilah Sudding dan (Almh) putri tercintanya Astri Mulyasari Sudding yang sudah lebih dahulu menghadap Sang Khalik.

Dari sana tak berlebihan jika kemudian ada pertentangan antara dirinya dan sang isteri dalam hal mendidik sang buah hati. Namun karena aktivitasnya yang cukup pada di luar rumah, maka ia harus menyerah dan mempercayakan sang isteri untuk memilih cara dan



Menyerahkan pendidikan anak-anak kepada sang istri

Pengalamannya sebagai seorang pengacara yang bicara atas dasar bukti dan fakta menjadi bekal tersendiri baginya saat duduk menjadi anggota Komisi III DPR RI yang bermitra dengan lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM.

Sarifuddin menganggap tugas dan dan kewajibannya sebagai wakil rakyat menjadi bagian dari baktinya kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu ia

strategi dalam mendidik sang buah hati. Terlebih lagi saat ini kondisi sosial masyarakat berbeda dari jamannya dahulu ketika ia kecil.

“Saya hanya katakan kepada anak-anak, bahwa saya sudah merasa berhasil sebagai orangtua ketika anak-anak saya tidak menyentuh Narkoba. Oleh karena itu saya tidak akan mendesak anak-anak untuk menekuni bidang atau profesi seperti saya,” pungkasnya. (AYU) FOTO: JAKA, ANDRI, DOK. PRIBADI/PARLE/IW



*Tim Panja Pertanahan
Komisi II DPR bersama
Sekda, Kepala BPN
Prov. Lampung*

KOMISI II PANTAU PERSIAPAN PILKADA SERENTAK DAN PERMASALAHAN TANAH

Di sela-sela kesibukannya menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja membahas RAPBN 2016, Komisi II tetap melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan mengirim Tim Panja Pertanahan ke Provinsi Lampung dan Tim Pemantau Pilkada Serentak ke Provinsi Sumatera Utara.

Kunjungan kerja Spesifik tersebut dilakukan pada akhir September lalu. Tim Pemantau Pilkada dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Rambe Kamarul Zaman sementara Panja Pertanahan dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Reza Patria.

Menurut Ahmad Riza, kunjungan kerja spesifik ke Lampung kali ini dilatarbelakangi maraknya konflik dan sengketa pertanahan di daerah ini dan juga di daerah lain seluruh Indonesia. Masalah konflik tanah merupakan persoalan besar bagi bangsa karena tidak ada kunjung penyelesaian. Masalahnya bukan makin reda justru bereskalasi dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan anarkis yang merugikan semua pihak.

Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama dibiarkan dan semakin berlarut-larut dan

kemudian menjadi kasus yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk dipecahkan. Dengan akan dibahas RUU Pertanahan, dia berharap dapat mempermudah penyelesaian kasus-kasus tanah.

“Komisi II DPR bertekad akan bisa menyelesaikan RUU Pertanahan guna menjawab permasalahan pertanahan yang terjadi. RUU Pertanahan diharapkan menjadi karya besar DPR yang dapat mempermudah penyelesaian kasus-kasus tanah,” ungkap anggota Tim Budiman Sudjatmiko saat pertemuan dengan Sekda, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung beserta jajaran serta Dirjen Penanganan Masalah Agraria Bambang Tri Suryo Binantoro.

Betapa strategisnya masalah pertanahan yang harus segera diatasi, sebab berdasarkan data dari penelitian IPB dan mantan Kepala BPN Joyowinoto, 56% asset nasional kita hanya dikuasai oleh 0,2% penduduk atau 400 ribu orang saja dan 240 juta orang di Indonesia. Artinya tanah kita, tambang, hutan, gunung, sungai dikuasai hanya oleh 400 ribu orang. Dimana 87% dalam bentuk penguasaan atas tanah sehingga tingkat ketimpangan atas

tanah adalah 0,6 artinya melampaui koefisien dini atau ketimpangan rata-rata nasional 0,43. Sementara tanah 0,6-07 artinya melampaui ketimpangan rata-rata nasional dan banyak ukuran sudah melampaui titik ledak sosial yang luar biasa, itu kalau di luar negeri sudah jadi perang saudara.

Untuk berbagai kasus tanah di Lampung ini diusulkan gelar perkara dengan melibatkan masyarakat, Pemda, BPN digelar perkara di DPR. Seperti kasus Mesuji yang lalu di DPR. Mesuji dipanggil ke DPR, kalau di Lampung agak susah karena ada emosi dan terkait soal keamanan.

“Supaya persoalan bisa jernih tanpa ada kekisruhan apapun, silahkan dari Gubernur, dari perusahaan gulunya *sugar corporation* juga ikut ada wakil petani. Kalau bisa sebelum akhir tahun, untuk mencegah jangan sampai berlarut-larut,” kata Budiman penuh harap.

KATEGORI MERAH

Sebelumnya, Ahmad Reza menegaskan, permasalahan tanah di Provinsi Lampung sudah masuk kategori merah. Ini ditandai dengan banyaknya kasus tanah yang rawan konflik. Bahkan, beberapa diantaranya telah menimbulkan korban jiwa. Kedatangannya di Lampung, selain untuk menggali permasalahan tanah, juga ada laporan masyarakat yang ingin kasus-kasus tanah bisa segera diselesaikan.

Kehadiran investor penting, tapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian kasus tanah. Kepentingan rakyat kecil jangan dikorbankan. Umumnya, lanjut Riza, dalam sengketa tanah, pengusaha selalu menang dan diuntungkan. Sementara rakyat kecil selalu dirugikan. Dan umumnya pula pejabat di instansi manapun tidak sedikit yang pro pengusaha ketimbang pro rakyat.

Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah mencanangkan program-program pro rakyat dan Dewan juga secara konsisten akan mendukungnya. “Karena kita harus sama-sama, baik pejabat maupun DPR dukung

program pro rakyat. Kita diuji menyelesaikan kasus-kasus tanah di Lampung ini,” tegasnya.

Riza mendukung pernyataan rekan-nya Yandri Susanto agar penyelesaian tanah di Lampung ini dijadikan pilot proyek penyelesaian tanah secara nasional. Karena itu pula Riza menegaskan, “Siapapun pengusahanya, siapapun *backing*-nya, dan apapun risikonya akan kita hadapi. Kalau kita benar, Allah akan berpihak pada kita.” Ditegaskan lagi pihaknya siap hadapi pejabat dan pengusaha yang tidak pro rakyat.

PILKADA AMAN DAN DEMOKRATIS

Dalam rangka evaluasi dan proses persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman, mengatakan Pilkada harus terlaksana secara aman dan demokratis.

“Bagi Komisi II Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 harus berjalan aman, tertib dan demokratis,” kata Rambe, di Kantor Gubernur Sumut akhir September lalu.

Menurutnya, ukuran demokratis yang dirumuskan ada 3, diantaranya tahapan-tahapan pilkada sebagaimana

tidak harus dicek betul,” kata Rambe. Misalnya orang yang memilih di Kota Binjai adalah orang yang tinggal dan memiliki KTP di Binjai. Selain itu, aturannya PNS ataupun SKPD tidak boleh ikut campur pelaksanaan kampanye Pilkada. “Kita menginginkan Pilkada lebih baik dari pada yang lalu-lalu,” tegasnya.

Plt. Gubernur Provinsi Sumatera Utara menjelaskan dari 33 Kabupaten/kota, 23 diantaranya akan melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2015. Dari 23 kabupaten/kota tersebut, terbagi atas dua kelompok, kelompok pertama 14 kabupaten/kota yang kepala daerahnya sudah habis masa jabatan sebelum masa Pilkada dimulai, sedangkan 9 lainnya akan habis masa jabatan setelah Pilkada.

“Jumlah peserta pemilih adalah 6.807.340 orang. Ada 61 pasangan calon berasal dari partai politik, dan 14 pasangan calon dari perseorangan,” paparnya. Terkait kemungkinan potensi konflik yang akan terjadi pada Pilkada ini, yaitu pada tahap pemutakhiran data, *black campaign*, *money politics*, dan yang paling penting pada tahap pemungutan suara.

Selain itu, ketidaknetralan PNS dan masalah seperti pembiayaan oleh kabupaten/kota kepada penyeleng-



Tim Kunker Komisi II DPR kunjungi Prov. Sumut

aturan yang sudah dirumuskan bisa diselenggarakan secara konsisten. Tahapan itu misalnya sampai pada tahapan terakhir dari DPS hingga DPT harus *clear*.

“Jangan sampai lebih banyak yang memilih daripada DPT. Ini pilkada seren-

gara Pilkada karena masih menunggu proses APBD.” Kita berharap Pilkada ini bisa sukses dan diharapkan partisipasi masyarakat bisa di atas 70 persen,” tuturnya. (MP,AS) FOTO: AGUNG, MASTUR PRANTONO/PARLE/IW



Tim Pansus RUU Paten bertemu dengan Kapolda Sulawesi Selatan

MENDESENTRALISASI PATEN MENYADARKAN MASYARAKAT

Hak paten jadi instrumen penting untuk melindungi kekayaan bangsa. Birokrasi yang berbelit dan sentralisasi masih menjadi masalah yang mengganjal dalam mengakses hak paten. Masyarakat pun harus disadarkan pada pentingnya paten.

Diskusi mendalam terjadi saat Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten DPR RI berkunjung ke Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) akhir Oktober lalu. Akademisi, Kepolisian, pelaku usaha, Kemenkum HAM, hingga Pemprov Sulsel bertemu membicarakan persoalan paten. Pansus sedang menghimpun masukan penting dan berharga dari daerah.

Sentralisasi pengurusan paten ternyata dirasakan daerah begitu menghambat. Dampaknya, masyarakat jadi malas dan tak peduli pada paten. Padahal, banyak temuan dan produk di daerah yang perlu dipatenkan untuk melindungi karya anak bangsa. Pengurusan paten yang masih sentralistik di pemerintah pusat harus mulai dibagi ke daerah (desentralisasi). Dengan begitu, masyarakat bisa mengurus produk dan temuannya ke otoritas paten setempat.

“Ada semangat untuk segera merevisi UU Paten

yang sudah tidak bisa menjawab tantangan zaman. Perkembangan hukum dan masyarakat tidak bisa lagi ditampung dalam UU lama,” ungkap Syarifuddin Sudding Wakil Ketua Pansus Paten, saat memimpin diskusi Paten di Polda Sulsel. RUU yang hendak diajukan ini merupakan revisi atas UU No.14/2001 tentang Paten. Inisiatif revisi datang dari pemerintah. Kini, Pansus sedang menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

Sudding mengatakan, banyak perdebatan menyangkut pasal-pasal dalam UU Paten yang kini masih berlaku. Dalam diskusi itu mengemuka bahwa daerah menginginkan kemudahan pengurusan paten. Sebagian kewenangan pusat harus dilimpahkan ke daerah. Desentralisasi menjadi keniscayaan. Di Sulsel banyak produk kuliner belum dipatenkan. Masyarakat malas mengurus Paten, selain birokrasinya yang berbelit, biaya pengurusan juga dirasa mahal.

Pemprov Sulsel mengusulkan agar masyarakat di daerah bisa mengurus paten di daerahnya masing-masing dengan biaya yang ditekan semurah mungkin. Bahkan, diusulkan agar digratiskan saja. Usulan menggratiskan paten bagi para pelaku

UKM dan desentralisasi jadi usulan yang bisa dimasukkan dalam rumusan RUU ini. Dengan kemudahan akses paten dan nol biaya, masyarakat akan semakin antusias dan peduli terhadap pentingnya paten.

Nasir Djamil (F-PKS) menyampaikan, bila kelak ada desentralisasi paten, daerah harus sejak dini menyiapkan SDM dan sarannya penunjangnya. Bila tidak disiapkan, masyarakat tetap akan kesulitan mengurus paten. Tenaga penyuluh perlu pula disiapkan agar paten kian membumi di daerah.

Wakil Ketua Pansus Risa Mariska (F-PDI Perjuangan) yang juga ikut berdiskusi di Polda Sulsel, mengatakan, paten harus sudah jadi *mindset* masyarakat bahwa itu penting untuk melindungi haknya. Kesadaran masyarakat, kata Risa, sangat rendah terhadap paten. Untuk itu, perlu sosialisasi yang masif. Risa menambahkan, untuk memudahkan akses paten, birokrasinya memang harus disederhanakan.

Dan desakan agar biaya paten digratiskan, memang perlu jadi pertimbangan Pansus untuk merumuskan pasalnya dengan baik. Dalam naskah akademik RUU Paten, ternyata permohonan paten di Indonesia terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang menjadi anggota WTO.

Data pada 2013 tercatat hanya ada 7.450 paten yang diajukan. Bandingkan dengan Cina di tahun yang sama mencapai 825.136, disusul AS 571.612, Eropa 147.987, dan India 43.031.

DELIK PATEN

Dalam Pasal 157 UU No.14/2001 tentang Paten, delik yang digunakan adalah delik aduan. Dengan delik ini kepolisian dinilai pasif menegakkan hukum paten. Muncul desakan agar deliknya diubah menjadi delik formil atau biasa. Kepolisian bisa langsung bekerja saat terjadi pelanggaran paten, walau tak ada pengaduan dari pemilik paten. Selama ini banyak kasus pelanggaran paten yang tak diketahui oleh pemiliknya. Dan kepolisian kurang proaktif mengusut pelanggaran paten.

Perubahan delik itu sudah menjadi desakan publik. Dengan perubahan delik itu, ada perlindungan hukum dari para penegak hukum untuk pemilik paten. Kelak, masyarakat pemilik paten selain mendapat kemudahan mengurus paten dengan biaya murah juga plus mendapat perlindungan hukum. Inilah yang diharapkan publik kepada Pansus RUU Paten.

Kapolda Sulsel Pudji Harsanto, mengemukakan, sejauh ini di wilayahnya belum ada pelanggaran paten. Hak paten

memang sudah jadi kebutuhan bangsa. Negara harus hadir memberi perlindungan terhadap semua aset berharga yang dipatenkan, baik budaya, teknologi, temuan ilmiah, dan lain-lain.

Selain persoalan delik, sempat terwacanakan pula agar frasa pidana paten “paling lama” diubah menjadi “paling singkat”. Dalam Pasal 130 UU No.14/2001 disebutkan, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud pasal 16 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00”.

Syarifuddin Suding yang mewacanakan hal tersebut berharap, hukum paten betul-betul ditegakkan dengan merubah sanksi frasa menjadi “paling singkat” empat tahun seperti tersebut dalam pasal 130. Pemegang hak paten pun merasa dihargai dan mendapat perlindungan hukum yang cukup. Pada akhirnya, rumusan delik dan pidana paten akan kembali digodok oleh Pansus untuk mendapatkan rumusan pasal yang ideal.

Banyak catatan penting yang dibawa Pansus sebagai “oleh-oleh” dari Sulsel. Dalam kunjungan kerja ke Sulsel itu, hadir pula Anggota Pansus lainnya seperti Anas Thahir (F-PPP) dan Rohani Vanath (F-PKS). (MH) FOTO: HUSEN/PARLE/IW



Tim Pansus Hak Paten menggelar pertemuan di Polda Sulsel

DALAM PASAL 157 UU NO.14/2001 TENTANG PATEN, DELIK YANG DIGUNAKAN ADALAH DELIK ADUAN. DENGAN DELIK INI KEPOLISIAN DINILAI PASIF MENEGAKKAN HUKUM PATEN. MUNCUL DESAKAN AGAR DELIKNYA DIRUBAH MENJADI DELIK FORMIL ATAU BIASA. KEPOLISIAN BISA LANGSUNG BEKERJA SAAT TERJADI PELANGGARAN PATEN, WALAU TAK ADA PENGADUAN DARI PEMILIK PATEN.



BERHARAP BOROBUDUR MAKIN MENDUNIA

Borobudur, 16 Oktober 2015. Cuaca di sekitar candi Borobudur siang itu cukup terik. Selain karena masih dalam musim kemarau, pepohonan di arena candi terbesar dunia tampak kering meranggas. Dari ruang loby

Hotel Manohara di Kompleks candi, terlihat sejumlah turis asing maupun lokal berjalan menuju lokasi candi. Meski menjelang akhir pekan, tetapi pengunjung tidak begitu banyak. Hanya ratusan.

Paling tidak itulah kesan yang dijumpai Tim



Tim Kunker Komisi X DPR kunjungi Candi Borobudur

ngan wisatawan ke Borobudur ini diakui Plh. Dirut PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Purwanto.

Menurut dia, tahun 2010 jumlah pengunjung sebanyak 3,6 juta orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 5,1 juta orang terdiri 4,67 juta wisnus dan 448 ribu wisman. Dari data ini terungkap bahwa kunjungan wisatawan mancanegara sangat kecil sementara yang dominan dari wisatawan lokal atau wisnus (wisatawan nusantara).

Joko Suratno dari Asita Jateng juga mengakui terkait kunjungan wisman, Borobudur butuh promosi lagi karena menurunnya *rating* Borobudur. Target yang cukup banyak dicanangkan Angkor Wat (Thailand) sampai 8 juta dan Borobudur hanya ratusan ribu.

Anggota Tim Yayuk Sri Rahayuning-sih meminta apa yang dikeluhkan *stake holder* (pemangku kepentingan) obyek wisata Candi Borobudur perlunya kerja sama meningkatkan infrastruktur bisa direalisasikan Pemprov Jawa Tengah. Termasuk peningkatan kualitas Bandara Ahmad Yani Semarang sebagai salah satu pintu gerbang masuknya wisatawan ke Jawa Tengah.

Khusus untuk Candi Borobudur yang merupakan warisan dunia ini harus diusahakan betul-betul jangan sampai kalah dengan Bali. “Jangan kalah dengan Bali. Bali warisan nasional atau warisan Indonesia, sementara Borobudur adalah

warisan dunia,” tegasnya.

Meski lokasi tempat tinggalnya tidak jauh, Yayuk yang juga Ketua Tim Kunspek Komisi X Abdul Kharis sama-sama dari Dapil Jateng, namun baru sekali ke Borobudur ketika siswa SD. “Jadi potensi wisnus sendiri masih sangat besar, terutama anak-anak sekolah perlu dikenalkan bahwa ada keajaiban dunia- Borobudur,” tegas Yayuk.

Sementara Kemenpar yang men-canangkan beberapa promosi Borobudur di luar negeri diharapkan lebih gen-car lagi karena popularitasnya menurun, padahal seharusnya kita bangga. “Bandingkan dengan Bali, setiap kuil di Bali bisa jadi obyek, tapi ini yang sudah ada di depan mata, tidak ditangani dengan serius,” tekan dia.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi X DPR Esti Wijayati menyatakan terkejut dengan minimnya target kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah termasuk Borobudur. Pada tahun 2015 ini secara nasional pemerintah menargetkan 10 juta wisatawan dan tahun 2016 meningkat menjadi 12 juta.

Pada tahun ini data wisatawan yang berkunjung ke Jateng hanya 400 ribu, berarti target wisata ke Jateng hanya 4% sementara potensinya ada 4 destinasi skala nasional. Yogya yang kecil wisman diatas 300 ribu yang ke Prambanan 180 ribu hampir sama dengan yang ke Borobudur.



Tim Kunker Komisi X DPR berpose di depan Candi Borobudur

Kunker Spesifik Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Abdul Kharis Al-Masyhari mengunjungi Borobudur dan berdialog dengan pemangku kepentingan turis Jateng. Kesan minimnya kunju-



Tim Kunker Komisi X DPR saat meninjau destinasi wisata religi Syekhona Kholil, Bangkalan, Madura

“Sepertinya perlu digarap lebih serius, dan bagaimana mendorong supaya pintu masuk wisman tidak hanya Bali, Batam, Jakarta. Tetapi ke Jateng melalui Semarang perlu didorong menjadi salah satu pintu masuk bandara, sebab ini salah satu kendala,” ungkap politisi PDI Perjuangan di Borobudur baru-baru ini.

Yang juga disesalkan, untuk mengurus perpanjangan imigrasi harus ke Wonosobo sementara banyak wisman

menuju Borobudur lewat Magelang. Mengapa mengurus perpanjangan imigrasi kantornya di Wonosobo. “Kita mengusulkan ke pemerintah pusat agar perpanjangan imigrasi dipindah ke Kabupaten Magelang lebih efektif,” tegasnya.

PERCANTIK BANDARA AHMAD YANI

Anggota Dewan asal Dapil Yogya-

karta ini menilai kesiapan Pemda cukup penting bagaimana supaya mendorong bandara Semarang sebagai pintu masuk. Kondisi bandara Ahmad Yani sudah berstatus bandara internasional, perlu dipercantik. “Ini menjadi PR pemerintah, apalagi Kemenpar sudah menjanjikan kepada Komisi X bila wilayah dirasa mendukung dalam peningkatan wisatawan, maka bisa *diback up* di Komisi V atau Kementerian PU untuk diperjuang-



kan,” tegas Esti dengan menambahkan, kita bersama-sama berjuang agar Bandara Ahmad Yani bisa menjadi pintu utama masuknya wisatawan ke Jawa Tengah.

Mantan artis Krisna Mukti yang kini anggota Komisi X DPR mengisahkan pengalamannya mengajak ekspatriat mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Belum lama ini ia mengajak rekan-rekan ekspatriat dari

Europa, China dan Korea ke Borobudur dan hanya terkesan pada candinya saja yang mengagumkan. Mereka ingin tahu sejarahnya, siapa yang membangun dan kemudian foto-foto.

“Namun saat ditanya apakah akan mengunjungi Borobudur lagi, dijawab tidak. Sedangkan kalau ke Bali, bisa berkali-kali. Alasannya, Borobudur tidak ada *café*, dan tidak bisa *kongkow-kongkow*, sementara pulau dewata lengkap dengan selera wisman,” kata Krisna saat mengunjungi Borobudur bersama Tim Komisi X DPR belum lama ini.

Menurut politisi PKB ini, salah satu contoh para ekspatriat itu menginginkan suasana santai di kafe, minum dan ngobrol bisa berjam-jam. Mereka menyarankan, kenapa di Borobudur tidak dibuat kafe-kafe, seperti Mac Donald yang berciri khas Borobudur atau berciri khas Magelang yang disuguhkan dengan taste internasional seperti Bali.

“Di Bali juga hanya warung-warung biasa tetapi penjual dan pelayanannya ramah, mau ngobrol bisa sedikit bahasa Inggris. Penyajiannya juga dengan taste internasional. Kami juga ingin melihat keindahan sore Borobudur sambil ngopi, ngobrol melihat pemandangan sekitar. Atau malam-malam bisa ngobrol sampai larut malam sambil melihat keindahan candi, namun disini nggak ada,” tutur Krisna.

Selain itu, sambung dia, Borobudur kurang terasa tradisi Jawanya seperti Yogya atau ketika turis tiba di Bali. Ketika masuk bandarannya, suasana Bali saja sudah terasa. “Di Borobudur, suasananya tanggung, desa tidak, kota juga tidak. Mereka ke sini mau lihat keotentikan, keaslian *home stay* tapi kecewa rumah-rumah yang didatangi rumah biasa, tembok suasana Jawa khas jaman dulu tidak ada,” keluhnya.

Karena itu dia berharap Pemkab Magelang bisa lebih kreatif, inovatif mempunyai terobosan baru supaya orang mau datang lagi ke Borobudur tidak cuma sekali untuk seumur hidup. Selain itu perlu dibuat film promosi yang mudah di akses ke seluruh dunia sehingga bisa menggelitik turis mancanegara mengunjungi Borobudur

dan destinasi wisata di Jateng lainnya.

WISATA RELIGI JATIM

Komisi X DPR mengapresiasi potensi wisata religi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR, sekaligus Ketua Tim Kunjungan Spesifik, Nuroji, usai meninjau beberapa situs destinasi religi di Provinsi Jawa Timur, pertengahan Oktober lalu.

“Wisata religi ini sangat luar biasa jumlah peziarah yang datang setiap harinya. Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu bisa mencapai 8.000 orang. Tentu ini merupakan potensi yang luar biasa,” apresiasi Nuroji.

Namun, lanjut politikus F-Gerindra itu, pihaknya masih menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan wisata religi ini. Yakni, masih dikelolanya destinasi religi itu oleh pihak keluarga.

“Kedepannya, harus ada kontribusi wisata religi terhadap pendapatan daerah, serta keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat,” saran politikus asal dapil Jawa Barat ini.

Sebelum meninjau destinasi religi Tim Kunker Spesifik diterima Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Syaefullah Yusuf, Bupati Bangkalan, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Pimpinan dan Anggota DPRD Bangkalan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Pengurus Asita, BPPI serta tokoh agama/tokoh masyarakat dan pegiat pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, Provinsi Jawa Timur memiliki kekayaan luar biasa dalam hal destinasi wisata religi, antara lain Makam Sunan Ampel di Surabaya, Makam Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Makam Sunan Drajat dan Makam Sendang Duwur di Lamongan.

“Kemudian, ada Makam Bung Karno di Blitar, Gereja Puh Sarang di Kediri, Pura Mandagiri di Lumajang, Makam Sunan Bonang di Tuban dan Makam Waliyullah Syaichona Cholil di Bangkalan,” papar Wagub. (MP,HR) FOTO: MASTUR PRANTONO, EKA HINDRA/PARLE/IV



Tim Panja Pendis Komisi VIII DPR saat meninjau Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palu, Prov. Sulteng

KOMISI VIII BENAHU SISTEM PENDIDIKAN ISLAM

Di masa sidang I di Tahun 2015-2016 ini, Komisi VIII salah satunya bertekad untuk membenahi sistem pendidikan Islam yang terjadi di negeri ini lewat Panja (Panitia Kerja) Pendidikan Islam (Pendis). Panja Pendis mengunjungi dua daerah secara bersamaan, yakni Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah guna melihat realita yang terjadi dan menampung aspirasi terkait sistem pendidikan Islam.

PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH, GAJI GURU MADRASAH MINIM

Tim Panja Pendis NTB ini menemukan sejumlah temuan terkait tentang Pendidikan Islam yang ada selama ini. Diantaranya penyerapan anggaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian

Agama (Kemenag) NTB per tanggal 9 Oktober yang masih rendah. Padahal beberapa bulan lagi masa anggaran 2015 akan segera berakhir.

Diungkapkan Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay saat memimpin pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenag beserta jajarannya Jumat (9\10), anggaran Kemenag Provinsi NTB hanya sekitar 7 Miliar, namun tidak dipergunakan dengan baik. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan dengan anggaran itu, terutama untuk peningkatan kualitas keagamaan masyarakat NTB, khususnya dalam bidang pendidikan agama, baik Islam, Kristen maupun agama lainnya. Seperti peningkatan sarana dan prasarana pondok pesantren, dan lain sebagainya.

Dalam pertemuan itu Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Sulaiman Hamid mengungkapkan alasan lambannya penyerapan anggaran Kemenag di wilayahnya. Diantaranya seringnya revisi anggaran di tengah atau di akhir tahun sehingga menyebabkan terhambatnya waktu pelaksanaan anggaran. Diantaranya adanya kebijakan perubahan akun 57 tentang bantuan sosial, menjadi akun 52 (belanja barang) pada program BOS (bantuan operasional sekolah) dan bantuan rehabilitasi gedung madrasah.

Selain itu, kebijakan verifikasi sasaran bantuan rehabilitasi pada DIPA Kanwil Kemenag Provinsi oleh Irjen Kemenag RI menjadi salah satu hambatan dalam proses eksekusi anggaran rehab, karena harus menunggu verifikasi dan rekomendasi dari Irjen.

Namun belakangan terbit PMK (peraturan menteri keuangan) 168 dimana Kementerian/lembaga bisa mencairkan secara langsung seperti akun 57 (bansos) diyakini Sulaiman akan mempercepat penyerapan sisa anggaran Kanwil Kemenag NTB yang sebesar 70 persen lagi.

“Sebenarnya semua itu tidak akan jadi hambatan jika semua bisa berkoordinasi dengan baik, dan penggunaannya pun sesuai dengan tujuan atau peruntukannya,” ungkap Saleh.

Selain penyerapan yang sangat rendah, di NTB ini, Anggota Komisi VIII lainnya, Rahmat Hidayat juga menemukan guru-guru agama dan madrasah di pelosok-pelosok NTB berpenghasilan sangat rendah, sebesar Rp 220 ribu per bulan.

Bahkan salah seorang Kepala Madrasah di NTB, Nurul Zanah menambahkan bahwa gaji atau honor tersebut belakangan tidak dapat diterima oleh sebagian besar guru madrasah. Pasalnya ada peraturan baru dimana guru yang mendapatkan honor tersebut harus memiliki NUPTK (nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan).

Menanggapi hal itu Saleh P Daulay, yang didampingi Wakil Ketua Komisi VIII, Abdul Malik Haramain, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya, M. Nur Purnamasidi, Khatibul Umam Wiranu, An'im Mahrus, Abdul Fikri Faqih, Ruskati Ali Baal, M. Fauzan dan Muhammad Lutfi sepakat untuk membahas hal ini kepada Kemenag RI.

Sementara itu direktur pendidikan madrasah Kementerian Agama, Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa UKG atau uji kompetensi guru dan adanya NUPTK merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Kementerian Agama sebagai bagian dari sub kependidikan hanya mengikuti peraturan yang ada.

BANYAK MADRASAH BELUM TERAKREDITASI

Tidak berbeda jauh dengan realita yang ada di Provinsi NTB, Tim Panja Pendis juga menemukan sejumlah permasalahan di Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi tata kelola dan terkait anggaran perlu dicarikan jalan keluarnya. Sarana, prasarana, pembiayaan pendidikan dan kualitas madrasah serta pondok pesantren.

“Kurangunya jumlah guru agama baik yang PNS maupun Honor belum mendapat perhatian serius, terutama

kualifikasi dan kesejahteraan,” ungkap Deding Ishak dalam pertemuan Tim Panja Pendidikan Islam Komisi VIII DPR RI dengan Asisten I Setdaprov Sulteng Arief Latjuba, Kakanwil Kemenag Sulteng Zulkifli Tahir beserta jajarannya, di Sulteng, Jum'at (9/10).

Fakta menunjukkan bahwa sebagian madrasah terutama madrasah yang belum terakreditasi mengalami kesulitan untuk mewujudkan tata kelola administrasi modern yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, kata Deding.

Dalam konteks pendidikan, jelasnya, tata kelola administrasi yang baik dan akuntabel merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah. Saat ini kata politisi Partai Golkar wacana untuk menyatukan pengelolaan pendidikan Islam dibawah

bahwa bansos tidak dilakukan melalui transfer tunai atau uang tapi menjadi belanja barang. “Masalah perubahan kebijakan bansos tersebut merupakan kendala yang menghambat dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam,” ujarnya.

Sementara Kepala Kanwil Kemenag Sulteng, Zulkifli Tahir membenarkan bahwa posisi madrasah dan pondok pesantren yang sebagian besar merupakan lembaga swasta, sebagian besar tersebar hingga ke daerah pedesaan, bahkan di daerah terpencil menempatkan madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sangat berperan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin di daerah-daerah yang sulit terjangkau layanan pendidikan.



Ketua Komisi VIII DPR Saleh P. Daulay bersama anggota Komisi VIII lainnya

Kemendikbud mencuat kembali. Dimana hal tersebut perlu dianalisa lebih lanjut mengenai dampaknya pada perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

“Wacana ini tidak sesuai dengan amanat UU No.20 Tahun 2003, bawah madrasah adalah satuan pendidikan umum yang mempunyai kekhasan agama Islam dibawah binaan Menteri Agama,” tegasnya.

Lebih jauh, Deding menjelaskan bahwa permasalahan bantuan sosial (bansos) untuk madrasah terbentur dengan peraturan Kementerian Keuangan

Satu hal lagi yang perlu menjadi catatan kata Zulkifli bahwa ada satu kabupaten di Sulteng (Kabupaten Sigi) yang belum memiliki madrasah negeri untuk semua jenjang. Dia menambahkan dalam rangka mendukung optimalisasi percepatan pembangunan pendidikan agama dan keagamaan Islam, maka untuk tahun 2016 dibutuhkan tambahan dukungan anggaran untuk merehabilitasi berbagai fasilitas dan prasarana pendidikan, harapnya. (AYU & IWAN) FOTO: IWAN ARMANIAS, AYU/PARLE/IW



Anak jalanan rentan terhadap pelecehan seksual

TAK CUKUP DIKEBIRI, PENJAHAT SEKS HARUS DIHUKUM MATI

Menurut data, di tahun 2015 ini kekerasan seksual dan tindak pidana terhadap anak dari segi kualitas dan kuantitas menunjukkan kenaikan dengan persentase kenaikan sekitar 15% dari tahun lalu. Tingkat pelecehan seksual kepada anak-anak ini sudah pada tingkat mengkhawatirkan sehingga perlu usaha maksimal untuk bisa memperkecil peluang terjadi kasus itu.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual dan kejahatan pada anak-anak ini membuat geram pemerintah. Pemerintah akan menambahkan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak ini. Pasalnya sanksi bagi pelaku kejahatan seksual selama ini dianggap terlalu ringan.

Hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak-anak yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu minimal tiga tahun, dan maksimal 15 tahun penjara. Pemerintah menganggap hukuman ini tidak menimbulkan efek jera.

Salah satu bentuk hukuman

yang menjadi kajian pemerintah adalah kebiri kimia. Sejumlah negara yang disebut telah menerapkan hukuman kebiri kimia itu antara lain Korea Selatan, Turki, dan Moldova. Diharapkan hukuman kebiri ini dapat memberikan efek jera dan bisa membuat orang harus berpikir seribu kali kalau akan melakukan keja-

hatan seksual pada anak.

Sebagai landasan hukum, pemerintah sedang mempertimbangkan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan pada anak. Maksud diterbitkannya Perppu, karena kalau merevisi undang-undang akan lebih lama prosesnya, sementara tuntutan tentang perlindungan bagi anak-anak ini sudah semakin mendesak.

Namun bagi politisi Gerindra Mohammad Syafei, sanksi kebiri tidak cukup, pelaku kekerasan seksual pada anak harus dihukum mati. Apakah ada jaminan, tegasnya, dengan sanksi kebiri ini maka semua kasus itu akan tereliminasi.

Lebih lanjut ia menambahkan, mungkin untuk menghentikan hasrat seksual si pelaku hukuman ini bisa, tapi apakah kebiri ini bisa serta merta menghentikan apa yang menjadi akumulasi dari penyebab ia melakukan kejahatan itu, misalnya kemarahan dan dendam si pelaku.

“Saya melihat lebih komprehensif karena orang melakukan tindak kekerasan pada anak belum tentu hanya hasrat seksual. Bisa saja merupakan akumulasi dari pengalaman sendiri, keluarganya atau dia saksikan sendiri, sehingga apa yang dilakukannya selain hasrat seks ada pelampiasan kemarahan balas dendam,” katanya kepada Parlementaria.

Lebih jauh, politisi Dapil Sumut ini menyatakan, cenderung kejahatan seks seperti ayah pada anaknya, kakak pada adiknya atau guru kepada muridnya, harus ada pemberatan hukuman. Atau bila perlu hukuman mati sebab dalam Islam hukuman mati tidak dilarang. Bahkan merupakan perintah. “Diwajibkan atas kamu melakukan qisos terhadap pembunuh,” ujarnya mengutip salah satu ayat Al-quran.

Menurutnya, pembunuh disini tidak langsung pembunuhan fisik. Anak-anak korban kekerasan seks terbunuh masa depannya, kemudian marah, emosi, dendam sehingga tertutup masa depannya. Sama dengan kejahatan korupsi yang membunuh banyak peluang.

“Pelaku kekerasan seks terhadap

anak, atau guru yang menggagahi muridnya harus dihukum mati. Mereka membunuh masa depan anak-anak, cita-citanya,” katanya lagi

Ia mengakui, dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kebiri hingga kini belum ada dan direncanakan diterbitkan peraturan baru. “Daripada menunggu hukum yang baru, mending hukuman mati saja,” katanya dengan menambahkan, beberapa negara telah mempratekkan hukuman kebiri seperti Israel, Rusia dan Polandia.

Dalam kaitan ini perlu dipelajari juga terhadap negara yang sudah mempraktekkan itu bagaimana dampak terhadap kekerasan seks terhadap anak. “Kalau efektif, nggak apa langsung dilakukan di Indonesia. Namun Kalau kurang efektif, perlu kajian-kajian,” papar dia.

Sesuai data yang ada, Syafei menyebutkan, kasus kejahatan seks terhadap anak tidak pernah menurun bahkan dari tahun ke tahun selalu naik dan tahun ini sudah mencapai 5.000 an kasus. “Ini luar biasa, kejahatan seks terhadap anak merupakan kejahatan setara bandar narkoba, koruptor kakap dan teroris yang layak dihukum mati,” tandas Syafei.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini kembali menegaskan, lebih bagus dihukum mati saja pelaku tindak kekerasan seksual pada anak ini ketimbang di kebiri. Dengan hukuman kebiri kita perlu membuat peraturan baru. “Apalagi yang kita ha-

rapkan pada orang yang telah memati-kan masa depan anak-anak,” imbuhnya.

Ia menegaskan, jika hukuman kebiri yang dijatuhkan maka masih banyak implikasi-implikasi yang ditimbulkan. Dimana pelaku masih bisa melakukan kejahatan pada anak, yang tidak dapat dia lakukan adalah kejahatan seksual dengan alat seksnya. Bisa saja dia melakukan kejahatan seks dengan tangannya atau dengan alat lain. “Karena seperti yang telah saya katakan tadi, dia melakukan kejahatan bukan semata-mata hasrat seksual tapi akumulasi dari berbagai sebab,” mantapnya.

“Kita berharap, ke depan anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, memiliki masa depan yang cerah. Tentunya menjadi aset yang luar biasa untuk kemajuan bangsa kita kedepan,” tegasnya.

(SC) FOTO: IWAN ARMANIAS, RIZKA/ PARLE/IW



Anggota Komisi VIII Muhammad Syafei

DPR PIMPIN ORGANISASI PARLEMEN GLOBAL ANTIKORUPSI

Matanya menatap tajam ke arah pembicara yang berada di mimbar depan. Sekali waktu dia menggigit bibir, dahi berkerut, kentara ia sedang memikirkan sesuatu. Sementara rekannya di sebelah sambil mengangguk-angguk – mencerna pembicaraan nara sumber yang semua dalam bahasa asing. Sambil menyender ke bangkunya ia menerawang ke atas mencermati ornamen Ruang Kesultanan Hotel Ambarukmo, salah satu gedung megah kebanggaan rakyat Yogyakarta ini. Itu ekspresi dua mahasiswa yang mengikuti jalannya Sidang Umum keenam GOPAC (*Global Organization for Parliamentarians Against Corruption*), 5-7 Oktober 2015. Sebagai pengamat belasan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia ini duduk di bagian belakang ruang sidang leluasa mencermati interaksi anggota DPR RI dengan koleganya sesama anggota parlemen antikorupsi dari 74 negara.

“Senang bisa mengikuti sidang bersama parlemen dunia dan jadi tahu bagaimana korupsi sebagai musuh bersama di dunia. Saya melihat DPR punya niat besar untuk memerangi korupsi, tetapi memang perlu upaya luar biasa karena korupsi sudah seperti penyakit yang susah dihilangkan,” kata Wahyu dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mahasiswa yang baru saja menyelesaikan kuliah jurusan antropologi ini juga sempat berdialog dengan sejumlah anggota parlemen anggota GOPAC yang aktif mengkampanyekan antikorupsi di negaranya. Bicara pada kesempatan berbeda Ranal Fadhilah mahasiswa jurusan manajemen Perbanas, Jakarta mengaku sangat beruntung bisa selama tiga hari berada di tengah persidangan. Baginya upaya memerangi korupsi adalah upaya yang harus dilakukan terus menerus.

Ia juga mengapresiasi dari 560 anggota DPR hanya 40an orang yang bersedia aktif menjadi anggota GOPAC. Menurutnya tentu tidak mudah memutuskan untuk menjadi anggota parlemen pegiat anti korupsi. Setelah menyimak diskusi dan perdebatan, ia berkesimpulan Sidang Umum GOPAC di Yogyakarta berlangsung produktif.

“Saya melihat anggota DPR sangat dihormati

oleh koleganya sesamanya anggota GOPAC. Sebagai generasi muda saya punya harapan pada saatnya DPR harus jadi *role model* sebagai parlemen bersih,” tutur Ranti. Satu hal yang kemudian membuat Ranti tersenyum tiada henti adalah ketika ia pada akhirnya mendapat kesempatan berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang dalam sidang itu terpilih menjadi Ketua GOPAC, memimpin aksi kampanye organisasi parlemen global memerangi kejahatan luar biasa, korupsi.

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini terpilih menjadi Ketua GOPAC secara aklamasi dalam penutupan Konferensi GOPAC. Sebelumnya Fadli Zon merupakan kandidat tunggal dari SEAPAC (*Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption*) yang bersaing dengan kandidat dari regional lainnya yaitu John Hyde, politisi senior dari Australia dan juga Osei Kyei Mensah Bonsu dari Ghana. Ia menggantikan Ricardo Garcia Cervantes dari Meksiko setelah melalui sidang *board meeting* yang dihadiri oleh 5 perwakilan benua dan *regional chapter* seperti Afrika, Arab, Latin Amerika, South Asia, Oceania Karibia, North America.

“Saya melihat ini adalah kerja berat. Pertama menyangkut reputasi internasional GOPAC yang sudah cukup bagus, *standingnya* di dunia internasional dan kesempatan pertama bagi orang Indonesia, buat saya ini suatu amanah yang berat karena menyangkut nama baik dan *standing position* dalam pemberantasan korupsi itu sendiri,” katanya usai sidang. Selain itu, dengan jabatan ini, dirinya juga mendorong anggota DPR RI untuk lebih berkiprah di dunia internasional. Kepemimpinan GOPAC lainnya adalah, Wakil Ketua Paula Berto dari Amerika Latin dan Osei Kyei-Mensah-Bonsu dari Ghana. Sekretaris GOPAC Oceania, John Hyde dari Australia dan bendaharannya dari Karibia.

DEKLARASI YOGYA

Konferensi Keenam GOPAC juga menghasilkan Deklarasi Yogyakarta, yang berisikan dua puluh (20) butir deklarasi yang berasal dari inti sari enam sesi panel serta empat sesi dengan mitra GOPAC yang mencerminkan berbagai upaya yang dapat



Ketua Gopac Fadli Zon bersama jajaran Pimpinan terpilih lainnya

THE 6th GLOBAL CONFERENCE OF PARLIAMENTARIANS AGAINST CORRUPTION

Justice - Equity - Prosperity

6 - 8 October 2015, Yogyakarta, Indonesia



dilakukan oleh anggota parlemen dalam pemberantasan korupsi. Dalam deklarasi tersebut para peserta antara lain menyatakan dukungan dan solidaritasnya terhadap tujuan ke-16 dari SDGs terkait dengan pemerintahan dan korupsi. Deklarasi juga meminta negara-negara yang belum meratifikasi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) untuk meratifikasinya. Selain itu, deklarasi juga merekomendasikan kepada PBB untuk mempertimbangkan adanya sebuah Protokol UNCAC baru

dalam rangka membentuk sebuah pengadilan internasional untuk mengadili kasus korupsi skala besar. Lebih lanjut deklarasi mendukung negara-negara untuk melaksanakan praktik-praktik inovatif guna memitigasi tindak korupsi dalam kegiatan kampanye politik.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan menjadikan perang melawan *grand corruption* sebagai tema utama sidang umum kali ini adalah pilihan yang tepat. Menurutnya *grand corruption* atau korupsi kakap adalah kejahatan

an yang tidak hanya melibatkan jumlah uang yang besar tetapi juga melibatkan para pengambil kebijakan. Korupsi kakap telah merampas hak asasi manusia seperti hak untuk kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapat perlakuan yang sama. GOPAC pada konferensi kelima tahun 2013 telah bersepakat ingin memperluas penerapan instrumen hukum internasional sehingga dapat memberikan kewajiban bagi negara-negara di dunia untuk bekerja sama dalam upaya perlawanan terhadap korupsi.

Ia menyebut data fantastis dari Bank Dunia, aliran dana keluar negeri dari aktivitas kriminal, seperti korupsi dan pengemplangan pajak diperkirakan senilai 1-1,5 triliun dolar AS pertahun. Separuhnya berasal dari negara berkembang dan negara yang berada dalam masa transisi. Sementara dana untuk pencapaian program pasca-2015, SDGs (*Sustainable Development Goals*) diperlukan hanya 135 miliar dollar AS. Jika hasil dari *grand corruption* dikonversikan pada biaya pencapaian SDGs maka dunia memiliki sumber dana yang luar biasa untuk menciptakan tempat tinggal yang lebih baik bagi manusia. “Kita berharap, GOPAC dapat menjadi pemain kunci untuk mendorong perlawanan terhadap *grand corruption*, menjadi mitra kerja sama internasional untuk mendorong terciptanya mekanisme internasional untuk mengadili para pelaku *grand corruption*. GOPAC harus mampu untuk melumpuhkan impunitas, agar hukum tegak tidak pandang bulu (*equality before the law*),” tegas Ketua DPR.

Pertemuan juga menyepakati proyek kemitraan antara GOPAC Asia dan Arabi dengan Asian Development Bank (ADB) yang akan mendanai proyek tersebut. Kesepakatan itu disampaikan dalam Sidang GOPAC sesi 5, Rabu (7/10) di Yogyakarta. *Asian Development Bank*, merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerja sama teknis (*technical assistance*) kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya.



Ketua DPR Setya Novanto membuka Sidang Umum Gopac ke VI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, ada dua negara yang akan dijadikan percontohan dari proyek kemitraan tersebut yakni Asia Tenggara dan Yordania. Berjalannya proyek ini akan dilakukan secara transparan, dan parlemen dapat ikut mengawasi proses donor. Karena yang menjadi catatan selama ini, banyak proyek yang dikerjakan tidak transparan dan seringkali tidak terkontrol. Kadang penggunaan dana, kata Fadli, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak sampai pada tujuan. Dengan keterlibatan parlemen untuk ikut mengawasi, diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan. Penandatanganan kesepakatan proyek kemitraan ini diwakili oleh Wakil Ketua GOPAC Osei Kyei Mensah Bonsu dan perwakilan dari ADB Abdul Razak.

PELAJARAN UNTUK INDONESIA

Anggota delegasi dari DPR Hamdani menilai belajar dari keberhasilan negara lain lembaga antikorupsi seperti KPK perlu diperkuat dengan kehadiran lembaga pengawas. Hal ini mengemuka dalam sesi diskusi dengan tema, 'Stop Stealing from Us; Tools and Mechanism to Build Anti-Corruption Prevention System'. Pada sesi ini setiap delegasi mendapat kesempatan untuk menyampaikan dinamika perang melawan ko-

SENANG BISA MENGIKUTI SIDANG BERSAMA PARLEMEN DUNIA DAN JADI TAHU BAGAIMANA KORUPSI SEBAGAI MUSUH BERSAMA DI DUNIA. SAYA MELIHAT DPR PUNYA NIAT BESAR UNTUK MEMERANGI KORUPSI, TETAPI MEMANG PERLU UPAYA LUAR BIASA KARENA KORUPSI SUDAH SEPERTI PENYAKIT YANG SUSAH DIHILANGKAN

rupsi berdasarkan praktek yang sudah dilakukan. Terkait pembentukan lembaga pengawas ini menurutnya pantas menjadi bagian dalam revisi undang-undang KPK yang sudah masuk Program Legislasi Nasional.

"Iya ini konteksnya memperkuat lembaga antikorupsi, kita di Indonesia punya KPK. Kita tadi mendengar masukan dari sejumlah negara ternyata keberadaan lembaga pengawas KPK itu penting. Publik bisa berharap kinerja lembaga antikorupsi akan lebih optimal dengan kehadiran pengawas yang kompeten," katanya. Ia mementahkan pendapat bahwa revisi UU KPK berarti pasti memperlemah KPK. "Tidaklah,

konteksnya jauh dari melemahkan KPK. Kita tahu lembaga penegak hukum lain seperti Polri punya Kompolnas, kejaksaan juga diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Bentuknya nanti seperti apa tentu kita kaji lebih jauh, menghimpun masukan dari negara lain, dari masyarakat. Orientasi kita hanya satu, bagaimana perang melawan korupsi apalagi *grand corruption* bisa semakin efektif," tandas dia.

Juru bicara anggota delegasi parlemen Malaysia Kamarudin Jaffar dalam sesi diskusi menyebut KPK negaranya atau Suruhan Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) memiliki lima jawatan kuasa pengawasan dengan tugas berbeda. Salah satu dari tim pengawasan itu terdiri dari 7 anggota parlemen yang mendapat mandat dari ketuanya. "Pengawas dari parlemen mewakili partai-partai yang ada, tentu adalah representasi dari rakyat. Empat lainnya ada yang mengawasi pengaduan masyarakat, dasar kebijakan anti korupsi, *misconduct*. Mereka didukung profesional, ahli dibidangnya, tokoh masyarakat, *lawyer*, mantan hakim," demikian Jafar.

Dalam sesi diskusi dengan tema 'The High Cost of Institutionalizing Democracy', anggota delegasi DPR Dwie Aroem Hadiati dan sejumlah anggota parlemen dari 74 negara saling berbagi pemikiran tentang korupsi sebagai akibat dari politik biaya tinggi yang terjadi tidak hanya di Indonesia. Ia memaparkan dinamika pemilu di tanah air cenderung berkembang tidak sehat, terutama ketika terjadi interaksi kandidat dengan para pemilih. Sulit menyimpulkan siapa yang memulai tetapi budaya *wani piro* telah membuat banyak pihak akhirnya terjebak dalam praktek politik uang yang mengakibatkan *high cost politic* dan menyuburkan korupsi.

Baginya budaya *wani piro* – berani bayar berapa, pada akhirnya sudah menjangkiti mulai dari lapisan masyarakat bawah sampai ke atas. Ia mengaku harus berbesar hati ketika tuduhan itu kemudian lebih banyak mengarah ke politisi, baik oleh media maupun publik. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen ó BKSAP DPR ini kemudian mengajak segenap pihak untuk bekerja sama

untuk memperbaiki keadaan. Sebagai politisi menurutnya ia akan berupaya meng-golkan aturan perundang-undangan untuk mendukung aspek pecegahan. Sementara dari aspek penindakan ia meminta aparat hukum harus lebih tegas bersikap. Sementara itu anggota delegasi Parlemen Timor Leste Maria De Lurdes Bessa mengatakan salah satu solusi yang dilainnya cukup efektif untuk meredam *high cost politic* adalah membiayai kampanye dengan anggaran negara. Dengan kebijakan itu ia mengaku tidak terlalu terbebani secara finansial saat menyampaikan program politik yang akan diusungnya kepada masyarakat.

Ada hal menarik dalam diskusi dengan tema *'Increasing Women Parliamentarians, Leadership on Non-Traditional Issues'*, anggota delegasi parlemen Argentina Paula Bertol memaparkan kebijakan kuota 30 persen untuk menghadirkan lebih banyak perempuan di parlemen tidak tercapai. Banyak yang sudah berhasil memimpin di parlemen tetapi bukan di sektor yang mempunyai kewenangan memadai. Kebijakan untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada perempuan untuk berkarir di bidang politik dan sejumlah bidang lainnya adalah bagian dari upaya memperbaiki sistem yang cenderung meminggirkan kaum perempuan. Namun menurutnya kebijakan itu bukan dalam kerangka ingin menekan korupsi. "Adalah mitos, apabila ada yang mengatakan lebih banyak perempuan memimpin maka akan bisa mengurangi angka korupsi dan tidak benar pula banyak parlemen perempuan maka akan lebih banyak korupsi. Fokusnya adalah memperbaiki sistem yang ada karena perempuan saat ini tidak bisa berperan lebih bermakna dalam sistem yang ada sekarang," tekan dia.

PROMOSI PARIWISATA YOGYA

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen -- BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan pelaksanaan Sidang Umum Keenam GOPAC di Yogya adalah kesempatan baik bagi DPR untuk memperkenalkan potensi pariwisata Indonesia khususnya Yogya kepada 300

anggota delegasi. Apalagi delegasi yang hadir dilainnya terbesar dibandingkan dengan konferensi GOPAC sebelumnya. Tercatat ada 74 negara dengan 4 ketua parlemen yaitu dari Malaysia, Namibia, Serbia, Zimbabwe dan Indonesia. Ia juga menyebut 5 wakil ketua parlemen yaitu dari Chile, Turki, Timor Leste dan dua dari Indonesia. Dalam kesempatan jamuan makan peserta sidang menikmati ragam budaya Indonesia seperti tari batik, yang menggambarkan keelokan ragam batik di Nusantara. "Yogyakarta adalah kota yang cantik, kota kebudayaan dengan sentuhan modern. Luangkan waktu anda untuk berburu batik, berbelanja di Yogya. Kami juga mengajak anda untuk menikmati keindahan candi

sambut tepuk tangan panjang peserta sidang. Hal senada juga disampaikan anggota delegasi dari Zimbabwe, William Madzimure yang mengaku terkesan dengan suasana Yogyakarta. Ia menyebut selalu berusaha meluangkan waktu pada saat rehat sidang untuk berkeliling menikmati pesona kota budaya ini.

Bagi Osei Kyei Mensah Bonsu anggota parlemen dari Ghana yang terpilih menjadi Wakil Presiden GOPAC pengalamannya di Yogya akan menjadi kenangan yang indah sepanjang masa. "Konferensi selesai dan kita akan meninggalkan Yogyakarta dengan kenangan yang indah. Sekaligus dengan tekad bekerja memerangi korupsi untuk kepentingan kemanusiaan dan generasi yang akan datang,"



Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Gopac dan Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf

Prambanan," demikian Nurhayati.

Kejutan menyenangkan disampaikan Anggota Executive Committee GOPAC Naser Al Sane yang naik ke podium dengan pakaian dan surban khas negaranya Kuwait. "Sudah empat hari kita berada di Yogyakarta, melihat orang-orang yang selalu tersenyum di sekitar kita. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas keramah-tamahan dan juga dukungan terutama *counterpart* kami DPR RI, tuan rumah yang telah melakukan persiapan dengan baik," kata dia di-

tutur dia. Nurhayati Ali Assegaf menyambut baik sejumlah sambutan yang disampaikan anggota delegasi peserta Sidang Umum Keenam GOPAC. Ia menyebut keberhasilan ini adalah berkat kerja sama banyak pihak. "Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya warga Yogya yang telah mendukung dan mendoakan sehingga konferensi berjalan lancar," demikian Nurhayati. (IKY/TT) FOTO: RIZKA, ANDI/PARLE/IW

DPR DORONG EROPA LEBIH MANUSIAWI TERHADAP PENGUNGSI

DPR mendorong Eropa untuk memiliki keputusan yang adil bagi seluruh negara dan manusiawi bagi pengungsi. Dorongan tersebut disampaikan mengingat musim dingin yang akan segera tiba dikhawatirkan dapat menyebabkan semakin banyaknya korban yang akan berjatuh.

“Musim dingin akan segera tiba dalam beberapa bulan, dengan demikian akan banyak lagi pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di tenda-tenda, jalanan ataupun tempat perlindungan yang mungkin membeku menunggu keputusan dari Eropa,” kata Fadli Zon dalam pidatonya di Sidang Umum Inter Parliametary Union (IPU) ke-133 di Geneva, Switzerland. Lebih lanjut ditegaskan, jika Eropa tidak bisa memutuskan, semakin banyak korban akan berjatuh.

“Untuk itu saya mendorong Eropa untuk memiliki keputusan yang adil bagi seluruh negara dan manusiawi bagi para pengungsi,” tegas Fadli Zon pada Sidang IPU yang mengambil tema besar seputar isu migrasi dan pengungsi (The moral and economic imperative for fairer, smarter and more humane migration).

Namun, menurut Fadli Zon, penanganan masalah pengungsi bukan hanya menjadi tanggungjawab negara-negara Eropa. Melainkan juga negara yang telah meratifikasi Konvensi dan Protokol terkait dengan Status Pengungsi untuk berperan dalam penanganan pengungsi sesuai dengan yang telah diatur dalam konvensi dan protokol yang berlaku termasuk dalam hal proses pemukiman kembali.

Dalam sidang IPU yang dihadiri oleh lebih dari 650 anggota parlemen anggota IPU termasuk 92 Pimpinan Parlemen itu, Fadli Zon juga menyatakan menyambut baik adanya komitmen untuk melakukan langkah-langkah pemukiman kembali dan mendesak agar negara-negara lain yang belum turut serta dalam penanganan pengungsi untuk berbagi beban dan memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi yang telah diratifikasi bersama.

Akan tetapi, DPR juga menyatakan keprihatinannya atas adanya kecenderungan tertentu yang muncul dalam proses penentuan status pengungsi, khususnya dalam konteks dis-

kriminasi berbasis agama.

“Dalam konteks permasalahan ini, Indonesia mendesak negara-negara yang telah meratifikasi konvensi untuk secara penuh mengintegrasikan pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam proses yang ada. Tidak ada siapapun berhak dinilai berdasarkan ras, usia, jenis kelamin ataupun latar belakang agama tertentu,” tandasnya.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Sidang IPU ke-133

TANGANI PENGUNGSI

Delegasi DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Anggota Delegasi lainnya yaitu Nurhayati Ali Assegaf (Ketua BKSAP/F-Demokrat), Evita Nursanty dan Nazaruddin Kiemas (F-PDIP), Dwie Aroem Hadiatie (F-PG), Jazuli Juwaini (F-PKS), Alimin Abdullah (F-PAN), Okky Asokawati (F-PPP), dan Hamdhani (F-Nasdem) juga memaparkan panjang lebar tentang kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi.

Diungkapkannya, meski Indonesia bukan termasuk

negara yang meratifikasi konvensi pengungsi (catatan: ratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi tidak diwajibkan atau optional/pilihan sifatnya), namun Indonesia menerima banyak pengungsi. Tercatat per Agustus 2015 berdasarkan data UNHCR sebanyak 13.110 pengungsi dan pencari suaka berada di Indonesia.

“Kami tidak memiliki tanggungjawab apapun kepada pengungsi – bila merujuk pada konvensi. Namun, sejarah peperangan dan nilai-nilai solidaritas yang kami miliki mengajarkan bahwa kemanusiaan ada tanpa sebab apapun,” tegas Fadli.

Pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra ini kemudian menambahkan di Aceh, lebih dari 1.300 pengungsi dari Rohingya yang lari dari konflik dan tidak memiliki kewarganegaraan diselamatkan oleh penduduk setempat dan kemudian pengungsi tersebut dibawa ke Medan untuk mendapatkan perawatan.

Ditandaskan Fadli, solidaritas internasional harus menjadi

garda terdepan dalam situasi kemanusiaan seperti ini. “Kami telah bersepakat bersama Malaysia untuk merawat pengungsi Rohingya dengan menyediakan pemukiman sementara di sejumlah wilayah, “tandasnya.

Tetapi, lanjut Fadli, komunitas internasional perlu bekerja kolektif untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak berhak meninggalkan masalah yang ada hanya pada satu negara saja.

Terkait dampak negatif pengungsi, delegasi Indonesia mengarisbawahi arti pentingnya untuk tetap waspada ketika menangani dampak negatif dari migrasi yang tak berpola.

“Berdasarkan pengalamannya kami, motif yang ada tidak selalu politik, tetapi ada juga motif ekonomi, yang kemudian dieksploitasi sindikat kejahatan untuk menyelundupkan dan memperdagangkan mereka,” terang Fadli. Untuk itu, dia menegaskan perlunya diambil tindakan tegas untuk memerangi para penyelundup dan membawa mereka ke pengadilan.

Penegasan lain yang disampaikan oleh delegasi DPR dalam sidang IPU ke-133 adalah pentingnya mengatasi akar masalah dan faktor penyebab dari migrasi dan pentingnya memerangi penyelundupan dan perdagangan manusia.

Ditegaskan delegasi DPR, bahwa konflik di sebagian besar dunia telah memicu gelombang massif manusia. “Adalah penting untuk menggarisbawahi perlunya perdamaian pada negara asal migrasi yang tidak teratur tersebut,” tandas Fadli.

HENTIKAN PERANG DAN KONFLIK DI SURIAH

Delegasi DPR juga mendesak perlunya langkah-langkah internasional yang baru untuk menghentikan perang dan konflik yang terjadi terutama di Suriah. Situasi di Suriah menurut DPR telah menyebabkan penderitaan dan memaksa 12 juta rakyat Suriah meninggalkan rumah mereka.

Pada Sidang IPU yang menyoroiti krisis migrasi (pengungsi) di Eropa, Asia Tenggara, Afrika hingga Timur Tengah tersebut, DPR juga menyampaikan apresiasi terhadap kemurahhatian Lebanon, Yordania, Mesir, Irak dan Afrika Utara yang telah menjadi penampungan sekitar empat juta pengungsi Suriah.

Konflik Suriah itu sendiri menurut Delegasi DPR telah menimbulkan kesedihan bagi pengungsi Palestina yang ada di Suriah. “Mereka adalah pihak yang terdampak paling parah dalam konflik bersenjata yang berlangsung. Dari sekitar 560.000 pengungsi Palestina di Suriah,” imbuh Fadli.

Karena itu, lanjut Fadli, Indonesia menyambut baik respon dan dukungan komunitas internasional terhadap resolusi sidang Umum PBB yang mengizinkan bendera pengamat bukan anggota termasuk Palestina berkibar di Kompleks PBB. “Dukungan tersebut sangat penting untuk pengakuan kedaulatan rakyat Palestina dan mengembalikan tanah dan rumah serta

penghidupan yang semestinya mereka miliki,” tegas Fadli Zon.

Lebih lanjut Fadli menandaskan, arti penting Dewan Keamanan PBB untuk menjadi wadah yang memegang teguh nilai-nilai dan prinsip-prinsip piagam PBB. “Jika gagal, rezim keamanan dunia akan kehilangan kepercayaan. Karena itu saya menghimbau seluruh anggota PBB untuk berhenti memolitisir Dewan Keamanan PBB dan segera mencari solusi permanen atas isu-isu yang ada,” pinta Fadli seraya menutup pidatonya dengan penegasan bahwa rasa kemanusiaan sejatinya memanggil kita untuk mengakhiri segala bentuk peperangan dan konflik yang ada.

Dalam Sidang Umum, telah disepakati pula *emergency item* menjadi resolusi IPU ke-133 dengan topik *The Role of the IPU, Parliaments, Parliamentarians and International and Regional Organizations in Providing Necessary Protection and Urgent Support to Those who Have Become Refugees Through War, Internal Conflict and Social Circumstances, According to the Principles of International Humanitarian Law and International Conventions*.

Resolusi tersebut berisi beberapa pasal di antaranya: mengimbau agar parlemen bekerjasama dengan organisasi antarpemerintah maupun LSM untuk mengidentifikasi penyebab arus pengungsi; mengakui prinsip tanggung jawab internasional terkait pengungsi untuk melindungi mereka melalui bantuan kemanusiaan dan memenuhi HAM mereka.

Kepada seluruh negara yang tengah menampung pengungsi, diminta untuk mematuhi prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (IHL) dan hukum internasional terkait pengungsi dengan menyediakan kebutuhan dasar mereka, menghindari permusuhan ataupun penyalahgunaan kekuasaan terhadap harkat dan martabat mereka ataupun main hakim sendiri dan perlu pula mengingat bahwa setiap pengungsi harus mematuhi setiap aturan hukum dan upaya untuk menjaga ketertiban umum di negara penampung.

Selain agenda Sidang Umum, Delegasi DPR juga mengikuti beragam kegiatan yang tersebar dalam organ-organ IPU yakni *Standing Committee on Peace and International Security, Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade, Standing Committee on Democracy and Human Rights, Standing Committee on UN Affairs, Committee To Promote Respect for International Humanitarian Law, Meeting of Women Parliamentarians, Forum of Young Parliamentarians*. Selain terlibat dalam beragam agenda persidangan IPU, Delegasi DPR juga berkesempatan untuk berdialog dan bertatap muka dengan sejumlah Delegasi seperti Parlemen Mongolia dan Parlemen Irak. (SKR) FOTO: DOK./PARLE/IW



Bersama delegasi Parlemen Mongolia

RIO DEWANTO

HARUS TAHU POLITIK

Dunia seni peran tidak hanya merubah kehidupan pemilih wajah Oriental ini, namun juga mempertemukannya pada sang belahan jiwanya. Ditemui usai konferensi pers Film *Surat Dari Praha*, pemilik nama lengkap Rio Dewanto ini terlihat antusias menjawab berbagai pertanyaan, baik yang terkait dengan kiprahnya di dunia seni, maupun situasi politik tanah air. Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parleментарia mengisahkannya untuk anda.

Konferensi Pers telah usai, sang surya pun perlahan kembali ke peraduan malam, namun senyuman tak hilang dari pria berwajah oriental ini untuk tetap menjawab berbagai pertanyaan dari para wartawan. Kepada Parleментарia, Rio mengaku saat ini bukan saatnya untuk tahu atau tidak tentang dunia politik, namun merupakan sebuah wujud kepedulian kita sebagai warga negara terhadap bangsa dan negaranya.

“Kalau kita peduli dengan bangsa dan negara ini, mau tidak mau kita harus tahu tentang politik. Walaupun kita tidak terjun langsung di dalamnya,” ungkap Rio.

Rio menjelaskan, politik dan sistem pemerintahan menjadi satu kesatuan yang akan memengaruhi hajat hidup masyarakat luas. Oleh karena itu masyarakat juga harus *aware* terhadap dunia politik, karena disanalah terletak segala kebijakan yang ikut dirasakan dan dialami oleh masyarakat.

Meski demikian Rio mengaku belum ada niat untuk terjun dalam dunia politik praktis, seperti menjadi kader partai tertentu dan menjadi calon legislatif (Caleg), ataupun sejumlah jabatan politik lainnya. Namun ia merasa masih banyak yang harus dibenahi dari bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang bergelet dalam dunia seni kreatif, Rio menilai kepedulian pemerintah saat ini terhadap dunia seni kreatif masih kurang. Padahal banyak peluang yang memungkinkan dunia seni kreatif Indonesia dikenal di mancanegara.

“Sebut saja ketika saya ke Philipina, Indonesia sebenarnya mendapat jatah *boot* untuk ekspo film market. Sayangnya hal itu tidak dimanfaatkan dengan baik, *boot* kita kosong. Padahal ini kan kesempatan untuk menjual dan memperkenalkan karya film kita,” jelas pria kelahiran 28 Agustus 1987.

Pikiran nakal Rio mencoba menduga bahwa *event* tersebut hanya dimanfaatkan oleh orang-orang pemerintah hanya untuk liburan, namun tidak menggunakan kesempatan itu sebagai ajang promosi budaya dan perfilman Indonesia. Hal itu pula yang menurut Rio sudah mulai dikritisi oleh BPI (Badan Perfilman

Indonesia).

Putra pasangan Winarto Subekti dan Budi Setyowati ini pun berharap pemerintah yang sekarang lebih memperhatikan industri seni kreatif serta industri lainnya yang terkait langsung dengan masyarakat luas, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Lebih lanjut ia mengatakan sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya, ia berharap pemerintah dapat menekan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang terus meningkat. Pasalnya hal ini berpengaruh terhadap peningkatan harga-harga kebutuhan pokok.

LEWAT SENI BERTEMU SANG ISTRI

Memiliki postur tubuh yang memadai ditambah wajah oriental yang cukup menawan, tentu tidak sulit bagi Rio untuk masuk dalam dunia hiburan lewat seni peran. Padahal awalnya ia ingin menjadi seorang penyanyi. Namun nasib menuntut Rio untuk terlebih dahulu berkiprah dalam dunia akting. Singkat cerita, oleh salah satu *production house* Rio didapuk peran dalam berbagai judul film televisi (FTV). Sebut saja FTV bertajuk *Rocker Pulang Kampung*, dan *Cinta Datang Saat Kamu Tidur* menjadi dua dari puluhan judul FTV yang dilakoninya.

Puas berakting dalam dunia layar kaca, ia pun mencoba peruntungan dalam dunia layar lebar. Meski hanya berperan sebagai figuran, namun kiprahnya di film *Ratu Kosmopolitan* dan *Pintu Terlarang* menjadi pengalaman pertamanya di dunia layar lebar yang memberikan pelajaran tersendiri bagi dirinya. Siapa sangka jika pengalaman pertamanya menjajaki dunia layar lebar menjadi batu loncatan untuk karirnya ke depan. Tahun 2011 sutradara yang pernah sukses menggarap film fenomenal *Ayat-ayat cinta*, Hanung Bramantyo mendapuknya peran utama film terbarunya saat itu yang bertajuk *Tanda Tanya*.

Tidak hanya Hanung yang cukup tertarik untuk memberikan peran dalam film yang tengah digarapnya. Berturut-turut sutradara ternama lainnya Nia Dinata dan Rudi Soedjarwo mengajaknya untuk ikut berlakon dalam film sekuel



yang digarapnya masing-masing. Alhasil, Rio pun berlakon sebagai homoseksual dalam film *Arisan 2* yang disutradarai Nia Dinata. Sementara Rudi Soedjarwo mempercayai peran sebagai Pak Wisnu, Pelatih Sepakbola yang galak dan keras dalam film *Garuda di Dadaku 2*.

Di tahun yang sama, Rio mendapat kesempatan untuk beradu akting dengan wanita yang kini menjadi istrinya, Atiqah Hasiholan dalam film *Hello Goodbye* yang mengambil syuting di Korea Selatan. Bersama Atiqah jua ia berlakon dalam film yang juga melibatkan aktor-aktor Hollywood seperti Mickey Rourke, Kellan Lutz.

Witing tresno jalaran seko kulino peribahasa Jawa untuk menunjukkan tumbuhnya cinta karena terbiasa bersama, agaknya tepat untuk dikenakan pada Rio dan Atiqah. Karena seringnya bersama, muncul benih-benih kasih diantara keduanya yang tak sekedar kasih antar sesama teman dan pekerja seni. Kurang lebih tiga tahun melakukan peninjauan, tepat 24 Agustus 2013 lalu bertempat di Kepulauan Seribu, Rio secara resmi meminang putri seniman dan aktivis Ratna Sarumpaet dan Achmad Fahmy Alhady. Menikah tak menghalangi keduanya untuk terus berakting. Bahkan keduanya pun tak canggung untuk kembali beradu akting dalam film yang sama, *Bulan Di Atas Kuburan*.

Kini setelah sekian lama berlakon, Rio pun mencoba menjajaki dunia bisnis. Dimulai dari bisnis kuliner, Rio mengembangkan sayap dalam bisnis fashion lewat *fashion line* sendiri. Ke depan ia mengaku tertarik untuk menjajal peruntungan dalam bisnis topi dan sepatu.

(AYU) FOTO RIZKA/PARLE/1W



*Ketua DPR RI
Setya Novanto
dan Sekjen DPR
Winantuningtyastiti
berfoto bersama
peserta Parlemen
Remaja 2015*

Semangat Parlemen Modern Warnai Pelatihan Parlemen Remaja 2015

Enam bus berjalan beriringan memasuki kompleks Wisma Griya Sabha di Kopo, Jawa Barat. Tepat di depan gedung pertemuan, rombongan bus itu berhenti. Ketika pintu bus terbuka, dengan langkah bersemangat, satu persatu penumpang turun. Mereka, adalah 139 orang peserta Parlemen Remaja 2015 - calon penerus tongkat estafet bangsa. Para siswa tingkat SMA/SMK/MA itu terpilih melalui seleksi yang ketat dari keseluruhan calon peserta yang mendaftar yang mencapai 2.149 orang.

Parlemen remaja adalah amanat dari Asosiasi Parlemen Dunia (IPU) yang menetapkan tanggal 15 September sebagai "International Day Of Democracy". Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan IPU diamanatkan untuk menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja sebagai wahana pendidikan Demokrasi. Karenanya, sejak tahun 2010, Parlemen Remaja selalu digelar setiap tahun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti menilai positif kegiatan parlemen remaja karena memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bisa mempelajari proses kerja Dewan.

"Para peserta akan pelajari proses kerja kemudian simulasi praktek langsung bagaimana tidak mudahnya berperan sebagai Anggota Dewan," kata Sekjen DPR usai membuka Parlemen Remaja 2015, di Wisma DPR, Cisarua, Bogor, baru-baru ini.

Selama mengikuti kegiatan, peserta Parlemen Remaja terlihat antusias mengikuti pelatihan yang diberikan anggota DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada tahun 2015 ini tema pelatihan bertajuk 'DPR Modern Dalam Demokrasi Indonesia'.

"Antusiasme ini adalah bukti dari perhatian generasi muda kepada DPR. Antusiasme yang tinggi itu membuktikan, bahwa partisipasi dan perhatian masyarakat terutama generasi muda kepada DPR

tidak pernah surut,” kata Sekjen DPR.

Selain dikenalkan mekanisme kerja DPR dalam melakukan persidangan dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) dan melakukan fungsi pengawasan melalui mekanisme persidangan, mereka juga melakukan simulasi rapat sehingga para peserta parlemen remaja benar-benar dapat menghayati peran sebagai anggota DPR.

Sebagai penyemangat, pada parlemen remaja 2015 digunakan jargon Semangat Parlemen Modern sesuai dengan tekad dan semangat DPR Periode 2014-2019 bertransformasi menjadi parlemen modern. Berulang kali pekikan semangat para peserta parlemen remaja 2015 pun terdengar...“Parlemen Remaja 2015, Semangat Parlemen Modern!”

Guna lebih menghayati pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dalam rangka mewujudkan representasi rakyat, para peserta parlemen remaja juga diajak turun langsung melakukan serap aspirasi rakyat di Desa Cinagara dan Cimande, Sukabumi, Jawa Barat. Semangat yang mereka tunjukkan selama melakukan kegiatan kunjungan kerja di kedua desa tersebut laksana mengisyaratkan cahaya terang akan keberlangsungan estafet tongkat kepemimpinan bangsa di masa mendatang.

DIPUJA DI SANA, DIHAJAR DI SINI

Sementara itu Ketua DPR RI Setya Novanto tak hanya mengutarakan rasa bangga, namun juga berbagi pengalaman-pengalamannya selama menjadi Ketua DPR kepada seluruh peserta Par-

lemen Remaja 2015.

Diselingi percakapan yang hangat dan ringan, Ketua DPR mulai berbagi pengalaman saat memantau kebakaran hutan naik helikopter bersama Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memantau langsung upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang pada kondisi jarak pandang yang hanya mencapai 1 (satu) meter dan di bawahnya ada hutan yang terbakar.

“Saya deg-degan juga kan bahaya. Saya tanya ke pilotnya yang tentara katanya ‘siap’, saya bilang jangan siap-siap aja, yang penting aman enggak? Tapi karena bareng Menko Polhukam dan Panglima yang berani-berani ya saya pura-pura berani saja. Kita terbang, panduan kita cuma GPS saja,” tutur Novanto berkisah.

Kepada para peserta parlemen remaja, politisi dari Partai Golkar ini juga berbagi suka dukanya selama menjadi Ketua DPR termasuk saat bertemu dengan kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dijelaskan Novanto niat bertemu dengan Trump sebenarnya merupakan upaya untuk mengajak berinvestasi di Indonesia, sehingga dapat membuka banyak lapangan kerja.

“Waktu mau pulang, tiba-tiba saya ditarik sama dia dan dia bilang ‘ inilah Ketua DPR paling berpengaruh di Indonesia’. Itu dia yang bilang loh, bukan saya. Tapi setelah itu saya dihantam habis-habisan di dalam negeri. Jadi di sana saya dipuji, di sini saya dihajar,” kata Novanto.

SAYA DEG-DEGAN JUGA KAN BAHAYA. SAYA TANYA KE PILOTNYA YANG TENTARA KATANYA ‘SIAP’, SAYA BILANG JANGAN SIAP-SIAP AJA, YANG PENTING AMAN ENGGAK? TAPI KARENA BARENG MENKO POLHUKAM DAN PANGLIMA YANG BERANI-BERANI YA SAYA PURA-PURA BERANI SAJA. KITA TERBANG, PANDUAN KITA CUMA GPS SAJA,

“Cerita Saya bertemu bos-bos di Silicon Valley sudah tertutup isu bertemu Trump. Padahal isu ini penting. Tapi saya cerita juga ke teman teman DPR, supaya gak friend makan friend” imbuhnya.

Kepada para peserta Parlemen Remaja 2015, ketua DPR juga menyampaikan harapannya agar peserta Parlemen Remaja dapat memberikan kontribusi yang besar kepada teman-teman, sekolah, dan keluarganya bahwa parlemen mempunyai fungsi tugas sesuai dengan kaedah-kaedahnya untuk bisa berjalan bersama pemerintah. Meraka diharapkan mengetahui bahwa parlemen ini adalah parlemen yang mempunyai kewibawaan yang tinggi dan mempunyai tugas-tugas yang sangat berat.

“Diharapkan peserta Parlemen Remaja dapat menjelaskan kepada seluruh elemen masyarakat dan juga sekolahnya masing-masing,” tegas Setya Novanto

Usai berbagi pengalaman selama memimpin DPR termasuk berbagai kisah suka dukanya, Ketua DPR menyerahkan palu sidang DPR kepada Ketua Parlemen Remaja 2015 Muhammad Farid Fauzan dari SMAN 5 Balikpapan Kalimantan Timur, dilanjutkan dengan foto bersama di tangga Gedung Nusantara. (SKR/AS)

FOTO: SINGGIH/PARLE/IW



Kunker Parlemen Remaja 2015 ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Silih Asih, Kab. Bogor



Seorang anak suku Sasak mendampingi ibunya menenun

DI LOMBOK ANAK DIAJARI TENUN SEJAK USIA BALITA

Ada adat istiadat menarik suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hingga masih kuat dipertahankan. Yaitu seorang gadis akan dites lebih dulu sebelum memasuki jenjang pernikahan. Bukan tes keperawanan, melainkan tes apakah sudah mampu membuat kain tenun atau tidak.

Apabila belum mampu membuat satu lembar kain tenun songket maka tidak akan diizinkan untuk menikah. Itulah prinsip dasar keluarga di Pulau Lombok. Kemampuan menenun ini dimaksudkan, pada saat suaminya tidak mampu menafkahi maka sang isterilah yang harus membantu untuk mencukupi perekonomian keluarga dan anak-anaknya kelak.

Karena itulah, proses diajarkan untuk membuat kain tenun ini dilakukan sejak anak-anak masih balita, diberikan ilmu pengetahuan tentang alat-

alatnya, benang-benangnya termasuk cara membuatnya sampai siap berumur 7-8 tahun mereka diajari membuat kain tenun yang *simple* dan polos.

Setelah beranjak remaja, mulai diajarkan untuk membuat motif kain yang paling sulit yaitu motif tenun songket Subhanalo. Kata Subhanalo diambil dari kata Subhanallah, karena susah sekali membuat tenunannya jadilah tenun Subhanallah.

“*Saking* sulitnya kain tenunan tersebut prosesnya bisa memakan waktu sampai tiga bulan, dan hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan

karena menurut kepercayaan orang tua suku Sasak Lombok bahwa jika ada laki-laki yang menenun akan menjadi mandul,” ujarnya dengan mengatakan hal itu mitos.

Peserta Press Gathering mengunjungi langsung desa tenun Sukarare. Mereka menyaksikan bagaimana gadis-gadis dan perempuan di desa itu dengan jari-jari lincahnya memproses benang menjadi sehelai kain indah dan menarik.

Itulah salah satu kisah yang disajikan pemandu wisata pada acara Press Gathering Koordinatoriat wartawan DPR di Lombok, NTB pada akhir Oktober lalu. Dari Pimpinan dan anggota hadir Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua BURT Dimiyati Natakusumah dan anggota DPR Willgo Zaenar. Dari jajaran Setjen, hadir Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Kepala Badan Keahlian Johnson Rajagukguk, Irtama Setyanta Nugraha dan Deputi Persidangan dan KSAP Damayanti serta Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko dan Kepala Bagian Pemberitaan Irfan.

Pemilihan lokasi Gathering di Lombok dinilai tepat karena banyak destinasi wisata serta budaya yang menarik. Bahkan di kota yang dikenal dengan sebutan “Kota Seribu Masjid” ini mendapat dua predikat kota wisata halal se dunia.

Dalam World Halal Travel Award 2015

DALAM WAKTU SEKEJAP, KINI KITA SUDAH MENIKMATI BERITA DI GADGET. INI SUATU REVOLUSI DI DUNIA PERS YANG LUAR BIASA DAN TIDAK ADA BANDINGANNYA. DI ZAMAN SAYA, MENGETIK BERITA ITU MASIH MENGGUNAKAN MESIN KETIK, DAN SERBA MANUAL.

di Uni Emirat Arab (UEA), Indonesia mendapat penghargaan sebagai *World's Best Halal Tourism Destination* (Lombok), *World's Best Halal Honeymoon Destination* (Lombok), dan *World's Best Family Friendly Hotel* (Sofyan Hotel).

TERSAJI REAL TIME

Pada acara gathering ini Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, media massa mengalami revolusi yang sangat pesat. Di masa lalu, media massa hanya tersedia pada media elektronik dan media cetak. Namun kini, media massa merambah ke media online, yang melahirkan *online news*. Sehingga, berita sudah dapat tersaji secara *real time*.

Pada acara yang bertema, “Membangun Pemahaman Pers tentang Kinerja Dewan di Daerah Pemilihan” lebih lanjut Pimpinan Dewan Koordinator Polkam ini mengatakan, dalam waktu sekejap, kini kita sudah menikmati berita di *gad-*



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

get. Ini suatu revolusi di dunia pers yang luar biasa dan tidak ada bandingannya. Di zaman saya, menetik berita itu masih menggunakan mesin ketik, dan serba manual,” jelasnya.

Dia menyatakan sangat mendukung keberadaan pers. Tanpa adanya pers, tidak akan ada demokrasi. Karena salah satu ciri negara demokrasi, adalah adanya kebebasan pers, namun pers yang bertanggung jawab.

“Pers di negara lain, itu sangat terbatas, seperti di Singapura dan China. Di sana, pers di kontrol oleh negara. di Indonesia, sudah banyak tokoh pers yang berjuang, untuk mendapatkan status pers yang bebas. Itu butuh perjuangan lama,” kenang Fadli.

Fadli memastikan, kehadiran pers sangatlah penting. Bahkan, pers sampai digadang menjadi pilar ke empat demokrasi, setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. (SPY,MP) FOTO: ANDRI/PARLE/IW

Foto bersama wartawan koordinatoriat dengan Pimpinan Dewan dan Pejabat Setjen DPR RI





Kebijakan Parlemen Meksiko Mengantisipasi Perubahan Iklim: Proses Legislasi LGCC



By: Hilda Piska Randini, M Adinda Rizki Rakhmansyah, Prasetya Pudji Wasito
(Peneliti pada Center for Election and Political Party FISIP UI)



penduduknya berbicara dengan bahasa Spanyol. Menurut Konstitusi tahun 1917, Pemerintahan Meksiko berbentuk Republik Federal dengan kekuasaan yang dibagi menjadi tiga institusi politik (*Trias Politica*) eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meksiko memiliki sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden bertindak selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan hanya bisa dipilih untuk satu periode.

Selama periode 1980 – 2013 sekitar 80% dari total kerusakan yang dihasilkan dari perubahan iklim di Meksiko menimpa sektor pertanian (Springer, 2015).

Masalah lain di Meksiko dalam menghadapi perubahan iklim adalah air. Masalah ini sebenarnya bukan terletak pada ketersediaannya melainkan pada distribusi sumber airnya. Aktifitas ekonomi dan kepadatan penduduk di beberapa negara bagian di Meksiko membuat distribusi air terhambat. Selain itu, polusi air juga semakin memperbesar masalah



(Marco Ugarte / AP Photo)

MEKSICO DAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN

Meksiko merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi paling kuat di benua Amerika. Dengan PDB nominal yang mencapai lebih dari US\$ satu triliun, ekonomi Meksiko adalah yang terbesar ke-15 di dunia. Namun, dibalik perekonomian Meksiko yang kuat, kondisi geografis Meksiko yang terletak di dua samudera dan topografi yang unik mengakibatkan Meksiko menjadi rentan terhadap ancaman perubahan iklim. Banyak bencana seperti angin siklon, banjir dan kekeringan terjadi dan ditambah fakta bahwa suhu rata-rata di Meksiko naik sekitar 0.85°C per tahunnya. Sektor pertanian Meksiko pun menjadi terancam akibat masalah perubahan iklim seperti ini. Selain ancaman masuknya produk pertanian impor, petani di Meksiko juga dihadapkan kepada masalah iklim yang tidak menentu.

dan berbahaya bagi kesehatan warga Meksiko. Seiring padatnya penduduk Meksiko, ketersediaan dan kualitas air lama kelamaan menurun. Dari 535 sumber air yang ada hanya 5% yang dapat dikatakan baik untuk dikonsumsi. Hanya 22% dianggap cukup layak, dan 73% sisanya dikatakan tercemar dan polusi akut (Edward Edgar Publishing, 2004).

Pada tahun 2011 Negara Meksiko dinyatakan sebagai negara yang menyumbang 1,4% dari total emisi global yang dihasilkan dari sisa pembakaran bahan bakar fosil. Fakta ini membuat Meksiko menjadi negara penghasil emisi terbesar ke-12 di dunia (Mexico: Federal Government of Mexico, 2013). Oleh karena itu, Parlemen Meksiko beserta pemerintah mulai melakukan serangkaian kajian hingga proses regulasi tentang perubahan iklim dan bagaimana pada akhirnya disahkan UU Perubahan Iklim tersebut untuk mengatasi dampak emisi global.

Meksiko merupakan salah satu negara di Amerika Utara yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Meskipun berada di Amerika bagian utara, corak budaya dan penduduknya sama dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin yaitu sebagian besar



Sadar akan permasalahan lingkungan yang harus segera diatasi, membuat Kongres Meksiko menyusun regulasi mengenai perubahan iklim. Dalam tulisan kali ini, penulis akan membahas mengenai upaya yang dilakukan Parlemen Meksiko dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut.

KEBIJAKAN PARLEMEN MEKSIKO MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM: PROSES LEGISLASI LGCC

Lembaga legislatif di Meksiko adalah Parlemen atau Kongres yang menga-

nut sistem *bikameral* atau dua kamar yaitu Senat (*Cámara de Senadores* or Senado) dan *Chamber of Deputies* (*Cámara de Diputados*). Anggota Parlemen merupakan gabungan dari *Chamber of Deputies* dan Senat. Anggota *Chambers of Deputies* berjumlah 500 orang yang berasal dari perwakilan dari seluruh wilayah yang dipilih dari partai melalui pemilu. Sementara Senat berjumlah 128 orang yang mewakili tiap-tiap negara bagian.

Dalam penyusunan kebijakan, Parlemen memiliki peranan yang sangat

penting dalam Pemerintahan Meksiko. Kekuasaan Parlemen meliputi kekuasaan untuk meloloskan Undang-Undang, membebaskan pajak, menyatakan perang, memiliki hak *budgeting*, menerima atau menolak perjanjian dan konvensi yang dilakukan dengan negara lain, dan meratifikasi pertemuan diplomatik.

Lahirnya peraturan untuk mengantisipasi perubahan iklim serta kebijakan yang berwawasan lingkungan tak terlepas dari langkah-langkah Parlemen Meksiko. Kronologi kebijakan yang diambil oleh Parlemen dan Pemerintah



Meksiko tentang lingkungan hidup dan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel berikut:

Draft RUU LGCC (*Ley General de Cambio Climático*) atau RUU Umum tentang Perubahan Iklim mulai disusun pasca Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-17 (COP 17) yang diadakan di Durban,

suara mendukung, 10 suara menolak dan 1 suara absent. Draft LGCC kemudian dikembalikan ke Senat Meksiko untuk finalisasi. Akhirnya pada tanggal 19 April 2012 Senat Meksiko secara penuh mengesahkan LGCC dengan dukungan penuh 78 suara (Mexico Climate Change, 2011). LGCC merupakan model regulasi

Tabel 1
Kronologi Kebijakan Parlemen Meksiko tentang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (2007-2014)

TAHUN	DESKRIPSI
2007	Pemerintah Meksiko meluncurkan Strategi Nasional tentang Perubahan Iklim
2008	UU tentang Penggunaan Energi Terbarukan dan Pembiayaan Program Transisi Energi (<i>Law on Renewable Energy Use and Financing the Energy Transition</i>) disahkan oleh Kongres Meksiko
2009	Peluncuran Program Khusus Pertama tentang Perubahan Iklim
2012	LGCC disahkan oleh Kongres Meksiko
2013	Pemerintah Meksiko meluncurkan Strategi Nasional tentang Perubahan Iklim untuk 10, 20 dan 40 tahun
2014	Peluncuran Program Khusus Kedua tentang Perubahan Iklim

Afrika Selatan pada tahun 2011. Pemerintah Meksiko bersama beberapa NGO kemudian melakukan kajian mengenai regulasi tentang perubahan iklim yang ada di tataran pemerintah federal dan negara bagian. Tujuannya adalah untuk melihat kapasitas kebijakan yang ada, mengidentifikasi gap dan mulai mendorong reformasi positif.

Pada tanggal 6 Desember 2011 Senat Meksiko secara penuh menyetujui draft LGCC yang terdiri dari tujuh RUU yang dimasukkan sejak tahun 2007 hingga 2011. Penyusunan draft tersebut melibatkan senator-senator dari semua partai politik mayoritas dan mendapatkan masukan-masukan penting dari para pemangku kepentingan mulai kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, NGO dan pelaku di sektor swasta.

Tahap selanjutnya adalah persetujuan draft LGCC oleh Chamber of Deputies. Melalui voting, Chamber of Deputies menyetujui draft LGCC dengan 280

(UU) yang disusun berdasarkan kontribusi aktif dari para senator partai-partai politik mayoritas, masyarakat dan sektor swasta serta disahkan dengan dukungan mayoritas baik di tingkat Senat maupun di Chamber of Deputies.

Dengan terbitnya UU ini, Meksiko menjadi negara kedua di dunia setelah Inggris (melalui *Climate Change Act*, yang disahkan tahun 2008) yang mengesahkan regulasi komprehensif dalam rangka menangani dampak perubahan iklim dengan pendekatan *multi-stakeholder*. Poin penting lainnya, UU ini mampu menyingkirkan pandangan bahwa kebijakan tentang perubahan iklim hanya isu sesaat yang diusung partai-partai politik dan masa pemilu di Parlemen Meksiko serta menjadikan isu perubahan iklim ini menjadi prioritas jangka panjang Negara Meksiko dengan membentuk perangkat hukum dan kelembagaan sesuai tantangan yang dihadapi. ***

*Anggota Komisi II
Henry Yosodiningrat dan
Zulkifli Anwar*

SATU ILMU LAIN JIMAT



UNGKAPAN satu ilmu satu guru jangan saling ganggu, sudah biasa didengar. Namun kalau satu ilmu lain jimat, baru kali ini kita dengar. Itulah sepotong kalimat yang meluncur dari anggota Dewan asal Lampung Zulkifli Anwar saat pertemuan dengan Kanwil BPN Provinsi Lampung dihadiri Sekda dan Kapolda Prov. Lampung dalam acara gelar perkara kasus-kasus pertanahan di Lampung.

Dalam kunker spesifik Panja Pertanahan Komisi II yang dipimpin Ahmad Reza Patria belum lama ini, mantan Bupati Lampung Selatan ini terusik dengan pertanyaan anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Henry

Yosodiningrat yang mempersoalkan tanah register 40. “Sebagai anggota DPR dari Dapil Lampung II, saya didatangi masyarakat yang menduduki register 40 dua malam berturut-turut. Maka wajib hukumnya untuk memperjuangkan. Saya sudah mengidentifikasi dan pegang data-data, semestinya Zulkifli Anwar berterima kasih,” kata Henry.

Zulkifli Anwar dan Henry Yosodiningrat sama-sama anggota Dewan asal Lampung. Namun keduanya beda partai Zul dari Fraksi PD sedangkan Henry dari PDI Perjuangan. Zul -panggilan akrabnya- mempertanyakan mengapa Henry mempersoalkan register 40



karena ada di wilayahnya Jati Agung yang sekarang ada kota baru. Kalau bicara untuk kepentingan masyarakat, siap bersaksi berdua bersama Sekda Arinal Junaedi yang mantan Kadinas Kehutanan telah memperjuangkan tanah bagi kepentingan rakyat.

Tanah register 40, Zul bersama BPN meminta Menhut untuk melepaskan karena dia tahu persis kalau di peta bergaris merah, berarti bukan hutan lindung. Itu adalah hutan produksi bisa dikonversi dan diberikan ke masyarakat.

“Saya sependapat dengan Henry Yosodiningrat sama-sama membela Lampung. Kita ke Kemenhut karena kewenangan itu bukan di BPN, bukan di Propinsi tapi di Kemenhut,” ujarnya dengan me-

nambahkan setuju register 40 itu sudah dihuni bertahun-tahun supaya dikasih kepada masyarakat untuk diberdayakan.

Ungkapan satu guru lain jimat ada benarnya, sang guru berharap semua muridnya sukses. Demikian pula DPR meski warnanya lain, muaranya adalah berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam salah satu poin hasil diskusi Panja Pertanahan Komisi II DPR ini sepakat bahwa kasus-kasus tanah di Lampung bisa segera diselesaikan sehingga menjadi model penyelesaian kasus-kasus tanah di tingkat nasional. (MP) FOTO: MASTUR PRANTONO/PARLE/IW

Bung PARLE

TAK TERASA SUDAH
SETAHUN PAK JOKOWI
MENJABAT PRESIDEN YA...

IYA... TAK TERASA
KARENA SEBAGIAN RAKYAT
MERASA TAK ADA PERUBAHAN
YANG BERARTI, NAWACITA
MASIH JAUH DARI
HARAPAN

TAPI BUKAN
BERARTI PEMERINTAH
TAK BERUSAHA
KAN DUL...
PEMERINTAH SUDAH
MERACIK PAKET
KEBIJAKAN EKONOMI
YANG DIAKUI SARAT
AROMA NAWACITA

DAN INI SUDAH
ENAM PAKET KEBIJAKAN
YANG DILUNCURKAN...

TAPI
EFEKNYA
MANA
BUNG ??

NAH ITU DIA DUL !!!
SEBAGUS APAPUN KEBIJAKAN,
TANPA KOORDINASI YANG
BAIK TAK AKAN
BERHASIL...

BETUL... BETUL...
SEMOGA KOORDINASINYA
DIPERBAIKI JUGA YA BUNG...
BIAR
**EFEKNYA
NENDANG !**